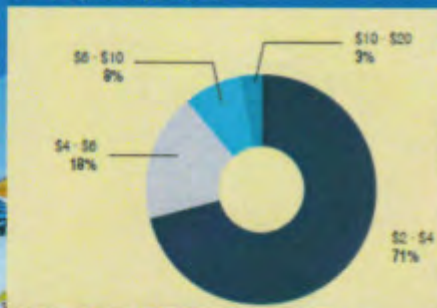


KELAS MENENGAH : TEORI, PROBLEMATIKA DAN KRITIK

Grafik 2. KELAS MENENGAH INDONESIA, 2010
(taraf pengeluaran per kapita)



Iva Yulianti Umdatul Izzah

PENERBIT JDS

**KELAS MENENGAH: TEORI,
MASALAH DAN KRITIK**

Iva Yulianti Umdatul Izzah

PENERBIT JDS SURABAYA

2019

**Kelas Menengah: Teori,
Masalah, dan Kritik**

Surabaya: Penerbit JDS 2018
VI+267 hlm
ISBN : 978-602-530239-8

Hak cipta pada pengarang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan cara apapun, termasuk dengan cara
penggunaan mesin fotokopi, tanpa seizin dari penerbit

Cetakan Pertama, 2019

Hak penerbitan
Penerbit JDS Surabaya

Dicetak di CV. JAUHAROH DARUSALAM

Penerbit JDS
Jl. Jemur Wonosari Lebar 61
Wonocolo, Surabaya-60237
Telp. 085649330626
Email : jdspresssurabaya@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I C. WRIGHT MILLS: KELAS MENENGAH, KEKUASAAN DAN ILMU SOSIAL

A. Pendahuluan.....	1
B. Asumsi	6
C. Birokrasi.....	8
D. Kekuasaan dan Otoritas	14
E. Elit.....	20
F. Masyarakat Massa.....	29
G. Rasionalisasi	31
H. Masalah-masalah Sosial Masalah-masalah Sosial	34
I. Ilmu Sosial	43
J. Imajinasi Sosiologi.....	51
K. Kerah Putih: Kelas Menengah Amerika	53
L. Catatan Kritis Teori Mills	66

BAB II POLITIK KELAS MENENGAH INDONESIA: PANDANGAN BERBAGAI TOKOH

A. Konsep Kelas Menengah Weberian.....	76
B. Kelas Menengah dan Teori Marxis.....	80
C. Kelas Menengah Indonesia	81
D. Catatan Kritis	113

BAB III RICHARD ROBISON: KELAS MENENGAH ASIA TENGGARA DAN INDONESIA

A. Apa Itu Kelas Menengah?.....	136
---------------------------------	-----

B. Munculnya Kelas Menengah di Asia Tenggara	143
C. Dampak Politik dari Kelas Menengah Asia Tenggara..	147
D. Richard Robison: Kenaikan Kapital di Indonesia.....	167
E. Catatan Kritis	175

BAB IV KELAS MENENGAH INDONESIA DAN ILMU SOSIAL

A. Kelas Menengah, Civil Society dan Demokrasi	186
B. Kelas Menengah dan Demokrasi di Indonesia.....	193
C. Ilmu Sosial dan Masalah Kelas di Indonesia	199
D. Catatan Kritis	202

BAB V KELAS MENENGAH BARU: GAYA HIDUP GLOBAL, KONSUMERISME DAN MASALAH LINGKUNGAN

A. Kelas Menengah Baru: Isu yang Berkembang dalam Debat Publik.....	207
B. Kelas Menengah Baru: Perspektif Klasik	212
C. Pentingnya Kelas Menengah Baru di Negara Berkembang	217
D. Menghitung Jumlah dan Struktur Kelas Menengah Baru.....	221
E. Kelas Menengah Baru: Bentuk Penilaian Kontroversial Globalisasi.....	225
F. Civil Society dan Modernisme Reflektif	234
G. Menghubungkan Kesadaran Individual dan Masyarakat.....	240
H. Cina: Meningkatkan Kapitalisme dan Kelas Menengah.....	244
I. India: Kelas Menengah Baru, Konsumsi dan	

Pembangunan Negara	251
J. Catatan Kritis	259
DAFTAR PUSTAKA	263

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berarti meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan berbagai upaya, salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan keterampilan. Mutu pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu proses pendidikan. Kesehatan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu gizi, dan meningkatkan mutu lingkungan hidup. Keterampilan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan kejuruan, meningkatkan mutu pelatihan, dan meningkatkan mutu pengalaman kerja.

Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, diperlukan berbagai upaya, salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan keguruan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan keguruan, meningkatkan mutu pelatihan, dan meningkatkan mutu pengalaman kerja.

BAB I

C. WRIGHT MILLS: KELAS MENENGAH, KEKUASAAN DAN ILMU SOSIAL

A. Pendahuluan

Charles Wright Mills merupakan salah satu dari beberapa sosiolog abad ke-20 yang menulis tentang tradisi klasik sosiologi. Mills mencoba melihat kelas menengah berdasarkan analisisnya mengenai kelompok kerah putih di Amerika dengan segala aspek dan dinamikanya. Mills mencoba melakukan analisis interpretatif dari seluruh sistem sosial budaya dan berusaha untuk mendasarkan analisisnya pada pandangan dunia secara keseluruhan dengan bukti empiris. Dari perspektif teori neo-klasik, Mills menulis tentang pertumbuhan kerah putih (*white collar*) dan bagaimana pekerjaan ini menentukan nilai-nilai dan persepsi orang-orang yang terkait dengan mereka dan bagaimana perkembangan pekerjaan ini mempengaruhi sektor-sektor lain dari masyarakat.

Mills menulis tentang pertumbuhan ukuran dan ruang lingkup birokrasi dalam masyarakat industri, bagaimana konsentrasi otoritas ini mempengaruhi orang-orang untuk tunduk dan mempengaruhi lembaga-lembaga

demokrasi tradisional. Mills menulis tentang Perang Dingin dan apa yang dipertaruhkan dalam konflik. Dia menulis secara eksplisit tentang ideologi dan kepentingan material elit dan kebangkitan militerisme serta solusi militer. Mills menulis tentang peran yang tepat dari ilmu sosial dalam mengeksplorasi dan menjelaskan isu-isu sentral untuk semua orang.

Dalam berbagai tulisannya, Mills sering berkomentar tentang pengaruh Marx dan Veblen pada sosiologinya, yang memiliki pengaruh utama terhadap pandangan dunia secara keseluruhan terhadap Max Weber. Dalam semua tulisannya Mills menafsirkan dunia melalui perspektif teoritis yang koheren. Dia menggunakan teori ini untuk menjelaskan struktur sosial dan proses, bukannya menutupi dengan data dan slogan. Seperti teori klasik, visi Mills adalah pandangan holistik seluruh sistem sosial budaya, sistem ini saling tergantung dan memiliki efek mendalam pada nilai-nilai kemanusiaan, pikiran dan perilaku. Akibatnya, tulisannya tetap cukup relevan dan berguna untuk memahami realitas sosial dalam memahami apa yang terjadi di dunia luar.

Dalam semua tulisannya, Mills menafsirkan dunia melalui perspektif teoritis yang sangat dipengaruhi oleh

Max Weber. Di berkonsentrasi terutama pada elit kekuasaan dalam bisnis dan pengaruh politik mereka. Dia meneliti sejauh mana elit bisnis diikat oleh elit militer dan pemerintah. Dia tertarik dalam hubungan ini karena makna sejarah dan politik di negara yang menganut ideologi demokrasi. Seperti disiplin teori klasik, visi Mills adalah pandangan holistik dari seluruh sistem sosial budaya, sistem ini saling tergantung dan memiliki efek mendalam pada nilai-nilai kemanusiaan, pikiran dan perilaku. Karya utama Mills berkisar pada tema-tema perluasan dan sentralisasi koordinasi birokrasi dan akibat rasionalisasi pada kehidupan sosial. Individu dalam kehidupan modern Amerika berasal dari kekuasaan mereka dengan dasar kelembagaan.

Tulisan-tulisan Mills banyak merupakan kritik sosial, yang konsisten dengan teori sistem sosial budaya dan visinya tentang peran ilmu sosial dalam sistem itu. Dalam tulisannya sebagai kritik sosial, Mills memicu kontroversi besar di antara para ilmuwan sosial pada zamannya. Sebagai mahasiswa Max Weber, tulisan utama C. Wright Mills berpusat pada tema rasionalisasi. Rasionalisasi adalah aplikasi praktis dari pengetahuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuannya adalah

efisiensi, berarti dibutuhkan total koordinasi dan kontrol atas proses sosial yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah prinsip birokrasi dan pembagian tenaga kerja.

Pada buku *White Collar*, dapat dilihat sebagai perluasan dan perkembangan proses birokratisasi Weber, yang merinci dampak pembagian peningkatan kerja pada karakter dan irama kehidupan sosial Amerika. Buku *Power Elite* mengeksplorasi otoritas birokrasi rasional dan hukum serta dampaknya pada penguasa dan pelajaran dari kekuatan ini. Konsisten dengan hukum besi oligarki, Mills merinci membesarnya dan sentralisasi birokrasi publik dan swasta, dan bagaimana kemunculan mereka mempengaruhi proses demokrasi. Penyebab PD III dapat dilihat sebagai bukti ide-ide Weber tentang irasionalitas organisasi birokrasi dan Mills menyebutnya sebagai disjungsi antara rasionalitas kelembagaan dan akal manusia. Imajinasi sosiologis merupakan penjabaran dari rasionalisasi kehidupan sosial dan keinginan para ilmuwan dan intelektual ilmu sosial untuk mengidentifikasi dan mengatur perlawanan terhadap tren itu. Tulisan Mills mencoba mengeksplorasi sifat dasar manusia dan masyarakat.

Mills mencoba mengaitkan masalah sosiologis dengan prinsip-prinsip psikologis. Sebagai seorang sosiolog, karya Mills memiliki orientasi pembaharuan, yang menunjukkan bahwa konflik kepentingan adalah salah satu bentuk fakta sosial. Dalam melihat isu yang luas Mills tidak mengabaikan individu, ia melihat hubungan antara individu dengan struktur dimana mereka hidup. Bagi Mills teori tidak boleh abstrak seperti teori induk (*grand theory*), juga tidak boleh berupa empirisme abstrak dengan data namun sedikit atau tidak ada teori yang relevan. Ia mencoba menawarkan imajinasi sosiologis untuk menangkap sejarah dan biografi serta daya gunanya dalam masyarakat. Kepercayaannya terhadap kebebasan manusia untuk mengubah sejarah menyebabkan keinginannya untuk memperbarui sosiologi agar bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai mahasiswa dari Max Weber, karya utama C. Wright Mills berpusat pada tema rasionalisasi. Rasionalisasi adalah aplikasi praktis dari pengetahuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuannya adalah efisiensi, yang berarti total koordinasi dan kontrol atas proses sosial yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah prinsip birokrasi dan pembagian

peningkatan tenaga kerja. Manusia menurut Mills tidak dapat dipahami terpisah dari struktur sosial dan historis dimana mereka terbentuk dan berinteraksi. Manusia termotivasi oleh sistem norma, nilai-nilai dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan struktural dalam masyarakat yang berkembang secara lembaga menjadi lebih besar, lebih mengikat dan saling berhubungan. Akibatnya perubahan berjalan cepat dan memiliki konsekuensi bagi mereka yang berada dalam organisasi yang berkembang dan mereka tunduk di dalamnya.

B. Asumsi

Mills memulai dengan asumsi bahwa sifat manusia terbentuk oleh interaksi sejarah dan struktur sosial. Sistem sosial budaya, khususnya negara bangsa modern, menentukan jenis laki-laki dan perempuan yang menghuni sistem. Menurut Mills, manusia tidak dapat dipahami terpisah dari struktur sosial dan historis dimana mereka terbentuk dan berinteraksi. Negara bangsa telah menjadi unit sejarah pembuatan dunia modern, unit pembuatan manusia. Melalui proses sosialisasi, aspek karakter manusia dibebaskan atau ditekan. Unit sejarah pembuatan ditunjuk oleh negara bangsa dan membentuk karakter

manusia, membuka kemungkinan dan memberikan batasan pada berbagai laki-laki dan perempuan yang membuat masyarakat.

Perjuangan antar negara atau blok negara seperti perjuangan antara fasisme dan demokrasi atau antara kapitalisme dan komunisme, lebih dari sekedar perjuangan antara sistem politik atau ekonomi yang akan menang, dan itu adalah perjuangan dimana jenis manusia apakah akan menang. Transformasi sejarah dalam masyarakat, menyatakan bahwa penurunan pertanian dan munculnya usaha kecil, juga mempengaruhi karakter dominan manusia, nilai-nilai dan ideologi mereka, keyakinan dan harapan mereka yang merupakan karakter mereka. Laki-laki dan perempuan hanya dapat dipahami dalam konteks sistem sosial budaya dalam sejarah dimana mereka hidup dan berinteraksi.

Sementara manusia termotivasi oleh sistem norma, nilai-nilai dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat mereka, perubahan struktural sering membuat motivasi berada dalam kondisi yang membingungkan. Jumlah dan berbagai perubahan struktural dalam peningkatan masyarakat secara kelembagaan menjadi lebih besar, lebih mengikat dan saling berhubungan. Sebagai lembaga

struktural yang makin membesar dan terpusat pada lingkaran orang-orang yang mengendalikan organisasi-organisasi telah menyempitkan hukum besi oligarki yang berlaku. Akibatnya, tempo perubahan telah mempercepat era modern, dan perubahan telah menjadi jauh lebih memiliki konsekuensi untuk mereka yang berada dalam kendali organisasi-organisasi yang berkembang dan tunduk kepada mereka.

C. Birokrasi

Menurut Mills, munculnya pekerjaan kerah putih berakar dalam perubahan kerja karena adanya, pertama, pertumbuhan baru di birokrasi, kedua, perubahan teknologi dan ketiga, meningkatnya kebutuhan untuk memasarkan barang dari masyarakat industri. Melalui perluasan produksi dan penggabungan, perusahaan menjadi lebih besar dan banyak mantan pengusaha menjadi karyawan biasa. Dalam pertumbuhan birokrasi yang makin besar, perlu untuk meningkatkan proporsi karyawan yang diperlukan untuk memberikan koordinasi dan pengelolaan. Manajer tingkat menengah, pada gilirannya akan melaporkan kepada pengawas, dan menjadi lingkaran dalam rantai kekuasaan dan kepatuhan, mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan, fungsi dan

keterampilan lainnya. Dengan pertumbuhan birokrasi struktur perusahaan, tugas pemerintah menarik lebih banyak orang pada pekerjaan yang mengatur dan layanan jasa.

Karakteristik utama pekerja kerah putih dalam masyarakat industri modern adalah bahwa mereka terorganisir dan tergantung pada birokrasi yang besar untuk keberadaan mereka. Berbeda dengan kaum profesional tua, pekerja kerah putih modern tidak bebas untuk melakukan penilaian profesional dan kontrol, dimana dia tunduk pada pengendalian organisasi dan melakukan manipulasi. Dengan meningkatnya kesadaran akan angka dan materi pada pertengahan abad dua puluh, sebagaimana harapan kaum Marxis bahwa masyarakat akan terbagi antara dua kelas pengusaha dan pekerja. Dengan keberadaan dan ketergantungan kaum kerah putih, mereka mengubah karakter dan nuansa kehidupan Amerika. Dengan berfokus pada kehidupan kerah putih, Mills percaya bahwa masyarakat akan belajar banyak tentang karakter Amerika.

Mills menekankan bahwa kaum kerah putih tergantung pada organisasi sebagai mata pencaharian mereka. Untuk mendapatkan dan mempertahankan

pekerjaan ini, mereka menjual tidak hanya waktu dan keterampilan, namun kepribadian mereka juga. Hal ini terjadi karena ciri-ciri paling pribadi mereka adalah demi kelancaran fungsi organisasi atau pemasaran barang dan jasa. Pekerja kerah putih harus belajar untuk menindas dengan kebencian dan agresi, mereka harus tersenyum dan menikmati perintah, agar dapat hidup setiap saat di tempat kerja sesuai dengan aturan organisasi yang ditetapkan dari atas.

Mills mengidentifikasi pembagian kerja yang semakin tinggi dari hirarki kaum kerah putih. Pekerjaan dan tugas-tugas yang digunakan akan dilakukan oleh satu individu kemudian dipecah dalam hal fungsi dan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Banyak kaum eksekutif menjadi kurang otonom, kurang diizinkan untuk berinisiatif pada pekerjaan. Karena sentralisasi, dorongan ke arah efisiensi yang semakin besar, pengambilan keputusan semakin menjadi ketetapan aturan.

Industrialisasi dengan banyak tugas eksekutif telah memungkinkan birokrasi untuk memperluas jangkauan banyak kaum profesional, yang memungkinkan mereka untuk melayani lebih banyak klien, melalui ploriferasi kantor. Semi profesi terdiri dari laki-laki dan perempuan

pada pelatihan yang sangat khusus untuk terlibat dalam penyediaan layanan terbatas dan sering dibawah pengawasan kaum profesional. Dibandingkan dengan profesional tradisional, semi profesional memiliki kewenangan yang terbatas, prestise dan pendapatan. Ini adalah tujuan semi profesi yang sering dicita-citakan anak-anak kelas pekerja.

Perkembangan lain yang memungkinkan pembagian kerja yang lebih banyak adalah mesin kantor yang baru. Mills melihat penggunaan otomatisasi kantor sebagai penggerak utama sentralisasi dalam mengejar efisiensi dan keuntungan. Dengan mesin dan organisasi sosial kantor yang sepenuhnya terintegrasi akan meningkatkan efisiensi hasil yang maksimum. Pekerjaan akan dipecah menjadi tugas fungsional sederhana. Standar ditetapkan dalam hal kecepatan dan output, mesin secara ekonomis bekerja. Jika otomatisasi tidak memungkinkan, tugas dibagi untuk tenaga terampil. Pembuatan kebijakan dan fungsi eksekutif terpusat dengan hirarki semakin naik. Hal itu meningkatkan otomatisasi dan hiper spesialisasi yang dilakukan untuk peningkatan produksi dengan menurunkan unit biaya. Semua merupakan bagian integral

dari sentralisasi dan pengembangan otoritas eksekutif, prestise dan kekayaan.

Dengan otomatisasi kantor dan pengembangan pembagian kerja, jumlah pekerja rutin meningkat, otoritas dan otonomi pekerjaan menjadi atribut mereka yang memiliki posisi teratas. Ada perbedaan yang semakin besar yang dibuat dalam hal kekuasaan, prestise dan pendapatan antara manajer dan staf. Pekerja dirutinkan dan tidak dianjurkan untuk menggunakan penilaian independen sendiri, pengambilan keputusan dijalankan sesuai aturan yang ketat. Pekerja menjadi terasing dari kesadaran penuh dirinya dalam pekerjaannya. Mereka terasing dari kapasitas intelektual akibat aturan pekerjaan yang ketat. Dengan keterlibatan dalam kegiatan rutin atas nama efisiensi, mereka menjadi terasing dari proses kerja dan terasing dari diri mereka sendiri.

Banyak tindakan di tempat kerja pada tahun 1950-an, menurut Mills yang melemahkan status pekerja kerah putih. Pekerjaan kerah putih makin kehilangan keterampilan yang terkait, kehilangan otonomi dan juga prestise. Yang menyebabkan pekerjaan kerah putih semakin terdevaluasi adalah pertumbuhan dalam jumlah pekerjaan tersebut. Pertumbuhan didorong oleh

peningkatan jumlah kelas bawah yang mendapat pendidikan tinggi. Ketika semua orang tergabung dalam pekerjaan ini menurut Mills, pekerjaan tidak lagi eksklusif dan bergengsi.

Mills menyatakan bahwa monopoli kelas menengah pada pendidikan tinggi telah berubah, namun di Amerika belum terjadi persamaan kesempatan pendidikan. Banyak orang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tinggi akibat keadaan ekonomi. Kondisi rendahnya kesempatan dalam bidang pendidikan dan keterampilan, menyebabkan banyak bidang pekerjaan kerah putih, memperbesar jumlah pekerja kerah putih, meningkatkan pendapatan buruh kasar serta meningkatkan tingkat pengangguran di kalangan pekerja kerah putih, sehingga status pekerja kerah putih makin menurun. Mills percaya bahwa penurunan ini memiliki banyak efek pada karakter pekerja kerah putih.

Kenaikan jumlah pekerja kerah putih juga memiliki efek mendalam pada sistem pendidikan dalam masyarakat yang penuh sifat birokrasi industri. Mereka dididik secara ketat dalam aturan pekerjaan kerah putih, dimana prestasi kerja dan promosi didasarkan pada pekerjaan yang rutin dan mengikuti aturan birokrasi dan perintah orang lain.

Mills mengatakan bahwa pendidikan Amerika telah bergeser ke arah berfokus pada kejuruan. Sekolah tinggi serta perguruan tinggi telah menjadi tempat pelatihan bagi birokrasi besar pemerintah dan industri.

Tujuan dari pendidikan tinggi adalah untuk mempersiapkan kaum muda untuk jenis pekerjaan yang baik di sebuah perusahaan besar atau layanan di instansi pemerintah. Hal itu melibatkan tidak hanya pelatihan kejuruan, namun juga pendidikan dengan nilai-nilai sosial yang tepat. Tujuan pendidikan abad ke-19 di sekolah Amerika adalah penciptaan warga demokrasi yang baik, lalu di pertengahan abad ke-20 menjadi penciptaan manusia yang sukses dalam masyarakat yang terspesialisasi.

D. Kekuasaan dan Otoritas

Dalam bukunya *White Collar*, Mills mencatat pertumbuhan yang luar biasa dan sentralisasi birokrasi dalam masyarakat industri modern. Salah satu konsekuensi dari pembesaran birokrasi menurut Mills adalah pertumbuhan dalam jumlah manajer dan administrator di setiap bidang kehidupan masyarakat. Pada setiap posisi dalam struktur sosial, posisi manajer atau administrator adalah menetapkan seperangkat harapan peran dan

perilaku, yang menurut Mills adalah pencipta dunia manajerial. Peran manajer menjadi begitu sentral bagi masyarakat birokrasi modern, seperti sejumlah besar orang yang memegang posisi dan lebih tunduk pada otoritas mereka, pencipta dunia manajerial memiliki konsekuensi besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Bagi Mills, ada tiga bentuk kekuasaan, pertama, adalah paksaan atau kekuatan fisik. Mills menyatakan bahwa pemaksaan tersebut jarang diperlukan di negara demokrasi modern. Kekuasaan yang mendasari dua lainnya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Tipe kedua bentuk kekuatan menurut Mills adalah otoritas. Ini adalah kekuatan yang melekat pada posisi dan dibenarkan menurut kepercayaan. Bentuk ketiga kekuasaan adalah manipulasi. Manipulasi adalah kekuatan tanpa pengetahuan akan kesadaran dan keberdayaan. Struktur birokrasi didasarkan pada otoritas, dan Mills melihat otoritas sering bergeser ke arah manipulasi.

Manipulasi tidak didasarkan pada teror atau kekuatan eksternal, meskipun kekuasaan polisi di bawah kewenangannya. Organisasi manusia yang bergantung pada penggunaan secara teratur kekuatan dan intimidasi untuk mendisiplinkan anggotanya sangat tidak efisien dan

akhirnya tidak efektif. Sebuah sistem yang didasarkan pada kekuatan harus mengeluarkan banyak energi anggotanya, menghambat inisiatif dan memberi target yang jelas untuk menggalang oposisi. Sebaliknya, kekuatan manipulasi dibuat pada metode yang lebih canggih dan kontrol diberikan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisasi benar-benar efisien, dalam masyarakat yang didominasi oleh birokrasi yang besar, didasarkan pada teknik dan manipulasi teknologi.

Mills mencirikan pencipta dunia manajerial sebagai permainan yang rumit dari manipulasi berdasar pada keterampilan birokrasi dan politik. Manajemen modern menjadi etos untuk mengatur zaman, pergeseran dari hubungan otoritas eksplisit untuk manipulasi lebih halus menjadi bentuk yang diinginkan. Manajerial tidak berhenti untuk mengkoordinasikan perilaku sederhana laki-laki dan perempuan di bawah kekuasaan, namun ia meluas ke pendapat serta emosi mereka.

Pergeseran kewenangan untuk manipulasi diaktifkan oleh teknologi baru komunikasi massa, disebabkan oleh ideologi baru manajemen dan kemajuan dalam ilmu sosial. Kemajuan teknologi ini memungkinkan terjadinya pergeseran. Penyebab pergeseran adalah

sentralisasi dan pembesaran kekuasaan politik itu sendiri. Otoritas membutuhkan legitimasi untuk mengamankan loyalitas dan ketaatan. Manipulasi muncul ketika otoritas yang terpusat tersebut tidak diijinkan secara terbuka, dan ketika mereka yang berkuasa tidak percaya mereka bisa membenarkan itu.

Tujuan manipulasi adalah untuk memiliki orang-orang yang menginternalisasi arahan manajerial tanpa mengetahui bahwa arahan ini bukan motif mereka sendiri dan tanpa menyadari bahwa mereka menjadi korban. Pergeseran dari paksaan dan wewenang untuk manipulasi, kekuasaan menjadi rahasia dan berjalan halus. Eksploitasi merupakan proses psikologis. Simbol legitimasi menurut Mills adalah yang paling penting dari studi sosiologi. Simbol-simbol berfungsi untuk membenarkan atau menentang pengaturan kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Simbol tersebut tidaklah otonom, karena banyak yang ingin percaya. Pemerintah tidak selalu bergantung pada persetujuan rakyat. Gubernur saat ini dapat memproduksi persetujuan dan tidak harus bingung atas legitimasi pemerintah.

Dalam masyarakat pra kapitalis, kekuasaan dan otoritas yang jelas dan pribadi, sering melahirkan

ketakutan dan ketaatan. Namun jika kekuasaan gagal menjaga orang pada jalur pemegang kekuasaan dan otoritas, hal itu bisa menjadi target pemberontakan. Kekuatan manipulatif sering halus, lembut dan tersamar sebagai nasihat atau terapi. Selama bertahun-tahun Amerika telah berubah dari sebuah bangsa dengan perusahaan kapitalis kecil untuk kelas karyawan. Namun ideologi yang cocok untuk bangsa kapitalis tetap dan digunakan untuk membenarkan status quo. Agama juga digunakan untuk memberkati dan membenarkan hubungan kekuasaan pemerintah. Mills menegaskan pemimpin agama lebih sering menumpulkan hati nurani dan menutupinya dengan ketenangan pikiran daripada memandu orang dalam pengembangan nurani.

Diantara alat-alat kekuasaan yang ada adalah kekuatan untuk mengelola dan memanipulasi persetujuan negara. Karena kekuatan manipulasi yang tersembunyi itu menghalangi yang tertindas untuk mengidentifikasi penindas. Kekuatan ini secara efektif menghilangkan akal dan hati nurani penguasa yang memerintah.

Organisasi birokrasi yang besar juga mempengaruhi hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Organisasi melindungi manajer dari orang-orang

kantor yang lebih rendah, membatasi kesadaran mereka untuk menyadarinya. Dalam pengaturan birokrasi pembuat keputusan tidak sama dengan korbannya. Oposisi sulit mengatur. Karena manipulasi, target pemberontakan tidak mudah dikenali, karena birokratisasi mereka tidak tersedia. Situasi seperti ini tidak hanya mempromosikan perencana untuk memanipulasi pemerintah, tetapi sistem kontrol sosial menumbuhkan tanggung jawab dari penguasa.

Pekerja kerah putih tunduk pada manipulasi dan kontrol atasan mereka, mereka kehilangan kebebasan bertindak dan berkreasi pada pekerjaan. Mereka akan belajar untuk mencari kepuasan di tempat lain. Pekerjaan dikosongkan dari makna intrinsik, dari makna dan legitimasi lainnya. Uang, dalam rangka membangun kehidupan di luar pekerjaan, menjadi satu-satunya alasan untuk pekerjaan itu sendiri. Faktor manusia, seperti kepribadian dan disposisi semakin berperan dalam efisiensi dan produktivitas birokrasi dan lembaga-lembaga pelayanan. Karena itu, manajemen hubungan manusia semakin difokuskan pada moral. Sekolah yang mengajarkan hubungan manusia memberikan ilusi otonomi pribadi dan peduli lingkungan dalam rangka menimbulkan loyalitas dan komitmen terhadap organisasi.

Manajemen menjadi manipulasi rumit bagi pekerja untuk memaksimalkan produktivitas.

E. Elit

Mills percaya bahwa birokratisasi sosial itu parsial dan menyebar tidak merata. Namun ia melihat hal itu sebagai proses yang sedang berjalan, sebuah proses yang mengancam untuk menggantikan demokrasi dengan masyarakat seperti perusahaan yang longgar dan terintegrasi. Kekuatan pembuat keputusan selalu dibatasi oleh teknologi kekerasan dan tingkat organisasi yang berlaku di masyarakat. Sejarah di Barat menunjukkan bahwa sarana kekerasan telah sangat meningkat, dan organisasi telah diperbesar, terpusat dan menjadi lebih efisien. Mereka yang berada pada hierarki birokrasi atas mendominasi masyarakat industri yang menurut Mills jauh lebih kuat daripada Caesar, Napoleon, Lenin atau bahkan Hitler sekalipun. Fasilitas kekuasaan yang sangat besar dan terpusat menyebabkan kelompok kecil sering menerima akibat dari sistem yang ada.

Menurut Mills ada elit kekuasaan di masyarakat modern, yaitu elit yang memerintah sumber daya organisasi birokrasi besar yang mendominasi masyarakat industri. Sebagai birokrasi yang terpusat dan lingkaran

orang-orang yang membesar yang menjalankan organisasi, maka organisasi makin menyempit dari konsekuensi keputusan mereka yang sangat besar. Menurut Mills, elit kekuasaan adalah orang-orang kunci dalam tiga lembaga utama masyarakat modern, yaitu pemerintah, militer dan korporasi. Lembaga-lembaga ini menjadi lebih besar, lebih kuat dan lebih terpusat dalam pengambilan keputusan mereka. Para pemimpin lembaga-lembaga ini dengan bersatu menjadikan elit semakin sangat berkuasa dan tangguh.

Para elit menempati posisi kunci kepemimpinan dalam birokrasi yang sekarang mendominasi masyarakat modern, posisi dimana cara kekuasaan yang efektif berada. Dengan demikian, kekuasaan mereka berakar pada otoritas, atribut organisasi sosial dan bukan individu. Birokrasi negara, korporasi dan militer telah membesar dan terpusat serta sarana listrik yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Hirarki kekuasaan adalah kunci untuk memahami masyarakat industri modern. Hirarki ini adalah dasar kekuasaan, kekayaan dan prestise di zaman modern.

Dengan menegaskan bahwa ada elit kekuasaan di masyarakat Amerika, Mills menyatakan bahwa ada

kesadaran diri kelas penguasa yang sinis untuk memanipulasi massa. Hal ini bukanlah konspirasi orang-orang jahat, namun struktur sosial yang telah diperbesar dan terpusat membuat proses pengambilan keputusan dan menempatkan otoritas di tangan orang-orang dari latar belakang sosial yang sama. Dalam pandangan Mills, lembaga nasional utama saat ini berkurang dalam lingkup dan kekuatan telah didorong ke sisi sejarah modern atau dibuat bawah tiga besar.

Sekolah, menurut Mills telah menjadi pelengkap dari perusahaan dan pemerintah, menyortir dan melatih orang-orang muda untuk karir perusahaan mereka, dan dengan demikian menanamkan patriotisme, menghormati otoritas dan menjunjung kemuliaan kapitalisme sepanjang masa. Keluarga menjadi agen sosialisasi utama generasi muda, tetapi mereka saat ini berbagi fungsi dengan sekolah dan media massa. Melalui proses sosialisasi, masing-masing individu datang untuk merangkul dan menginternalisasi sistem itu. Sebuah konsensus umum tentang apa yang benar dan alami, baik dan adil, dihargai dan dicerca. Kepentingan elit menjadi kepentingan bersama yang menjadi terinternalisasi dan dilegitimasi.

Mayoritas elit menurut Mills berasal dari bagian atas pendapatan dan piramida kerja. Mereka lahir dari kelas atas yang sama. Mereka menghadiri sekolah persiapan yang sama di universitas. Mereka bergabung dengan pria eksklusif di klub milik organisasi yang sama. Mereka terikat erat melalui perkawinan. Hal ini merupakan pengalaman umum dan harapan peran yang menghasilkan orang-orang dengan karakter dan nilai-nilai yang sama. Anggota kelas non atas terdiri dari manajer yang bekerja di perusahaan, ahli, dan pengacara perusahaan serta teknokrat yang kompeten, yang telah naik status melalui pangkat dan selanjutnya disponsori oleh elit dan organisasi yang mereka kontrol.

Mills berpendapat bahwa koordinasi antara pemerintah dan perusahaan tidak hanya bergantung pada kelompok swasta atau berasal dari kelas sosial yang sama. Beberapa koordinasi dilakukan dengan pertukaran personil diantara tiga hierarki elit. Kedekatan pejabat bisnis dan pemerintah dapat terlihat, dengan kemudahan dan frekuensi antar hierarki. Mills juga menegaskan bahwa banyak koordinasi berasal dari integrasi struktural yang berkembang dari lembaga yang dominan. Karena setiap domain elit menjadi lebih besar, lebih terpusat dan lebih

memiliki konsekuensi dalam kegiatannya, maka integrasi dengan bidang lain menjadi lebih jelas. Keputusan pemerintah, militer dan ekonomi menjadi semakin terkoordinasi dan saling terkait. Ada bias terstruktur tak tertulis dari pemerintah dan pemimpin perusahaan terhadap kepentingan orang lain. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk kesehatan ekonomi mereka. Ekonomi bergantung pada produksi senjata militer dan proyeksi kekuatan militer. Ada konvergensi dari meningkatnya kepentingan elit.

Dari tiga sektor kekuasaan institusional, kata Mills, sektor korporasi adalah yang paling kuat. Tetapi kekuatan elit tidak dapat dipahami sebagai cerminan dari elit ekonomi, melainkan aliansi kekuatan ekonomi, politik dan militer. Di bawah kekuasaan elit, ada dua tingkat kekuasaan lainnya dalam masyarakat Amerika. Di bagian bawah adalah massa besar orang. Sebagian terorganisir, sedikit informasi dan hampir tak berdaya, mereka dikendalikan dan dimanipulasi dari atas. Massa tergantung secara ekonomi, ekonomi dan politik mereka dieksploitasi. Karena mereka tidak terorganisir, massa jauh dari masyarakat demokrasi kalsik dimana organisasi sukarela memegang kunci kekuasaan.

Mills melihat massa elit kekuasaan kelas menengah. Terdiri dari pemimpin lokal dan kelompok kepentingan khusus, mereka tidak mewakili massa atau memiliki efek nyata pada elit. Mills melihat Kongres Amerika dan partai politik Amerika sebagai refleksi tingkat menengah kekuasaan. Meskipun Kongres dan partai politik berdebat dan memutuskan beberapa masalah kecil, kekuatan elit memastikan bahwa tidak ada tantangan serius terhadap otoritas dan kontrol toleransi dalam arena politik.

Teori pemerintahan liberal merupakan hasil keseimbangan bergantung pada asumsi yang benar-benar independen dari kekuasaan. Dan asumsi ini, terlihat pada keberadaan kelas menengah yang besar dan mandiri. Namun kelas menengah tua yang independen mengalami penurunan dengan pengusaha kecil, profesional independen yang benar dan peternakan keluarga. Selain itu, munculnya kelas baru pekerja kerah putih dan profesional tergantung pada perusahaan besar, pemerintah dan birokrasi militer. Kelas menengah baru berada di posisi ekonomi yang sama dengan pekerja upahan, tergantung pada organisasi. Secara politis, mereka berada

dalam kondisi yang lebih buruk karena mereka bahkan tidak diwakili oleh serikat pekerja.

Persaingan antara kepentingan pada kekuasaan tingkat menengah lebih daripada persaingan biasa, namun lebih jauh yaitu mengenai benturan dan perdebatan kebijakan yang mendasar. Mills menegaskan bahwa bentrokan antara kepentingan dapat diredam untuk kepentingan yang semakin terintegrasi ke aparat negara. Administrasi birokrasi menggantikan politik yang merupakan manuver dari kelompok untuk mengatasi konflik terbuka partai.

Proses pengintegrasian kekuatan politik yang sebelumnya otonom, seperti tenaga kerja, organisasi profesi dan petani ke dalam negara modern adalah terang di dunia totalitarianisme modern. Dalam demokrasi formal prosesnya kurang lebih maju dan eksplisit, namun masih berjalan dengan baik. Kelompok kepentingan semakin bermanuver diantara partai-partai politik dan organ negara yang ingin menjadi bagian dari negara. Keinginan utama mereka adalah untuk mempertahankan organisasi mereka untuk mengamankan keuntungan dan memaksimalkan ekonomi anggota mereka. Kekuasaan tingkat menengah tidak sedikit yang mempertanyakan aturan elit, juga tidak

mencari manfaat pada laki-laki dan perempuan di luar organisasi mereka.

Dalam masyarakat dimana kekuasaan menyebar dan terdesentralisasi, sejarah adalah hasil dari keputusan tak terhitung oleh banyak orang. Semua berkontribusi untuk perubahan dalam struktur sosial. Dalam masyarakat seperti itu, tidak ada satu kelompok individu atau kecil memiliki banyak kontrol, sejarah ada di belakang laki-laki. Namun dalam masyarakat dimana alat-alat kekuasaan telah membesar dan terpusat, orang-orang yang mengendalikan birokrasi dominan memodifikasi kondisi struktural hidup negara.

Posisi elit memungkinkan mereka untuk mengatasi lingkungan laki-laki dan perempuan. Elit memiliki akses ke pusat kekuasaan yang membuat keputusan mereka dan kegagalan mereka dalam bertindak menjadi suatu konsekuensi. Dalam masyarakat dimana lembaga-lembaga struktural menjadi membesar, terpusat dan mencakup semua, mengontrol lembaga-lembaga tersebut menjadi isu sentral. Salah satu konsekuensi penting menurut Mills adalah bahwa pemimpin negara bangsa modern dapat mengerahkan lebih banyak kontrol dan koordinasi atas tindakan negara tersebut.

Sampai saat ini, Mills menyatakan bahwa pemimpin bertindak dengan tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan bencana. Perubahan struktur besar telah memperbesar sarana dan luasnya kekuasaan dan terkonsentrasi di beberapa pihak sehingga membuatnya penting untuk menjadikan bertanggung jawab atas peristiwa itu. Mills peduli dengan munculnya militerisme diantara elit dibandingkan dengan hipotesis bahwa banyak elit adalah orang-orang militer. Menurut Mills, munculnya negara militer melayani kepentingan elit masyarakat industri. Kekuatan militer berfungsi untuk menutupi kurangnya visi dan kepemimpinan yang inovatif. Persiapan elit korporasi untuk perang dan proyeksi kekuatan militer, penelitian dan pengembangan serta pemberian jaminan keuntungan yang stabil melalui subsidi perusahaan. Militerisme ditanamkan pada masyarakat melalui sekolah dan ruang nasionalisme, melalui manipulasi dan pengendalian berita, melalui regenerasi pemimpin dan ideologi resmi.

Bukan hanya elit kekuasaan yang memungkinkan militerisme diproduksi untuk mendominasi. Hal ini diperkuat oleh sikap apatis dan lemahnya moral massa oleh aktivitas politik intelektual di negara komunis dan

kapitalis. Pemimpin agama dan intelektual mengampanyekan kebingungan elit. Mereka menolak untuk mempertanyakan kebijakan elit dan menolak untuk menawarkan alternatif. Mereka telah menurunkan jabatan mereka dan memungkinkan elit untuk memerintah tanpa hambatan.

F. Masyarakat Massa

Salah satu pemersatu besar kehidupan dan karakter di Amerika adalah industri komunikasi massa. Komunikasi massa menurut Mills berfungsi untuk membentuk kesadaran modern dan pemikiran politik. Mills menunjukkan bahwa tidak ada media massa yang berbicara tentang Marx, sehingga pengaruhnya tidak terdengar. Tetapi dalam dunia modern, bentuk dan isi kesadaran politik dan sosial tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada citra dunia yang disajikan oleh media.

Seseorang datang untuk percaya tentang berbagai macam isu merupakan pengalaman kontak tangan pertama dengan orang lain dan paparan media massa. Mills menegaskan bahwa media massa merupakan salah satu pihak yang menentukan. Media massa menjadi *common denominator* kesadaran Amerika. Mereka memperluas jangkauan di semua lingkungan sosial untuk membentuk

kesadaran anak-anak. Isi dan gambar media telah menjadi bagian dari citra diri dan selama beberapa generasi berikutnya akan memodifikasi karakter manusia.

Menurut Mills tidak hanya berita dan konten politik yang keluar dari media massa. Ini merupakan sebagian kecil dari ongkos yang disajikan kepada orang Amerika setiap hari. Hiburan dan olahraga dalam skala modern berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari politik dan isu-isu sosial. Pemasaran massal produk konsumen, sponsor wisata, merupakan fenomena baru yang memiliki dampak mendalam pada kesadaran laki-laki dan perempuan.

Peran penjual bergeser dalam masyarakat yang dibanjiri barang konsumsi. Produksi massal dengan kebutuhan yang meningkat untuk mendistribusikan barang ke pasar nasional. Sebelum adanya produksi massal, penjual memberikan pemahaman tentang produk dan memberikan informasi kepada calon pembeli. Saat ini, penjual berfokus untuk memprospek dengan pendekatan psikologi yaitu teknik untuk membujuk orang agar membeli. Pendekatan persuasi menurut Mills telah menjadi gaya hidup bagi semua jenis hubungan, penjual memasarkan produk mereka, pengusaha menjual ide-ide

mereka, manajer kampanye menjual kandidat mereka, karyawan memasarkan kemampuan diri mereka.

Budaya jual telah mendarah daging dalam jiwa masyarakat Amerika, dan menjadikan bazaar besar dalam sejarah dunia. Mills menegaskan melihat bazar besar ini sama penting dalam memahami kehidupan modern sebagai keluarga atau pabrik. Seperti keluarga, harus memenuhi kebutuhan, makan, pakaian, hiburan dan memasok semua kebutuhan dan menciptakan tambahan kebutuhan. Seperti pabrik, ia memproduksi mimpi, yang didedikasikan untuk masyarakat dengan komoditas hidup mereka. Sementara itu kesuksesan selalu menjadi kekuatan pendorong masyarakat Amerika, kesuksesan dengan konsumsi dimaknai sebagai cara hidup.

G. Rasionalisasi

Rasionalisasi dunia menurut Mills adalah tren masa kini. Akar dari pembesaran dan sentralisasi birokrasi struktural di dunia modern adalah rasionalisasi. Kunci kekuasaan di dunia modern adalah organisasi sosial dan perkembangan teknologi. Alat-alat produksi dipakai untuk memaksimalkan efisiensi dan menyebabkan birokrasi semakin tergantung, pekerjaan semakin mengasingkan budaya menjadi eksploitatif. Yang ada di balik

pertumbuhan kekuatan, ruang lingkup dan skala birokrasi adalah teknologi baru dari koordinasi dan kontrol teknologi dalam masa pertumbuhan.

Seperti yang telah diterapkan dalam masyarakat industri birokrasi, rasionalisasi telah menyebabkan pekerjaan dikurangi menjadi standar gerakan dan pengambilan keputusan sesuai aturan dan peraturan tertulis. Rasionalisasi telah menyebabkan kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam produksi dan distribusi barang jasa, juga dipersonalisasi dan hilangnya kontrol pribadi atas pekerjaan rutin yang menindas.

Proses rasionalisasi menurut Mills tidak terbatas hanya di kantor, ia menembus seluruh bidang kehidupan sosial. Pelatihan rasionalisasi dimulai dari sekolah, dimana telah dilakukan pelatihan kerja, sosialisasi ke pihak otoritas dan birokrasi, spesialisasi dan tujuan berorientasi pemecahan masalah. Keluarga, pabrik, rekreasi, pekerjaan, lingkungan, negara semuanya menjadi bagian totalitas fungsional rasional. Mills melihat petani Amerika terpolarisasi menjadi dua kelompok, pertama ditandai petani subsisten kecil dan upah kerja. Kedua, petani komersial besar dan perusahaan pedesaan. Namun pertanian menuju kebangkrutan akibat menjamurnya

mesin. Dunia korporasi petani makin meningkat dan makin saling bergantung dengan dunia keuangan, bisnis dan pemerintah. Birokrasi ini membawa rasionalisasi pertanian makin maju.

Mills mengakui bahwa rasionalisasi membuat kebangkrutan cara hidup pedesaan. Pertanian menjadi lebih seperti industri lainnya. Peternakan keluarga lebih merupakan istilah masa lalu dan digunakan untuk kepentingan bisnis besar. Perusahaan dirasionalisasi dan semakin birokratis. Sejak awal ilmu pengetahuan di Amerika diidentifikasi erat dengan produk teknologi dan teknik. Belakangan organisasi sosial diambil dari jalur perakitan. Amerika unggul dalam penerapan proyek militer dan komersial, dan dalam penemuan produksi massal dalam pemasaran. Hal ini kontras dengan tradisi akademik klasik melalui penelitian murni, yang tidak terikat dengan kebutuhan praktis atau kepentingan komersial. Secara singkat menurut Mills, Amerika telah membangun mesin ilmu, melalui organisasi perusahaan dan rasionalisasi proses pengembangan teknologi sampai batas tertentu tanpa diketahui penemuan ilmiah itu sendiri.

H. Masalah-masalah Sosial

Sosiologi Mills berfokus pada masalah substantif masyarakat industri modern. Ia mengidentifikasi lima masalah menyeluruh, yaitu: keterasingan, mati surinya moral, ancaman terhadap demokrasi, ancaman terhadap kebebasan manusia, serta konflik antara rasionalisasi birokrasi dan akal manusia. Dan semua masalah ini menurut Mills disebabkan oleh proses birokratisasi.

Sebagaimana Mills, Marx memandang masalah keterasingan sebagai ciri masyarakat modern dan berakar dalam karakter kerja. Pergeseran dari dunia pertanian dan pedesaan ke masyarakat perkotaan dimana banyak karyawan tergantung pada birokrasi besar telah menyebabkan keterasingan hingga ke luar pabrik. Karakteristik pekerjaan kulit putih yang hanya mengasingkan, merupakan contoh karya Marx. Sebagian besar pekerjaan kerah putih tidak memerlukan kebebasan atau pengambilan keputusan pada pekerjaan, beberapa pekerjaan pinjam meminjam merupakan keahlian.

Pekerjaan kerah putih mungkin dianggap lebih menyebabkan keterasingan dibanding pekerjaan tradisional kerah biru, pekerjaan kerah putih sering melibatkan penaklukan seluruh kepribadian ke dalam proses kerja,

bukan hanya tindakan fisik pekerja. Pasar kepribadian merupakan bagian dari banyak pekerjaan kerah putih. Menurut Mills, kepribadian sering lebih menentukan untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan dibanding keterampilan, dan hal itu mendasari ketidakpercayaan dan keterasingan diri, dan semua meresap menjadi karakteristik orang modern.

Tidak seperti Marx, Mills tidak menempatkan keterasingan akibat kapitalisme. Menurutnya, keterasingan selain karena kepemilikan alat-alat produksi juga karena pembagian kerja modern. Akibat dari keterasingan menurut Mills akan bervariasi dengan tingkat otonomi, kebebasan dan tingkat keterampilan yang dibawa pekerja ke pekerjaan. Namun demikian, hampir semua pekerjaan dalam masyarakat modern akan ditandai dengan tingkat keterasingan karena karyawan tunduk pada manajemen orang lain.

Karena pembagian kerja secara rinci, pekerja tidak melalui proses kerja untuk produk akhir. Pekerja seringkali tidak menyadari seluruh proses. Mills berpendapat ini memotong kaitan antara proses dan produk. Pekerjaan kerah putih juga mengasingkan banyak pekerjaan profesional, pekerja sering menolak kesempatan untuk

menggunakan pikirannya untuk pengambilan keputusan yang terpusat yang menjadi ciri khas perusahaan birokrasi modern. Akar penyebab keterasingan, menurut Mills jauh melampaui kepemilikan dan pasar, dan itu adalah bentuk organisasi itu sendiri. Sebuah organisasi yang menghilangkan pekerja dari pemahaman tentang karyanya, menghapus dari kontrol atas pekerjaannya, dan menentukan kapan dan seberapa cepat pekerja bekerja.

Namun penghancuran kebebasan dan otonomi, pengerjaan dan kontrol pada pekerjaan bukanlah dianggap sebagai krisis manusia modern. Mereka mungkin menganggap krisis jika mengalami secara langsung pergeseran itu atau mungkin tidak langsung mengalaminya melalui orang tua mereka. Namun hal itu belum terjadi. Kerugian terjadi secara bertahap selama beberapa generasi terakhir, hanya dalam imajinasi ilmuwan sosial dapat diukur pentingnya. Namun, meskipun pekerja Amerika tidak merasa rugi, hubungan dalam pekerjaan mereka terputus. Pekerja itu harus mencari makna hidup mereka di tempat lain.

Salah satu masalah mendasar dari masyarakat massa adalah bahwa banyak orang kehilangan kepercayaan pada pemimpin dan karena itu sangat apatis. Orang sedikit

memberi perhatian pada politik. Kondisi ini menurut Mills adalah akar banyak masalah kontemporer saat ini. Misalnya perang dan perdamaian antar bangsa tidak dapat dipahami melalui sebab naif komunikasi manusia atau agresi bawaan manusia. Perang di zaman modern menurut Mills berakar dari sikap apatis orang-orang yang dipilih, dibentuk dan dihormati masyarakat massa. Sikap apatis ini menyebabkan insensibilitas moral. Orang-orang seperti membisu melihat kekejaman yang dilakukan pemimpin mereka. Mereka tidak marah ketika dihadapkan dengan kekejaman moral, mereka tidak memiliki kapasitas untuk bereaksi terhadap karakter moral, keputusan dan tindakan pemimpin mereka.

Komunikasi massa memberikan kontribusi untuk kondisi ini, Mills berpendapat melalui gambaran halus yang ditujukan pada individu dimana dia menjadi penonton dan tidak dapat berbuat apa-apa. Gambaran kejangkelan ada di tempat umum. Kekejaman menjadi umum dan dibuang dari makna manusia. Ada sedikit rasa marah atau terkejut. Mills mengaitkan mati surinya moral pada proses rasionalisasi. Tindakan kekejaman dan kebiadaban memisahkan dari kesadaran manusia, baik pelaku maupun pengamat. Tindakan ini merupakan bagian

dari peran dalam organisasi formal. Hal ini dipandu oleh kesadaran individu, bukan dengan perintah lain. Banyak tindakan manusia yang tidak manusiawi, bukan karena skala kekejaman mereka, namun karena mereka impersonal, efisien dilakukan tanpa emosi yang nyata. Mills tidak lagi mengakui kendala moral yang dalam, satu-satunya kendala untuk tindakan berasal dari luar, takut akan pembalasan dari entitas yang lebih kuat atau kepentingan politik sederhana.

Mills percaya bahwa keterasingan yang luas, ketidakpedulian politik dan konsentrasi ekonomi dan kekuasaan politik adalah ancaman serius bagi demokrasi. Mills mendefinisikan demokrasi sebagai hanya sebuah sistem dimana mereka terkena dampak kepemilikan suara yang efektif dalam berbagai keputusan. Menurut Mills ada enam kondisi penting untuk menjaga demokrasi modern, yaitu: informasi publik yang baik tentang masalah dan secara aktif terlibat dalam perdebatan masalah itu; pihak yang bertanggung jawab secara nasional yang memperdebatkan masalah ini dengan jelas dan terbuka; independensi pegawai negeri terampil dari kepentingan pribadi atau perusahaan; intelektual baik di dalam maupun luar kampus yang melaksanakan pekerjaan yang benar-

benar relevan dengan kebijakan publik; media massa yang menginformasikan perdebatan dan mampu menerjemahkan isu publik secara lebih luas; serta asosiasi nirlaba yang mampu menghubungkan individu, keluarga, masyarakat dan publik dengan organisasi yang lebih formal seperti perusahaan, militer dan badan-badan pemerintah.

Mills menganggap diskusi dan perdebatan merupakan landasan demokrasi. Asosiasi yang membebaskan kendaraan politik dan ekonomi diperlukan untuk latihan dan pembentukan alasan. Asosiasi ini diperlukan untuk mempersiapkan orang bagi kepemimpinan di semua tingkatan dalam masyarakat demokratis. Ada sejumlah perbedaan antara konsepsi Mills tentang negara demokrasi modern yang ideal dengan apa yang terjadi di Amerika kontemporer. Mills menunjukkan kelompok-kelompok kecil dan asosiasi yang menurun dan mereka melakukan isu-isu penting hanya merupakan suara samar dalam pengambilan keputusan resmi.

Faktor struktural yang mencegah pemenuhan enam kondisi untuk demokrasi adalah adanya elit kekuasaan di masyarakat Amerika. Perusahaan swasta bertindak dalam kepentingan mereka sendiri, kekuasaan militerisme dan penolakan pemerintah untuk mengatasi faktor kunci dalam

penurunan demokrasi di Amerika. Pemegang kebijakan di Amerika terkonsentrasi di beberapa organisasi birokrasi besar. Garis kontrol yang kuat di puncak organisasi dan kontrol demokratis, bahkan di instansi pemerintah sendiri menjadi kabur dan lemah.

Mills melihat Amerika sebagai masyarakat dimana manusia yang diprivatisasi didominasi oleh organisasi birokrasi besar. Organisasi ini tidak tegas disahkan, mereka tidak menimbulkan loyalitas atau antusiasme yang luas. Namun Mills tidak melihat masyarakat dalam kondisi bahaya. Masyarakat yang terselenggara bersama oleh konvensi dan jaringan kekuasaan birokrasi, meskipun disahkan secara enteng, dapat berjalan bertahun-tahun. Hal ini terutama berlaku jika masyarakat dapat memberikan barang-barang material tingkat tinggi dan kenyamanan.

Mills menulis ancaman untuk nilai dasar manusia adalah kebebasan dan berbagai alasan. Mills melihat tren yang membahayakan dari nilai-nilai ini sebagai tren utama masyarakat kontemporer. Kecenderungan ini adalah sentralisasi dan pembesaran organisasi birokrasi yang luas, dan penempatan kekuatan yang luar biasa dan otoritas di tangan segelintir elit. Keamanan ekonomi yang digunakan harus didasarkan pada kepemilikan properti. Bagi banyak

orang, konsentrasi ekonomi telah bergeser untuk keamanan ekonomi terhadap pekerjaan. Karena karyawan yang tergantung pada birokrasi untuk keamanan ekonomi mereka, dimana ada sedikit kontrol, dapat menjadi benar-benar tidak aman. Karena konsentrasi kekayaan dan kekuasaan, kebebasan ekonomi untuk melakukan tindakan ekonomi yang diinginkan, kini menempatkan keamanan ekonomi ribuan karyawan tergantung pada resiko, dengan demikian menempatkan kebebasan mereka beresiko juga.

Bagi individu, organisasi rasional adalah sebuah organisasi yang menimbulkan keterasingan, merusak kebebasan dan otonomi. Menyebabkan individu menghilangkan kesadaran perilaku, pikiran dan emosi. Individu dalam tindakannya dipandu bukan dengan kesadaran, tetapi dengan peran dan aturan yang ditentukan organisasi itu sendiri. Dalam pengembangan kesempatan banyak laki-laki yang hancur, seperti meningkatkan rasionalitas dan fokus utama, kontrol dipindahkan dari individu ke organisasi berskala besar. Ada rasionalitas tanpa alasan, yang tidak sepadan dengan kebebasan namun merusak.

Mills menunjukkan pada abad ke-18 dan ke-19, muncul masyarakat stabil yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip rasional dan demokratis di garis depan kebebasan manusia. Irasionalitas monarki tradisional atau aturan yang kejam dan kuat dilihat sebagai antitesis terhadap kebebasan dan kebahagiaan manusia. Rasionalitas makin mengambil bentuk baru, memberikan kedudukan tidak pada individu, namun pada lembaga-lembaga sosial dengan perencanaan birokrasi dan pandangan ke depan untuk merebut kebebasan dan rasionalitas individu kecil di dalamnya. Hal ini merupakan cara menghitung hirarki yang terlihat secara samar pada pekerjaan, yang membatasi otonomi dan inisiatif individu.

Sebagaimana Weber, Mills mengingatkan bahwa masyarakat yang didominasi oleh organisasi sosial yang rasional tidak didasarkan pada alasan, kecerdasan dan niat baik terhadap semua. Weber menyatakan sebagai perbedaan antara rasionalitas yang substantif (holistik) dan formal (birokrasi), yang mengklaim bahwa keduanya sering bertentangan. Dengan nada yang sama Mills menegaskan bahwa masyarakat yang didominasi oleh rasionalitas birokrasi tidak berdasarkan pada penjumlahan alasan kapasitas individu konstituen. Ia lebih lanjut menyatakan

bahwa rasionalisasi birokrasi sering berfungsi untuk mencegah individu dalam memperoleh kapasitas. Untuk itu melalui organisasi rasional modern yang tiran serta manajer birokrasi biasa menggunakan wewenang dan manipulasi mereka untuk menyangkal kesempatan pelajaran mereka untuk melakukan penilaian mereka sendiri. Mills berpendapat bahwa sebagai produk sosial, pikiran manusia memburuk dan dalam kualitas dan budaya.

I. Ilmu Sosial

Salah satu syarat utama untuk demokrasi modern menurut Mills adalah komunitas intelektual yang hidup yang terlibat erat dalam memberikan pengetahuan dan kebijakan untuk membantu memberi panduan dari pemerintah. Komunitas intelektual menurut Mills mengacu pada ilmuwan, menteri, ulama, seniman dan mahasiswa yang merupakan bagian tradisi besar Barat yang dimulai dari Yunani. Komunitas intelektual ini berbicara melalui seni, diskusi dan tulisan untuk membuat dan menyebarkan ide-ide dan pandangan untuk perhatian publik pada isu-isu yang relevan atau tidak, membenarkan atau mengkritik kebijakan mereka yang berwenang.

Penyebaran ide-ide yang relevan secara terbuka oleh masyarakat intelektual sangat penting mengingat pengalaman pribadi memungkinkan setiap individu untuk tahu hanya sebagian kecil dunia sosial dan beberapa aturan mempengaruhi mereka. Masalah yang signifikan dari masyarakat kontemporer dapat ditangani oleh kaum profesional dan ahli. Tugas utama intelektual adalah menghadapi kondisi ini dan menjadikan masalah sosial dipahami publik melalui diskusi dan debat. Demokrasi mensyaratkan bahwa publik dipengaruhi oleh keputusan yang memiliki pengetahuan tentang isu-isu. Hanya melalui komunitas intelektual yang memenuhi tugasnya, masyarakat dapat memahami isu-isu sosial, dan demokrasi bisa lebih palsu.

Jika intelektual gagal menghadapi masalah ini, masyarakat berada dalam standar warisan intelektual yang telah turun. Mills menyimpulkan bahwa banyak komunitas intelektual yang telah melakukan wanprestasi. Jika mereka gagal di publik, mereka berkontribusi pada penurunan kebebasan manusia, martabat dan demokrasi. Mills menyatakan bahwa anggota komunitas intelektual menyesatkan elit untuk bertindak demi kepentingan pribadi yang menyesatkan. Gambaran tersebut

memungkinkan masyarakat untuk memaklumi tindakan elit yang tidak bertanggung jawab dan serakah tersebut tanpa rasa marah. Hal itu memungkinkan elit melarikan diri dari akuntabilitas publik yang merupakan pengalaman Amerika abad 19 dengan alasan nasib manusia.

Pada awal kemunculan kerah putih, Mills mengutuk spesialisasi yang berlebihan atas jabatan tersebut. Hiper spesialisasi mengarah pada ketidakmampuan berpikir di luar satu wilayah khusus. Sistem prestise akademi berkontribusi untuk tren ini. Buku yang menjangkau lebih dari satu bidang disukai, sebaliknya kehormatan akademis dan prestise diberikan untuk buku-buku tebal dan besar untuk pelajaran tertentu. Penyempitan pengetahuan ditindaklanjuti dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan peniruan mereka atas metode ilmu-ilmu alam yang cocok untuk mempelajari penelitian mikroskopis daripada mengembangkan untuk masyarakat dan manusia secara keseluruhan.

Seperti lembaga lain di masyarakat, universitas menjadi lebih birokratis. Organisasi ini memiliki efek yang sama dengan jabatan profesional dan pengusaha lainnya. Semua birokrat melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai aturan dan peraturan lembaga. Sifat birokrasi perguruan

tinggi dan universitas dengan hirarki otoritas, lingkungan kelas menengah, pemisahan kehidupan intelektual dan sosial, spesialisasi akademik yang berlebih, semua menurut Mills berkontribusi pada kesesuaian pikiran.

Tren yang sama yang membatasi kemerdekaan intelektual dalam masyarakat yang lebih besar hadir di kampus. Profesor adalah karyawan yang tunduk pada aturan dari atas dalam hal kerja. Mills yang tulisannya dibuat awal tahun 50-an, mencatat upaya untuk menahan kebebasan akademik melalui serangan politik dan bisnis profesor. Namun ia melihat serangan itu hanya mempengaruhi beberapa orang saja. Tujuan mereka adalah menyamakan irama untuk mengontrol secara halus jabatan profesor tersebut. Meskipun ada juga intimidasi langsung pada beberapa kampus universitas yang dilakukan melalui kepemilikan, promosi, prosedur jasa, juga tekanan kontrol yang halus bagi kolega yang memiliki potensi memberontak. Kontrol halus pada kehidupan akademik juga ditindaklanjuti oleh upaya politik dan bisnis untuk standarisasi kurikulum, dengan kontrol dana penelitian dari instansi pemerintah dan yayasan yang meolak kelimuan di luar arus utama.

Tugas utama dan selanjutnya ilmu-ilmu sosial menurut Mills adalah untuk mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami manusia dan masyarakat. Kerangka ini cukup sederhana untuk non spesialis untuk memahami namun cukup komprehensif untuk mencakup berbagai perilaku manusia. Dalam menyelesaikan tugas ini Mills memberikan pandangan multidisipliner. Sementara masing-masing ilmu-ilmu sosial cenderung untuk mngkhususkan diri dalam rangka kelombagaan tertentu, ilmu sosial akan menghubungkan temuannya kepada domain institusi lainnya. Setiap ilmu sosial menurut Mills berakar kuat dalam sejarah.

Masalah banyak ilmu sosial saat ini, menurut Mills adalah baik tanpa teori dan sejarah. Menjadi tanpa teori, ilmuwan sosial sering menghadapi hubungan antara berbagai teknologi, struktur, dan ide-ide. Menjadi ahistoris, banyak ilmuwan sosial tidak memiliki kemampuan untuk mengenali tren baru serta untuk membedakan antara tren signifikansi besar dan kecil. Dalam analisis sosial klasik, Mills menegaskan seperangkat tradisi dapat digunakan dengan wawasan yang berakar kuat dalam sejarah dan teori.

Ilmu sosial klasik berfokus pada masalah-masalah sosial substantif. Hal ini tidak dibangun dari pengamatan empiris dan juga tidak dimulai dengan teori grand sistem sosial budaya dan menyimpulkan ke perilaku manusia. Sebaliknya, ilmu sosial klasik menempatkan penelitian empiris dan bangunan teori dalam interaksi terus menerus. Praktisi dari upaya untuk mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami tatanan sosial, perubahan sosial dan masalah sosial. Mereka terus menguji dan merumuskan kerangka kerja dalam studi empiris.

Namun ada kecenderungan dalam ilmu-ilmu sosial serta tren di masyarakat yang lebih luas yang membahayakan tradisi klasik dan berdiri di jalan pemahaman sosial yang lebih besar. Dalam ilmu-ilmu sosial, Mills mempertahankan tiga tren yaitu empirisme abstrak, teori besar dan penggunaan ilmu sosial untuk meningkatkan efisiensi birokrasi yang telah muncul yang berfungsi untuk mengaburkan dibanding meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perilaku sosial manusia.

Dari tiga tren, identifikasi Mills dari grand theory dan kritiknya sekarang muncul. Masalah dengan grand theory adalah masalah dengan karya Talcott Parsons. Mills merujuk Parsons untuk mengelaborasi dan mengklarifikasi

konsep, dan ketidakmampuan diduga untuk menerapkan teori umum untuk lebih memahami realitas yang lebih konkret. Teori parsons terbukti menjadi tren jangka pendek dalam ilmu sosial. Grand teori seperti yang didefinisikan oleh Mills bukanlah praktek luas dalam ilmu-ilmu sosial saat ini. Namun, dua tren lain dalam ilmu sosial diidentifikasi oleh Mills, empirisme abstrak dan penggunaan ilmu sosial untuk mengatasi masalah birokrasi koordinasi dan kontrol, saat ini mendominasi.

Menurut Mills, ada kepercayaan tertentu yang berkembang di sekitar penggunaan metode penelitian yang canggung yaitu empirisme abstrak Mills. Mills percaya bahwa hal ini salah. Tujuan dari penelitian empiris adalah mendisiplinkan gagasan. Banyak penelitian sosial yang tipis dan tidak menarik. Hal ini akan melatih siswa dan memberi manfaat serta memberikan lapangan kerja untuk para ilmuwan sosial imajinatif.

Semakin lama ilmu sosial sering digunakan oleh birokrasi besar yang mendominasi kehidupan modern. Ilmuwan sosial sering digunakan oleh militer, lembaga pelayanan sosial, sistem peradilan pidana dan perusahaan. Para ahli hubungan manusiabekerja untuk meningkatkan moral karyawan yang bekerja salam sistem yang ada

hubungannya dengan otoritas. Mereka terlibat dalam manipulasi, mendefinisikan dan mencari cara untuk meningkatkan semangat bahwa dalam hubungan ada kekuasaan dan otoritas. Ilmuwan sosial yang bekerja untuk birokrasi lebih peduli dengan masalah administrasi daripada masalah manusia, lebih peduli dengan efisiensi daripada dengan manusia. Ilmu sosial ini apakah untuk kiliter, lembaga advertising atau biro pemerintah adalah ilmu sosial untuk masyarakat daerah non demokratis. Tujuan dari penelitian tersebut hanya untuk membuat birokrasi lebih efisien dan karena itu tidak hanya mengalihkan perhatian dari tugas penting, tetapi mendukung status quo.

Nilai, menurut Mills, mempengaruhi penelitian sosial. Nilai berperan dalam memilih masalah yang dipelajari serta banyak konsepsi kunci. Namun ilmu sosial harus sangat jelas dan eksplisit tentang nilai-nilai dan kemudian harus berusaha yang terbaik yang dia bisa untuk menghindari bias dalam pekerjaannya. Mills memegang pandangan itu dalam mengajar. Profesor menurut Mills harus berjuang untuk menjadi sangat eksplisit dalam hal membuat asumsi dan penilaian. Ia harus jelas

menunjukkan kepada muridnya berbagai alternatif moral dan kemudian membuat pilihan sendiri.

1. Imajinasi Sosiologi

Dalam *White Collar*, Mills membuat langkah awal mendefinisikan imajinasi sosiologis dengan menyebutnya pelajaran pertama sosiologi modern. Mills menegaskan manusia harus mencari pengalaman dalam konteks waktu sejarah dan dalam strata sosial. Mills menulis, apakah orang percaya atau tidak, manusia digerakkan oleh kekuatan sejarah dan ekonomi. Hal itu adalah sosiologi. Laki-laki dan perempuan biasa sering tidak menyadari kekuatan dalam kehidupan mereka, atau mungkin mereka tidak menyadari dampaknya.

Imajinasi sosiologis menurut Mills hanyalah sebuah kualitas pikiran yang memungkinkan seseorang untuk memahami sejarah dan biografi hubungan keduanya dalam masyarakat. Imajinasi sosiologis memungkinkan seseorang untuk beralih dari satu perspektif yang lain, sehingga membentuk pandangan yang komprehensif dari sistem sosial budaya. Kualitas pikiran adalah karakteristik yang terbaik dari analisis sosial klasik, karena itu masih ditemukan hal yang sangat berguna dalam memahami

realitas sosial. Kualitas pikiran adalah karakteristik terbaik dalam ilmu sosial.

Ilmuwan sosial yang menggunakan imajinasi sosiologis dalam pekerjaan mereka konsisten untuk menangani masalah-masalah struktural dan sejarah, dan bagaimana masalah ini mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku manusia. Secara struktural, analisis imajinatif menilai berbagai komponen sistem sosial budaya dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Analisis tersebut juga membandingkan secara kontras komponen ini untuk komponen sistem sosial budaya lainnya. Secara historis, peneliti imajinatif melihat tren sejarah utama yang mempengaruhi masyarakat melalui waktu, ia meneliti mekanisme tren sosial dan perubahan dan membandingkan masyarakat dalam sejarah yang berbeda. Yang terpenting, imajinasi ilmuwan sosial mempertanyakan bagaimana struktur dan sejarah membentuk anggota sistem sosial budaya.

Untuk benar-benar memenuhi janji, ilmu sosial mengharuskan kita untuk fokus pada masalah substantif dan menghubungkan masalah ini ke fitur struktural dan sejarah dari sistem sosial budaya. Fitur-fitur ini memiliki makna bagi individu dan mereka sangat mempengaruhi

nilai-nilai, karakter dan perilaku laki-laki dan perempuan dalam membuat sistem sosial budaya.

Ilmu-ilmu sosial sering digunakan secara ideologis. Mereka digunakan dalam legitimasi kekuasaan, mereka digunakan dalam mengkritik atau membongkar dan digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang bermakna. Janji ilmu-ilmu sosial adalah untuk membawa alasan untuk bertanggung jawab pada urusan manusia. Untuk memenuhi peran ini mengharuskan kita menghindari alasan dan wacana birokratisasi. Mills mengatakan bahwa harus mengatas sendiri masalah, merumuskan masalah ilmu sosial, berdiri dalam kesempatan terbaik, satu-satunya kesempatan untuk membuat alasan demokratis yang relevan untuk urusan manusia dan mewujudkan nilai-nilai klasik yang mendasari janji studi.

K. Kerah Putih: Kelas Menengah Amerika

C. Wright Mills dengan bukunya *The Power Elite* menawarkan analisis strata teratas masyarakat dan institusinya (bisnis, pemerintah dan militer). Dalam bukunya tersebut, ia juga berfokus lebih luas pada kerah putih (*white collar*) yaitu pekerja yang menerima gaji di bawah strata tersebut. Mills mencoba menempatkan kerah

putih dalam konteks sosial yang lebih besar dibanding pemahaman tradisional, dan khusus sebagai bagian dari “kelas menengah”, ia menjelaskan perbedaan antara kelas menengah “tua” dan “baru”. Kelas menengah tua ditandai dengan kemandirian ekonomi, yang didasarkan pada kepemilikan alat-alat produksi dimana ia bekerja, petani kecil dengan lahan sendiri, pedagang yang menjalankan toko sendiri dan sejenisnya. Kelas menengah baru terdiri dari karyawan yang bekerja dengan alat-alat produksi yang dimiliki orang lain, dalam konteks properti yang terpusat dan jalannya bisnis dengan birokrasi dan dirasionalkan seperti dengan personil dalam perusahaan besar.

Mills menyatakan bahwa kelas menengah berkembang sebagai pihak penunjang yang tidak diharapkan antara produsen dan kelas pekerja upahan. Kelas menengah baru lahir sebagai bagian dari penduduk Amerika. Mereka terdiri dari para manajer, buruh upahan, penjual (salesman) dan pekerja kantor. Menurut Mills para pekerja kerah putih (*white collar*) berada dalam kondisi yang menyedihkan dimana mereka semakin kehilangan kekuatan pribadinya. Hal itu ditandai dengan keterasingan mereka terhadap dunia kerja maupun terhadap diri mereka sendiri.

Mills menyatakan bahwa industrialisasi secara tajam telah mengurangi dan meminggirkan kelas menengah tua. Usaha kecil umumnya diganti oleh usaha kecil lainnya dan pada gilirannya akan gagal. Sebagian besar kegiatan ini terbatas pada sektor ekonomi tertentu yaitu industri ritel dan jasa. Ia juga berpendapat bahwa dalam pasar bebas, pengusaha kecil sensitif terhadap naik turunnya siklus bisnis dan berusaha mencari perlindungan dari persaingan pasar. Usaha kecil menurut Mills akan tetap untuk melayani kepentingan bisnis yang besar meskipun mendorong mereka dalam kehidupan ekonomi di pinggiran.

Kondisi yang demikian menurut Mills telah memberikan cara bagi kelas menengah baru sebagai kelompok menengah yang dominan, dan melalui bukunya ia memfokuskan bagaimana kelas menengah baru bekerja, apa artinya pekerjaan serta dan signifikansi politiknya adalah nyata. Dalam menganalisis fenomena ini ia menemukan sejumlah persamaan antara kelas menengah baru dan proletariat Marxis. Mills mencatat bahwa kantor dan ruang penjualan, sebagai dua lokasi besar aktivitas kerah putih, telah menjadi seperti pabrik dan mengalami evolusi ke arah rasionalisasi, mekanisasi dan pemakaian

mesin. Industri medis, dokter dan obat telah berjalan seperti bisnis rumah sakit dan profesi hukum mengikuti hukum pabrik dimana banyak muncul perusahaan besar.

Para pekerja cenderung mengalami keterasingan sebagaimana buruh yang cenderung kekurangan dimensi penting hidup, apalagi pengembangan diri sebagai manusia. Mills mempertimbangkan analisis Marx tentang alienasi pekerja dengan mempertimbangkan dimensi baru. Pekerja kerah putih terasing bukan hanya dari kerja mereka namun juga dari diri mereka, ketika menjual diri mereka demi kepuasan. Orientasi mereka adalah masalah pendapatan, status, karir, dengan hasil bahwa kepuasan sangat berkorelasi dengan peringkat sosial ekonomi, misalnya menjadi pekerja profesional lebih memuaskan dibanding menjadi staf administrasi meskipun sama-sama merupakan pekerja kerah putih.

Mills mencatat perubahan dalam cara kerja dan sikap, yang membuat pengalaman pekerja kerah putih lebih dekat dengan karyawan kerah biru (buruh). Kecenderungan untuk pemerataan pendapatan dan keamanan kerja. Mobilitas pekerja juga mengalami pemerataan, dengan kecil kemungkinan mobilitas ke atas bukan hanya karena penggunaan mesin dan rasionalisasi

namun juga karena meningkatnya tingkat pendidikan diantara pekerja. Akan tetapi keinginan untuk mengejar kesuksesan semakin menurun akibat sulitnya menembus hierarki atas akibat dipersulitnya akses ke sana.

Meskipun demikian, Mills menolak gagasan bahwa pekerja kulit putih akan menuju ke arah proletar, namun kondisi terlihat menyerupai pekerja kerah biru. Hal itu karena di kalangan proletar, tidak seperti kerah putih, tidak ada kesempatan untuk berbicara dalam bidang politik, dan bahkan kerah biru gagal untuk memperbaiki kondisi serikat pekerja mereka, bukannya perubahan sosial yang akan menentukan masa depan politik mereka dimana Amerika apatis dengan politik mereka di pertengahan abad kedua puluh. Kecenderungan ini diperkuat oleh gagalnya media massa dalam membuat politik dipahami dan bermakna bagi mereka yang bergelut dengan gaya hidup mereka yang konsumtif dan penuh kesenangan.

Selain itu, pekerja kerah putih lebih apatis dan tampak lebih rentan daripada kelompok lain. Pembagian yang signifikan antara kelas menengah lama dan kelas menengah baru adalah lemahnya kesadaran mereka sebagai sebuah kelas dan organisasi mereka yang lebih terbatas dan lambat. Gangguan terhadap kelas ini membuat

mereka lebih fokus pada masalah ini dan cenderung muncul sebagai kekuatan politik yang independen. Mereka lebih terlihat cenderung untuk mengikuti daripada memimpin dan cenderung oportunistis.

Dalam buku ini Mills menawarkan tulisan yang detail dan menyeluruh. Dalam pembahasannya mengenai pekerja, ia memberikan analisis secara rendah hati mengenai karakter kelas sosial Amerika, peran usaha kecil dalam perekonomian, dan kepuasan diri melalui pendidikan dan karir. Buku ini cocok untuk pemahaman pertengahan abad dua puluh Amerika dan dapat dibandingkan dengan situasi sekarang. Mills melihat bahwa dunia korporasi besar merupakan kekuatan yang sangat besar yang berlaku dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya. Mills mengacu pada visi Renaissance dari kehidupan pekerja yang sepenuhnya bekerja untuk kepuasan kerja yang ideal dan seluruh hidupnya diserahkan untuk produk dan proses. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri dan belajar dari pekerjaannya. Bekerja dianggap sebagai hobi, bagian dari rekreasi, bukan melakukan pekerjaan. Orang dianggap sebagai bagian dari proses produksi.

Mills mengidentifikasi aspirasi gaya baru yang muncul dan berfokus pada kesadaran batin manusia bukannya semata-mata prestasi kerja. Mills mencatat orang yang menjadi intelektual akan dikooptasi oleh mesin ideologi kepentingan pribadi yang mau tak mau mereka harus mewakili (setidaknya membuat diri mereka diterima) atau terpinggirkan. Mereka dianggap tidak relevan sebagai kekuatan politik untuk gaya teknis sendiri atau politik sendiri atau merasakan keterasingan.

Inti karya Mills adalah bahwa mekanisasi dan otomatisasi berlangsung dari lorong-lorong pabrik telah menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan yang sama yang telah menjadi normal dalam proses produksi. Keterasingan dari produk dan diri sendiri, penurunan motivasi dan perpecahan spasial dan emosional yang tajam pada kerja dan liburan, tidak hanya terjadi pada kaum proletar, namun juga karyawan kerah putih.

Buku *White Collar: The American Middle Classes* ini merupakan studi tentang masyarakat kelas menengah Amerika yang menggambarkan pembentukan sebuah kelas baru yaitu para pekerja kulit putih. Karya ini juga merupakan studi utama tentang keterasingan sosial di dunia industri modern dan kota yang didominasi oleh

mental pekerja menurut Mills. Isu-isu dalam buku ini dekat dengan latar belakang ayahnya merupakan seorang agen asuransi Mills dimana dia sendiri bekerja sebagai pekerja kerah putih dalam organisasi birokrasi.

Mills menulis: "Dalam masyarakat karyawan yang didominasi oleh mentalitas pemasaran, tidak dapat dihindari bahwa pasar kepribadian karyawan harus muncul. Dalam menggeluti seni keterampilan manual menjual dan melayani orang, ciri-ciri pribadi karyawan ditarik dalam lingkup komoditas pasar tenaga kerja". Kebaikan dan keramahan menurut Mills merupakan aspek layanan pribadi dari perusahaan besar, dirasionalisasi untuk penjualan. Lingkungan ini membuat instrumen penampilan dan kepribadian sendiri. Untuk menjadi tenaga ahli menurut Mills, laki-laki dan perempuan harus berpengetahuan luas dan memiliki kepribadian yang efektif sebagaimana yang diharapkan.

Pasar kepribadian menurut Mills merupakan efek yang paling menentukan dari ruang penjualan yang besar, mendasari ketidakpercayaan yang tergabung dalam sikap alienasi diri sehingga membentuk karakteristik metropolitan. Tanpa nilai-nilai umum dan saling percaya, hubungan langsung antar manusia akan mengalami

keterasingan. Diperlukan etika penjual dan kepura-puraan dalam berinteraksi antar manusia. Para laki-laki tearing satu sama lain karena masing-masing diam-diam mencoba membuat instrumen yang lain yang berbeda satu sama lain.

Dalam bukunya tersebut, Mills menawarkan sejarah yang kaya dari kelas menengah di Amerika Serikat dan berpendapat bahwa birokrasi telah kewalahan dengan pekerja kelas menengah, mengambil secara paksa mereka dari semua pemikiran independen dan mengubahnya menjadi robot yang tertindas namun ceria. Mills menyatakan ada tiga jenis kekuasaan dalam tempat kerja, yaitu paksaan, kekuatan fisik dan otoritas. Melalui karya ini, pikiran Mills dan Weber nampak dan memanipulasi keyakinan bahwa masyarakat Barat terjebak dalam sangkar besi rasionalitas birokrasi, yang akan mengajak masyarakat untuk lebih fokus pada rasionalitas dan kurang pada alasan. Mills takut kelas menengah dikebiri dalam politik yang budaya yang melemahkan yang memungkinkan pergeseran kelas menengah ke elit sosial yang kuat. Pekerja kelas menengah menerima gaji yang memadai namun menjadi terasing dari dunia karena ketidakmampuan mereka untuk mempengaruhi atau mengubahnya.

C. Wright Mills menyatakan bahwa sesuai budaya kerja, maka porsi kepentingan individu lebih sedikit, orang dan simbol lebih penting. Orang lebih banyak berbicara mengenai usaha bebas dan persaingan dibanding mewarisi toko atau lahan pertanian orang tua mereka. Dalam masyarakat karyawan yang didominasi mentalitas memasarkan, tidak dapat dihindari bahwa pasar kepribadian harus muncul. Keterampilan manual untuk seni menangani menjual dan melayani orang, kekhasan pribadi atau keakraban karyawan dibawa ke bentuk pertukaran dan menjadi komunitas pasar tenaga kerja. Kebaikan dan aspek kerahaman menjadi layanan pribadi atau humas dari perusahaan besar, dirasionalisasi pada penjualan sesuatu. Pribadi yang sukses adalah yang membuat instrumen penampilan dan kepribadian sendiri. Personel yang ahli, laki-laki atau perempuan harus berpengetahuan luas, diterima dan memiliki kepribadian yang efektif. Sama seperti pemilik kecil, mereka tidak bisa tawar menawar atas harga, tetap, atau menilai pasar sesuai kebijaksanaan. Dalam pasar kepribadian, efek yang paling menentukan dan gejala dari ruang penjualan yang besar, mendasari semua ketidakpercayaan yang meresap

dan keterasingan diri sebagaimana karakteristik orang metropolitan.

Tanpa nilai umum dan saling percaya, hubungan langsung antar manusia tidak terjalin dan terjadi dalam bidang kehidupan. Manusia berperilaku dengan etika penjual dan hidup dalam kepura-puraan dan manipulasi. Pekerjaan dan gaya hidup seseorang menjadikan orang melakukan manipulasi dalam setiap kontak manusia. Masing-masing individu terasing satu dengan lainnya karena membuat instrumen sendiri dan menjadi terasing karenanya.

Mills menganggap krisis pertanian tahun 1920 sebagai titik awal munculnya kelas menengah baru secara massal. Krisis pertanian menyebabkan konsolidasi dan konsentrasi pasar yang membuat petani beralih pekerjaan dan tidak lagi dapat menemukan pekerjaan di lahan mereka. Alih-alih bertindak sebagai pelaku pasar otonom dalam interaksi bebas penawaran dan permintaan, mereka justru diserap oleh perluasan administrasi dalam ekonomi Amerika dimana industri besar dan pemerintah pusat semakin kuat.

Menurut Mills, selain didorong oleh ketersediaan tenaga kerja, kecenderungan birokratisasi, mekanisasi dan

profesionalisasi telah menjangkau kelas menengah secara keseluruhan. Profesi kelas menengah tradisional tua seperti dokter dan pengacara menjadi dikomersialkan, pengusaha semakin bertindak semauanya dan intelektual semakin meredup. Strata manajemen yang muncul dalam perusahaan dihapus dari proses produksi, pegawai bersikap manipulatif mengarahkan karyawan kecil untuk mematuhi perintah investor modal mereka. Mills melihat bahwa dalam kehidupan kelas menengah tidak ada kekuatan yang cukup berarti. Mills menekankan bahwa karyawan kelas menengah bahkan yang profesional, tidak memiliki kekuatan pribadi untuk mengendalikan hidupnya sendiri dan kekuatan politik untuk membentuk bangsa.

Rutinitas sehari-hari yang umum di kalangan kelas menengah baru menurut Mills terdiri dari dua bagian pertama, bagian pekerjaan, yang didominasi oleh aktivitas bekerja yang harus bersikap ramah, berjuang untuk kekuasaan dan uang dan berkurang kemampuan teknis. Kedua, bagian luang yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas kesenangan dalam dunia glamor. Pemenuhan kebutuhan jangka pendek keinginan pribadi menurut Mills disebut status siklus, misalnya pada hari libur mereka memperoleh kelanjutan status sebelumnya

seperti pendidikan tinggi dan pelatihan, pendapatan sebagai kelas menengah baru dalam strata masyarakat.

Oportunisme juga berkembang dalam kelas menengah baru. Mills melihat serikat buruh sebagai pihak yang tercemar untuk memperoleh bagian terbesar dalam perjuangan ekonomi politik. Perubahan sistematis tertahang karena strata baru akan selalu menempel pada setiap aliran politik yang memiliki kekuatan paling kuat dalam tatanan politik. Mills mengakui tren dan fenomena yang tidak hanya membentuk kehidupan anggota kelas menengah tetapi juga secara signifikan mempengaruhi keputusan politik dalam demokrasi industri di Barat.

Dimensi politik dapat ditunjukkan melalui reformasi sektor publik dimana ada keinginan untuk meningkatkan kesiapan mobilitas dan pasar tenaga kerja. Peran perguruan tinggi makin berubah, dengan membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang mereka butuhkan di tempat kerja dan perusahaan. Lembaga pendidikan tinggi dianggap sebagai mitra politik dan ekonomi perusahaan yang akan menciptakan masa depan lebih baik. Pemain kunci dalam proses ini adalah warga akademis Eropa yang ditandai dengan perencanaan politik ekonomi yang fleksibel dan mobile.

Komersialisasi dan pengaruh kepribadian pada lulusan perguruan tinggi juga merupakan temuan utama analisis Mills di Amerika pada tahun 1950-an. Penemuan kelamnya pada perguruan tinggi, universitas telah mengubah bentuk kebutuhan personal bisnis dan pemerintah. Pada saat yang sama, ada keluhan terhadap sebuah bangsa yang telah menjadi ruang besar penjualan Mills menemukan produk jadi dari mesin pendidikan untuk menjadi orang sukses, karyawan yang baik dalam masyarakat spesialis.

L. Catatan Kritis Teori Mills

Kritik kepada Mills terutama diarahkan pada kesimpulan yang kaku dengan pandangan dan ramalan yang keras dan kadang-kadang suram. Namun sebagian besar analisis Mills dihargai oleh banyak pihak. Para ahli menyebut karya Mills menawarkan gambaran pada kepribadian kelas menengah kerah putih baru, sebagian lagi menganggap bahwa orang-orang dari tingkatan kerah putih yang dibuat Mills harus membaca dan merenungkan karya Mills tersebut.

Joseph A. Scimecca dalam bukunya *The Sociological Theory of C. Wright Mills* tahun 1977 menjelaskan bahwa ada kontradiksi yang kurang tepat

dalam karya Mills. Deskripsi dan penjelasannya tentang struktur kekuasaan masyarakat Amerika memiliki kecermelangan, kejelasan dan daya persuasi yang menarik para kritikus dan murid-muridnya. Namun di sisi lain, menurut Scimecca penggambaran karakter moral kekuatan nasional negara dan kritiknya pada lembaga sosial dan politik terlalu dibesar-besarkan dan seringkali melewati batas.

Demikian pula bertentangan dengan prestasi karya sosiologisnya, pemikiran tentang partisipasi dan saran untuk bentuk radikalisme politik menurut banyak tokoh cenderung mengandung unsur utopianisme dan dianggap tidak bertanggung jawab. Mungkin konflik antara obyektivitas dan subyektivitas telah terlihat karena pengaruh aliran Kiri baru, namun kontradiksi memang ada dan harus dianalisis.

Penulis radikal sering menggambarkan hubungan struktur sosial yang lebih obyektif dan akurat daripada gambaran karakter moral para aktor dan konsekuensi moral struktur sosial. Demikian pula dengan Mills, deskripsi sosiologisnya telah mengesankan dalam banyak hal hingga kritik moralnya. Namun distorsi dan unsur yang berlebihan perlu dihilangkan. Scimecca melihat pemikiran

Mills secara berbeda. Dia tidak tertarik pada rencana dan strategi radikalisme, namun ia percaya bahwa penurunan komitmen radikalisme adalah karena kegagalan kaum radikal untuk memahami teori dasar Mills tentang sosiologi dan politik. Dia berharap untuk memperkuat radikalisme dengan menunjukkan teori Mills yang mengandalkan struktur teoritis yang sistematis yang dipandu penelitian dan perumusan ide-ide sebagaimana yang diungkapkan dalam buku *The White Collar* dan *Power Elite* dapat melayani radikalisme.

Struktur teoritis model masyarakat berasal dari tokoh pragmatisme Amerika, yaitu George Herbert Mead dan John Dewey dan tokoh sosiologi Jerman, terutama Max Weber dan Karl Mannheim. Teori model masyarakat Mills adalah alternatif terpuji untuk model liberal dan Marxis dan mampu melayani ilmu pengetahuan, etika dan politik. Namun ada penentangan bahwa sejauh Mills membangun model masyarakat, ia menarik diri secara substansial dari Marx. Marxisme Mills tidak selalu jelas karena datang dengan cara Veblen dan Marxis skeptis dan seperti tidak tertarik pada pseudoscientific dan komponen ideologis Marxisme. Ia tampak telah dituntut untuk memperbaiki dan memodernisasi Marxisme dan

tidak berhasil dalam tugas ini karena selain menjadi pemikir ia tidak menolak untuk mengubah kesimpulan signifikan Marx. Marxisme Mills terlepas dari manfaatnya menciptakan kontroversi untuk menetapkan batas-batas penerimaan pemikirannya. Signifikansi sosiologi Mills adalah wawasan yang tajam dalam perilaku manusia dan struktur sosial.

Banyak tokoh ilmu sosial menyatakan bahwa gambaran Mills tentang individu, masyarakat dan sosiologi sebagian bertentangan dengan kecenderungan teoritis kaum fungsionalis struktural. Ketika banyak ahli sosiologi berpendapat bahwa individu individu secara sosial ditentukan struktur namun bersifat rasional, Mills berpendapat sebaliknya menyajikan kemungkinan kebebasan dan sifat tidak rasional manusia. Karya Mills serupa dengan kaum interaksionis yang membebaskan para pelaku sosial untuk bertindak dan berperilaku, hal yang berbeda dengan kaum fungsionalis yang melihat individu ditentukan oleh struktur sosial. Dengan mengungkapkan sisi tidak rasional individu, Mills berharap beberapa orang akan diarahkan untuk mengubah struktur sosial. Pandangan Mills ini menghadapkan individu sebagai

produk sosial dengan individu sebagai pencipta struktur sosial.

Mills juga mengakui bahwa lembaga-lembaga sejarah telah membentuk individu. Menurutnya, banyak kejahatan kerah putih adalah hasil dari immoralitas struktural. Mills prihatin dengan kenyataan bahwa individu-individulah yang mengambil berbagai keputusan dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensinya. Ia ragu oleh perspektif analitis yang menempatkan individu dalam sistem yang lebih luas. Ketegangan antara kebebasan individu dan determinisme struktural tampak jelas dalam karya Mills tentang kekuasaan. Ketika semua orang bebas membuat sejarah, namun hanya beberapa orang yang dapat melakukannya karena lebih bebas dibanding lainnya. Individu menurut Mills sebagian bebas dan sebagian ditentukan, tergantung posisinya dalam struktur kekuasaan. Namun Mills membolehkan tindakan kolektif di antara warga negara yang telah sadar secara sosial untuk merintangai gerakan kekuasaan elit dan menciptakan nasib mereka sendiri.

Bagi Mills struktur sosial memiliki realitas yang menentukan nasib dan keberuntungan mereka yang hidup di dalamnya. Mills mengkritik pandangan yang terla

melebihkan kekuasaan beberapa lembaga sosial dan mengecilkan kekuasaan massa yang nyata. Rakyat menurutnya diperlakukan struktur kekuasaan sebagai pion elit, nasibnya ditentukan oleh tindakan sosial elit tersebut. Mills menyarankan untuk menggunakan imajinasi sosiologis untuk mengkaji masalah sosial. Ia mendesak para sosiolog untuk berpaling ke teori humanistis, evaluatif untuk memperbaiki dunia sosial mereka. Mills mengkritik model naturalistik yang dominan dalam sosiologi kontemporer, karena itu ia menganjurkan untuk menggunakan imajinasi sosiologis karena menurutnya sosiologi Amerika lebih mengutamakan metode praktis dibanding menjawab masalah sosial.

Irving Louis Horowitz dalam bukunya *C. Wright Mills: An American Utopian* menyatakan bahwa Mills adalah seorang utopis Amerika, seorang sosiolog yang mengutamakan moral sebagai fokus utamanya, dimana menyajikan teori besar dan empirisme. Mills dalam bukunya mengambil kritik George Steinbrenner dan mendiskusikan hubungan kekuasaan dan pembagian kelas di tengah ancaman kritis pluralisme di Amerika. Pada buku *Imajinasi Sosiologis* (1960) Mills mengkritik empirisme dari Paul Lazarsfeld dan grand theory milik

Talcott Parsons. Irving Louis Horowitz melihat, dengan menolak fungsionalisme Parsons, Mills menunjuk jalan bagi generasi baru ilmuwan sosial yang didedikasikan untuk masalah perubahan sosial dibanding pemeliharaan sistem. Horowitz berfokus pada warisan akademik Mills dan karya besar Mills. Menurut Horowitz kekurangan buku ini adalah terletak pada organisasi. Namun demikian, buku Mills sangat relevan karena melihat tanpa henti dan belakang layar proses kehidupan sehari-hari dan menimbulkan kesadaran realitas yang telah menjadi langka di masyarakat modern.

BAB II

POLITIK KELAS MENENGAH INDONESIA: PANDANGAN BERBAGAI TOKOH

Bab ini membahas tentang Politik Kelas Menengah Indonesia yang merupakan hasil seminar mengenai kelas menengah Indonesia di Monash University Australia yang merupakan kumpulan tulisan dari berbagai tokoh yang berkepentingan mengenai kelas menengah berdasar konsep, kerangka teori, gaya hidup dan aspek-aspek sosio budaya lainnya menurut para penulisnya, meskipun batas-batas secara metodologisnya belum bisa ditarik secara jelas. Para tokoh yang terlibat dalam buku ini antara lain Richard Robison, Daniel S. Lee, H. William Liddle, Abdurrahman Wahid, Howard W. Dick, dan sebagainya. Buku ini merupakan hasil dari konferensi dengan topik mengenai "Politik Kelas Menengah Indonesia" yang diselenggarakan oleh Centre of Southeast Asian Studies, Monash University pada bulan Juni 1986. Berikut ini beberapa tulisan mengenai kelas menengah dari para tokoh tersebut.

Menurut Richard Robison, salah seorang kontributor buku ini, pendefinisian istilah "kelas menengah" dalam pandangan politik adalah sulit karena walaupun istilah ini

digunakan secara umum, namun telah digunakan secara tidak hati-hati. Dalam tingkat yang lebih luas dan populer menurut Robison istilah ini secara umum diartikan sebagai suatu kelas yang mencakup kelompok-kelompok sosial yang berkembang yang dianggap berada di antara buruh dan petani, atau dibedakan antara kelas bawah di satu pihak dengan kelas yang berkuasa di pihak yang lain. Masyarakat kelas menengah dalam pandangan ini menurut Robison memiliki keterampilan relatif kaya, memiliki nilai-nilai individualisme, materialisme, sekularisme dan rasionalisme.

Namun menurut Robison muncul beberapa persoalan dalam mendefinisikan kelas menengah secara memadai. Pertama, kategori kelas menengah mencakup spektrum masyarakat yang luas. Karena untuk Indonesia sangat sukar untuk mengidentifikasi kelas atas. Penguasa feodal tradisional menurut Robison tidak hanya kehilangan kekuasaan politik dan akses terhadap sumber-sumber kekayaan tradisional, tetapi juga bahkan tidak lagi menjadi pemilik dari apa yang disebut sebagai budaya kelas penguasa (*a ruling class culture*). Tidak adanya kekuasaan baru (para jenderal) maupun kekayaan baru (kapitalis konglomerat Cina) yang membangun dirinya dalam suatu cara kohesif yang memadai dan dalam pelembagaan yang sistematis untuk memenuhi syarat disebut sebagai kelas

penguasa baru. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kelas menengah Indonesia secara potensial dapat dilihat mencakup jaman masyarakat mulai dari agen penjual beras lokal sampai konglomerat. Terdapat perbedaan di dalam kekuasaan ekonomi dan politik yang bersifat luas. Pertimbangan politik dan ekonomi dibangun dalam gagasan mengenai kelas menengah ini juga gagasan tentang gaya hidup dan budaya.

Persoalan kedua menurut Robison adalah kenyataan bahwa berdasarkan sejarahnya tidak terlihat ketegasan derajat kelas dalam tingkah laku politik kelas menengah yang cukup memadai untuk memperkuat dirinya sebagai suatu kelompok sosial dengan kepentingannya yang solid dan dengan kesadaran politiknya yang berkembang. Cara lain yang bisa dilakukan adalah menunjuk pada pengelompokan sosial yang lebih luas. Sehingga kategori yang lebih luas dari kelas menengah adalah kategori seperti kapitalis besar, kapitalis kecil, birokrat dan birokrat rendahan, manajer, para profesional mandiri, profesional bergaji, dan aristokrat buruh. Istilah kelas menengah menurut Robison mungkin berguna dan merupakan alat analisis politik yang koheren apabila istilah tersebut diorganisasikan dan diletakkan kegunaannya dalam kerangka tertentu.

Istilah kelas menengah yang disimpulkan dalam konferensi di Monash University menurut Robison adalah bersifat nyata dan diterjemahkan sebagai kategori sosial dengan suatu peranan politik tertentu di dalamnya. Bagi Robison pandangan yang dominan mengenai kelas menengah serta peranan sosial dan politiknya adalah terutama berasal dari campuran tradisi pluralis liberal dan pemikiran sosial Weberian yang telah mendominasi analisa politik Barat mengenai Indonesia sejak tahun 1950-an.

A. Konsep Kelas Menengah Weberian

Menurut Robison, dalam tradisi Weberian, kelas didefinisikan dalam bentuk posisi pasar yang berkaitan dengan hak kepemilikan, kesejahteraan dan kesempatan hidup daripada sebagai bentuk hubungan terhadap alat-alat produksi. Oleh karena itu kesejahteraan, pendapatan dan status menjadi faktor penting dalam struktur kelas. Analisa Weber tentang masyarakat bagi Robison tidak terlalu memperhatikan masalah konflik kelas, tetapi lebih kepada transformasi masyarakat dan otoritas politik dari sistem yang tradisional, patrimonial dan sewenang-wenang ke sistem yang modern, rasional dan teratur secara legal. Dalam masyarakat yang baru ini hubungan-hubungan

personal, politik dan ekonomi digantikan dengan hubungan berdasarkan kontrak, aturan dan hukum.

Bagi Weber perjuangan antara tradisi dengan rasionalitas secara umum merupakan suatu perjuangan antara kelas-kelas sosial yang kepentingan tetapnya ada di dunia tradisional dengan mereka yang kepentingannya tertanam dalam dunia kapitalis yang sedang tumbuh. Di sisi lain, ketika aristokrasi feodal dan birokrat patrimonial berjuang untuk mempertahankan privilese, kekuasaan dan peraturan personal, kekuatan-kekuatan baru muncul sebagai pemenang rasionalisasi kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Weber mengklaim bahwa meluasnya kapitalisme dan industrialisme membutuhkan suatu sistem politik dan otoritas birokratik yang rasional dalam rangka memungkinkan terjadinya akumulasi kapital. Dengan demikian menurut Weber munculnya kelompok-kelompok sosial baru sebagai pembawa budaya sekuler dan rasional sangat penting.

Pengadopsian pemikiran Weber oleh kaum liberal pluralis Amerika Utara dan oleh para kaum struktural fungsional menurut Robison telah menimbulkan beberapa perbedaan penting dari tesis Weber. Pertama, penekanan yang berlebihan terhadap keunggulan budaya sebagai agen

perubahan dan pengabaian faktor-faktor material sebagai kekuatan penggerak. Terdapat sejumlah tulisan mengenai pentingnya kelas wiraswasta dan tentara, khususnya sebagai pembawa nasionalisme baru dan budaya sekuler yang mendorong sistem politik dan ekonomi baru. Kedua, jika Weber melihat rasionalisasi wewenang dan ekonomi mendorong pada ramalan mengenai korporasi dunia dan birokrasi serta pengasingan individu, maka kaum liberal pluralis Amerika Utara memandang kekuatan mereka sebagai pembebaskan individu dan memperkuat demokrasi.

Kelas menengah sebagaimana yang didefinisikan Robison merupakan pembawa modernitas dan demokrasi. Bagi Robison kelas ini merupakan suatu kategori sosial sekaligus sebagai gaya hidup dan nilai-nilai serta menjadi pelopor sekularisasi dan revolusi nasional. Namun demikian menurut Robison terdapat dua persoalan utama dalam pandangan kelas menengah ini.

Pertama, sementara kelas menengah dilihat sebagai himpunan identitas yang koheren menurut status sosialnya, posisi material dan peranannya sebagai kelompok rasionalis, terdapat keraguan tentang peran mereka sebagai pembawa nilai-nilai individual, kemerdekaan dan demokrasi. Meskipun perlawanan terhadap rezim

otoriterian penguasa militer dan negara sering datang dari kaum intelektual liberal. Namun benar pula bahwa rezim otoritarian memiliki dukungan kuat dari kelas menengah, kapitalis kecil, tuan tanah menengah, para manajer dan birokrat. Penguasa rezim memiliki kelompok pemikir (*think tank*), surat kabar, universitas, sekolah yang seluruh pegawainya adalah kelas menengah. Dengan demikian kelas menengah dapat dilihat sebagai aparaturnya rezim penguasa dan korporasi sebagai sumber perlawanan terhadap kekuasaan mereka.

Kedua, jika istilah 'menengah' dan 'kelas' adalah untuk mengartikan suatu yang lain, maka penguasa politik negara dan pemegang kekuasaan ekonomi dalam beberapa hal harus dibedakan dari kelas menengah bahkan jika mereka dilihat sebagai pembawa nilai-nilai budaya rasional dan sekuler yang sama sebagaimana kaum profesional bergaji menengah dan kelompok wiraswasta. Menurut Robison, harus ada pembagian yang memisahkan kelas menengah dari kelas yang berkuasa atau kelas yang memerintah yang didasarkan pada kekuasaan ekonomi dan politik. Seseorang dapat selalu mengatakan mengenai kelas elit tetapi akan menimbulkan problem nyata dalam penggunaan istilah kelas.

B. Kelas Menengah dan Teori Marxis

Robison juga menjelaskan kelas menengah sesuai tradisi teori Marxis. Menurut Robison tradisi Marxis pada dasarnya berurusan dengan proses produksi yang pada hakekatnya merupakan hubungan sosial dan politik. Oleh karena itu kelas diartikan sebagai suatu hubungan produktif. Marx menaruh perhatian pada hancurnya feodalisme dan munculnya kelas kapitalis baru. Ia tidak pernah secara sistematis menggunakan istilah kelas menengah dan seringkali terlihat menunjuk pada borjuis kecil yang merupakan satu elemen kelas kapitalis yang bersifat reaksioner.

Ketika masyarakat kapitalis menjadi kompleks, kelas penguasa (kelas penguasa) terbukti secara langsung semakin tidak mampu menjalankan kekuasaan politiknya atau mengelola usaha dan aktifitas ekonomi mereka atau untuk mengatur ideologi masyarakat. Semakin hari pengelolaan sistem politik, ekonomi dan supra struktur ideologi diambil alih oleh munculnya kelas para ahli bergaji. Dengan berkembangnya kelas bergaji, manajer, pejabat, teknisi dan profesional maka muncullah personalitas teoritis bagi kalangan Marxis.

Dalam analisa dua kelas yang ketat membagi kelas atas dasar hubungannya dengan alat produksi, maka kelas menengah jatuh dalam posisi proletariat dan oposan terhadap mereka yang pendapatan dan kekuasaannya berasal dari pemilikan modal dan alat-alat produksi. Namun dalam analisa politik sehari-hari kategorisasi ini tidaklah berguna. Kelas menengah tidak hanya berfungsi sebagai manajer dari masyarakat kapitalis tetapi juga terbukti merupakan kekuatan politik konservatif. Menurut Robison, dalam sejumlah kasus dimana terjadi pertentangan fundamental antara kekuatan politik kapitalis dengan kekuatan revolusioner, kelas menengah mendukung rezim otoritarian yang didominasi militer untuk menghadapi kekuatan revolusioner rakyat. Teoritisi Marxis, Herbert Marcuse menjelaskan fenomena ini sebagai hasil inkorporasi kelas menengah sehingga kelas pekerja juga dimasukkan ideologi kelas penguasa, ideologi penguasa.

C. Kelas Menengah di Indonesia

Mengambil gambaran Indonesia pada masa rezim Hindia baru tahun 1970-an, Robison menjelaskan bahwa kelas menengah pada masa itu memegang peranan penting. Menurutnya intelektual kelas menengah menjadi

pengkritik utama rezim Suharto. Rezim yang dilihat sebagai atavistik, korup, nepotis dan sewenang-wenang didekati oleh kelas menengah yang rasional dan sekuler. Sementara rezim pemerintah bersifat otoritarian, kelas menengah digambarkan bersifat demokratik.

Dengan mengutip pengamatan Howard Dick Robison menegaskan bahwa masalah kelas menengah dapat diletakkan pada dua aspek. *Pertama*, proses formasi kapital diantara kelas kapitalis kecil yang baru muncul benar-benar merupakan suatu konsiderasi bagi suatu basis baru dari kekuatan sosial dan ekonomi yang muncul dari basis lama dalam birokrasi dan tanah. *Kedua*, Dick melihat kelas menengah baru dalam pola-pola konsumsi dan tingkah laku sosial.

Sementara itu mengutip tulisannya, Robison menunjukkan perbedaan yang tajam antara kelas kapitalis dan kelas menengah. Berdasar perbedaan yang dilakukan Robison, menunjukkan bahwa kelas kapitalis terkait erat dengan proses-proses akumulasi kapital dan pelebagaian kepemilikan pribadi. Di sisi lain, para pejabat, manajer, kalangan profesional dan intelektual merupakan fungsionaris ideologi, sosial, ekonomi dan politik dari kapitalisme meskipun memiliki komitmen ideologi dan

posisi menengah mereka mungkin bergantung pada pelestarian kapitalisme di Indonesia. Mereka menurut Robison bukanlah suatu kelas, namun merupakan produk unik sistem kapitalisme. Kelas menengah dalam hal ini berada di seluruh masyarakat Indonesia baik sosial maupun kapitalis.

Peran politik kelas menengah menurut Robison ditentukan oleh beberapa faktor. Di Indonesia elemen-elemen liberal memiliki keinginan atas kemarahan yang ditimbulkan oleh kekuasaan militer yang otoriter dan sewenang-wenang serta korupsi para pejabat negara sebagai suatu *trade-off* terhadap perbaikan terus menerus posisi ekonomi mereka, yang selama dua dekade mengalami peningkatan yang pesat akibat naiknya ekspor minyak.

Bagi Robison, kelas kapitalis Indonesia bukan merupakan entitas monolitik dan tidak dapat dibedakan, terbagi antara modal industrial, finansial dan pedagang, asing dan domestik, Cina dan pribumi, skala besar dan kecil, maka kelas menengah juga merupakan entitas yang kompleks dan beraneka. Di satu sisi, elemen liberal mempertahankan posisi kritisnya terhadap rezim. Di sisi lain, massa kelas menengah di Indonesia memiliki visi

ideologi yang bukan perpanjangan dari korporatisme otoritarian yang tertanam dalam ideologi negara yaitu Pancasila.

Dalam dekade terakhir jumlah kelas menengah semakin meningkat akibat derasnya pemasukan dari minyak, tetapi elemen liberalnya telah dijatuhkan dalam ketidakberdayaan politik yang dijalankan rezim di kampus-kampus, media dan dalam aparaturnegara. Pertumbuhan kelas menengah berproses dengan cepat sebagai fungsi pertumbuhan kapitalisme industri, namun secara politik pertumbuhannya telah diinkorporasikan dalam korporatisme-otoritarian rezim Orde Baru melalui aparat negara yang kuat. Masyarakat banyak berharap bahwa kelas menengah hanya dapat memperoleh keuntungan dari runtuhnya posisi ekonomi negara dan mereka yang mengontrol puncak pimpinannya.

Menurut Daniel S. Lev, kelas menengah dibandingkan kelompok lainnya cenderung konsisten mempromosikan perubahan. Secara historis, kelas menengah telah menjadi sumber utama desakan terhadap perubahan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kepemimpinan dari gerakan nasionalis dan anti kolonial umumnya datang dari strata menengah baru. Mereka

menunjukkan kepedulian yang teguh dalam memperbaiki keadaan yang mereka perjuangkan dan lagi mereka memiliki prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan dan melanggengkan perjuangan jangka panjang tersebut.

Lev lebih suka menyebut kelas menengah sebagai 'kelompok tengah' dimana kelompok ini merupakan kumpulan dinamis yang tumbuh dalam ruang diantara dua kelas yang terpolarisasi. Mereka bukan hanya datang dari kalangan petani atau pekerja di kota di satu pihak maupun elit negara di pihak yang lain. Mereka menempati strata wiraswastan, pekerja komersial, finansial dan kaum profesional dalam ekonomi. Sebagaimana di banyak negara menurut Lev, mereka bukanlah kaum borjuasi karena mereka tidak memiliki atau mengendalikan pemilikan atau alat-alat produksi. Tanpa kepemilikan dan pengendalian alat-alat produksi mereka tidak memiliki pengaruh konsisten terhadap lembaga-lembaga negara. Mereka bersifat heterogen dan cukup terfragmentasi. Mereka juga tidak memiliki kesamaan tempat lahir ataupun basis ekonomi dan karena itu tidak memiliki kesamaan kepentingan yang dibutuhkan yang dapat

mengatasi kantung-kantung etnik dan agama di antara mereka.

Secara politis dan ideologis menurut Lev kelompok yang paling aktif dan menarik diantara kelas menengah adalah kaum profesional. Walaupun di satu pihak ada yang menciptakan para revolusioner, sebagian lainnya bersikap sangat konservatif. Yang lebih tipikal dari kelas ini adalah bahwa mereka menumbuhkan para pembaharu yang penguasaan akan kemampuan menyebabkan mereka memiliki pengaruh yang lebih besar dari proporsi jumlah mereka, walaupun menurut Robison umumnya apa yang mereka peroleh lebih rendah dari apa yang mereka yakini seharusnya mereka peroleh.

Kaum profesional independen yang menjadi bagian dari kelas menengah menurut Lev tidak tergantung secara ekonomi, dan seringkali terpisah secara kultural dan terbatas secara politik. Mereka mampu membangun aliansi terpisah, mampu mencari institusi-institusi ekonomi dan politik yang menguntungkan, serta memberi kritik terhadap lingkungan yang tak simpatik dimana mereka hidup.

Evolusi kelas menengah di Indonesia menurut Lev berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan kompleks

Kepentingan, hasrat ekonomi dan politik, serta watak ideologi mereka bangkit pada masa politik Etis pada zaman penjajahan dimana sebagian akibat dari menjajarnya konflik ekonomi antara wiraswastawan pribumi Indonesia dan Cina. Indikator utama munculnya kelompok-kelompok sosial dan corak pemikiran sosial baru menurut Lev adalah adanya aktivitas-aktivitas asosiasional baru yang berkembang sejak tahun 1900-an. Aktivitas kelompok ini berdiri independen dari otoritas pemerintah dan terpisah dari secara sosial politik dari elit senior. Dan bahkan sejak awal mereka bersikap antagonistik terhadap otoritas Belanda di Indonesia. Namun dari segi kepemimpinan aktivitas tersebut sangat terbatas baik dalam hal ukuran maupun kemampuan untuk tumbuh secara substansial karena ekonomi swasta dikuasai oleh Belanda dan komunitas Cina yang tidak dapat mendorong kaum wiraswastawan dan profesional pribumi Indonesia untuk lebih besar lagi.

Kelompok profesional lokal walaupun berjumlah sedikit, bersama-sama dengan sejumlah kelompok lain menciptakan perubahan-perubahan penting, meskipun berada di atas kemampuan pengendalian mereka. Pada masa kemerdekaan, kelompok menengah mendominasi

negara baru tersebut dengan menjadi bagian di dalamnya setelah berhasil membangun gerakan nasionalis dan memimpin revolusi. Kekuasaan dan otoritas politik nasional datang dari strata menengah berpendidikan. Namun mereka terpecah kecuali untuk hal-hal yang bersifat sama akan kepentingan kelas. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup baik dalam ekonomi swasta ataupun negara untuk kemandirian mereka. Mereka tidak cukup mampu untuk mengontrol struktur negara yang diwariskan penjajah dan kekuatan masyarakat baru yang dihasilkan revolusi terlalu lemah untuk memiliki peranan yang berarti.

Robison menegaskan bahwa berdasarkan sejarah kelas menengah tumbuh di bawah Demokrasi Terpimpin dan dalam cara tertentu menjadi bersifat ideologis. Pertumbuhan kelas menengah pada masa itu banyak terkait dengan mobilitas ke bawah sebagian keturunan keluarga priyayi serta mobilitas ke atas lulusan universitas negeri maupun swasta yang menjamur di era Soekarno. Mereka berjuang untuk pengendalian ekonomi dan negara.

Hubungan kelompok menengah dan rezim Orde Baru menurut Lev dipenuhi oleh dualisme dan ketidakpastian, saling menghargai serta kecurigaan yang

mendalam. Hal tersebut karena kekuasaan condong ke arah yang menguntungkan rezim. Kelompok menengah pada masa Orde Baru menjadi sumber dari tekanan terhadap perubahan. Kelompok ini menurut Lev mencakup kaum wiraswastawan dan profesional, korps perwira dan kelompok-kelompok Islam. Isu yang muncul tidak hanya mencakup masalah distribusi ekonomi dan akses-akses institusional, namun juga redefinisi etik atas negara dan masyarakat serta lokasi dari sebuah pusat dari kecenderungan ideologis. Mereka memiliki kepentingan bersama, tidak hanya untuk melanggengkan kenyamanan dan status yang mereka peroleh, mereka juga berjuang untuk menekan klaim politik Islam.

Kelompok militer menurut Lev tidak akan kurang dominasinya sebagai pilar politik utama meskipun terjadi suksesi. Bila perubahan berjalan, tuntutan kelas menengah mengenai pengekangan politik, keteraturan prosedural akan terpenuhi secara bertahap. Dengan mengutip Dick, Lev menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk berharap bahwa kelas menengah sosial baru akan memiliki kepedulian pada kaum miskin di desa dan di kota. Kelas akan terus tumbuh dan memperluas para pembaharu terutama kalangan profesional yang akan banyak

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang perubahan yang lebih mendasar.

Menurut Lev, dimensi prinsipil yang terjadi pada masa Orde Baru adalah bangkitnya sebuah kelas menengah yang keberadaannya memiliki akibat penting selama dua dekade pertama setelah revolusi dan kehadirannya akan berpengaruh sangat besar pada dua dekade berikutnya. Kelas menengah telah menjadi sebuah kategori umum dalam diskursus politik Indonesia, itu penting karena semakin sering disebut dalam kaitannya dengan beragam isu dan problematika.

Bagi Lev, kelas menengah dianggap bertanggung jawab atas berbagai janji perubahan sosial, ekonomi dan politik dan juga atas kegagalannya untuk memenuhi janji-janji perubahan tersebut. Ia bukanlah sebuah strata yang sama sekali baru melainkan sesuatu yang berkembang secara gradual sejak awal 1920-an, ketika para profesional lokal awal menggabungkan diri dengan kaum wiraswastawan dan mulai berpikir dan berperilaku berbeda dibanding masa sebelumnya. Mereka memimpin revolusi namun tak mampu mengisinya, mereka membangun dan mengisi perlementer namun tak mampu melindunginya dari kekuatan yang diciptakan revolusi atau negara yang

diciptakan penjajah. Mereka tidak punya basis kelas yang cukup besar.

Setelah tahun 1965, kelas menengah mulai berkembang pesat dalam iklim ekonomi Orde Baru yang menguntungkan, dan mereka memiliki sedikit kekuatan politik. Hubungan mereka dengan pihak yang memegang kekuasaan, bila tidak bersifat tergantung, sedikit banyak menyenangkan atau bersifat antagonistik, sedikit banyak tidak menyenangkan. Karena itu tidak ada yang baku tentang kelas ini, mengingat mereka terbelah secara politik dan ekonomi oleh beragam orientasi terhadap negara dan kekuasaan politik.

Berdasarkan akar sosial, kelas menengah menurut Lev berada diantara kalangan pribumi, mereka sebagian berasal dari kelompok desa dan kota yang secara mobil bergerak ke atas, banyak dari mereka masuk perdagangan di masa penjajahan dan banyak pula lainnya yang terangkat akibat perluasan pendidikan dalam periode Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Dengan mengutip Soetjipto Wirosardjono, Lev menyatakan bahwa kelas menengah Indonesia merupakan penyebab tidak adanya keinginan akan perubahan sosial mendasar. Yang jelas

adalah bahwa tuntutan kuat terhadap perubahan berasal dari posisi menengah sosial.

Kelas menengah Indonesia menurut Lev dalam banyak hal memiliki banyak arti penting, yaitu sebagai juru bicara paling artikulatif dari ide-ide, tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, dan kepentingan-kepentingan baru sebagai pihak pengimplementasi hal-hal tersebut atas nama wiraswastawan kapitalis; sebagai perwakilan gaya hidup dan selera baru; sebagai model yang cakap dan terpercaya dari keragaman baru status yang tinggi; serta sebagai pelaku reformasi.

Di kalangan strata menengah pandangan tentang wilayah privat telah mengandung konsekuensi konsekuensi ideologis, termasuk agama dan kebudayaan secara lebih umum. Konsep privat menurut Lev secara ideologi dan kultural menempati posisi sentral bagi kelas menengah yang bangkit di Indonesia bukan karena seharusnya demikian, melainkan karena kebetulan yang terjadi. Kelas menengah yang tumbuh dari ekonomi swasta menurut Lev perlu diamati secara mendalam. Kelompok swasta yang telah mempersepsikan diri sebagai kelas swasta dan kelas menengah kemungkinan besar akan mengangkat akses isu-isu politik, pemerataan sosial, dan

kendali terhadap isu kekuasaan negara. Lev meramalkan akibat tidak kuasanya kelompok ini maka besar kemungkinan akan berlanjutnya rezim otoritarian di masa depan dengan sejumlah krisis yang hadir dari bentuk tantangan kelas menengah sosial ekonomi terhadap kelompok penguasa negara.

Secara ringkas, pokok pikiran Daniel S. Lev tentang kelas menengah Indonesia adalah:

1. Bahwa sebuah kelas menengah atau kelas-kelas telah tumbuh secara signifikan semasa Orde Baru sebagai akibat sampingan dari kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah
2. Bahwa sebuah porsi cukup besar dari kelas ini secara politik memiliki pendirian liberal, yang berarti memiliki kepedulian untuk menciptakan jarak antara negara dan masyarakat
3. Bahwa kelas menengah liberal akan terlibat dalam aksi politik. Yang dimaksudkannya sebagai kelas menengah tampaknya adalah orang-orang Indonesia berpendidikan sekuler dan bekerja dalam sektor modern swasta

Munculnya kelas menengah di Indonesia menyebabkan para ahli mencoba mendefinisikan kelas menengah berkaitan dengan isu metodologi dasar mengenai istilah dalam menganalisa perilaku politik. Kelas

menurut Howard W. Dick dapat didefinisikan berkaitan dalam kerangka budaya dan nilai bersama sebagaimana kepentingan ekonomi bersama, dan kriteria-kriteria itu tidak harus saling mendukung. Sementara Young memberikan saran untuk tidak mengabaikan kesamaan dalam gaya budaya yang dapat mengacaukan keanekaragaman berbagai kelompok sosial yang cenderung dinamakan kelas menengah. Namun dalam pengertian yang sama, orang tidak boleh mengabaikan keanekaragaman pekerjaan dari berbagai kelompok sosial yang mengacaukan keselarasan dari budaya, gaya hidup dan nilai-nilai.

Berdasarkan perbedaan kepentingan ekonomi yang ada, Dick berpendapat bahwa kelas menengah Indonesia dapat dikenali secara lebih mapan dalam kaitannya dengan cara berkonsumsi. Dalam hal ini tidak hanya mengacu pada tindakan mengkonsumsi yang berkaitan langsung dengan tingkat penghasilan dan juga tidak secara khusus mengacu pada tipe barang-barang konsumsi, seperti barang-barang yang tidak mudah rusak atau tahan lama. Namun menurut Dick yang menjadi pokok permasalahan bukanlah pada pemilikan atas barang tahan lama melainkan cara konsumsi mereka. Dick berpendapat

bahwa kelas menengah berarti adalah kepemilikan sendiri barang yang dikonsumsi.

Dalam lingkungan kampung, perbedaan antara kelas menengah dan rakyat memiliki makna sesuai dengan kategori yang dibuat Mahasin, yaitu golongan gedongan yaitu mereka yang tinggal di rumah yang terbuat dari batu bata dan golongan kampung yaitu mereka yang tinggal di rumah yang terbuat dari bahan yang lebih sederhana. Hal ini mendasari bagaimana masyarakat berperilaku dan mendefinisikan status mereka dalam kehidupan di kampung sehari-hari yaitu barang apa yang dibagi atau menjadi milik bersama, siapa yang saling berbagi dan dalam kondisi apa pembagian terjadi.

Melalui gaya hidup masyarakat mewujudkan tingkat kesadaran kelas dalam cara-cara yang sangat praktis. Kesadaran tidak mengacu pada penentuan minat aksi politik yang dapat dikenali oleh para Marxis. Kesadaran ini cenderung merupakan identifikasi suatu kelas masyarakat yang menjalankan gaya hidup ala Barat yang modern, yang sampai tahap tertentu didasari peranan para model, dan dipropaganda melalui media massa nasional, terutama televisi. Hasil perilaku konsumen ini tidak bersifat politis. Dick menyatakan nilai-nilai yang

muncul dari jenis gaya hidup seperti ini memiliki konsekuensi politik dengan jalan mempengaruhi distribusi produk sosial melalui cara dimana masyarakat berkembang secara perlahan.

Identifikasi kelas menengah Indonesia dalam kerangka cara berkonsumsi bukan merupakan akhir melainkan awal penelitian. Dick memunculkan dikotomi antara kelas menengah yang tergantung pada pemerintah seperti pegawai negeri, wirausaha, akademisi dan kelas menengah yang mandiri seperti pengusaha mandiri, kaum profesional dan para pemikir. Pendekatan ini lebih menyoroti minat khusus terhadap kekayaan kekuasaan. Pendekatan Mahasin (1989) dan Sundhaussen (1989) bertujuan membagi kelas menengah menjadi tiga tingkatan: atas, menengah dan bawah. Kelas menengah atas mencakup kelompok pemerintah dan pengusaha besar atau konglomerat, kelas menengah menengah mencakup para profesional dan pemikir serta kelas menengah bawah mencakup pengusaha kecil, pemilik tanah yang luas di desa, beberapa pekerja pabrik dengan bayaran tinggi serta tenaga terampil lainnya. Anggota militer dan pegawai negeri dalam strata ini dapat termasuk dari salah satu tingkatan di atas tergantung pangkat yang merefleksikan

mobilitas yang diperoleh melalui peningkatan karir yang sukses dalam militer dan pemerintah. Menurut Dick politik kelas menengah secara umum lebih beraneka, baik dalam keluasaan maupun isu dan tekniknya. Pemunculan kelas menengah selalu disertai peningkatan tempo dari politik kelompok kepentingan informal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kesulitan mengidentifikasi nilai kelas menengah menurut Dick disebabkan karena adanya kesamaan sekaligus berbagai perbedaan. Ia mengemukakan adanya suatu komitmen bersama terhadap pembangunan sebagai cara meningkatkan standar hidup, terhadap pemerataan, dan terhadap kemajuan seperti penghargaan, kemajuan karir melalui pendidikan dan pengalaman. Ia juga mengemukakan bahwa berbagai elemen dari kelas menengah menjadi semakin prihatin terhadap ide-ide demokrasi liberal, peraturan hukum dan kebebasan berbicara.

Nilai menurut Dick merupakan hal yang paling sering berubah di kalangan kelas menengah bawah. Di Indonesia, berbeda dengan di Eropa kelas menengahnya yang tergolong rendah tidak dapat membedakan statusnya dengan kelas pekerja, dan secara politis tidak kompak

untuk bertindak konservatif dalam menghadapi ancaman stabilitas politik yang dapat mengganggu mereka. Hal ini bagi Dick disebabkan beberapa faktor, pertama, karena adanya perhatian terhadap para pekerja berpenghasilan rendah dan kelompok buruh harian, maka kelas menengah di Indonesia kurang dapat disebut sebagai kaum borjuis. Kedua, kedekatan secara fisik dalam lingkungan kampung menyebabkan sulitnya mempertahankan perbedaan kelas. Dengan mengutip Mahasin dan Sullivan, Dick menyatakan bahwa para pemimpin kampung memiliki karakteristik orang gedongan yang dapat dilihat dari segi pendidikan, pengalaman dan status. Dari aspek gaya hidup dan partisipasi kehidupan kampung, para anggota kelas menengah bawah semakin mempertegas kesadaran akan kelasnya dan hal itu juga disadari oleh penduduk kampung.

Penarikan diri dari tugas atau gaya hidup kampung dan partisipasi pemeliharaan kampung oleh kelas menengah dapat diterima karena adanya faktor ketiga yang moral dan perpaduan kekuatan agama Islam. Karena hidup di kampung anggota kelas menengah bawah terlalu dekat dengan rakyat, sehingga tidak dapat dengan tenang menerapkan akidah Islam yang lebih liberal dan modern sebagaimana penghuni di luar kampung. Di kampung

kepercayaan beragama tidak dapat dipisahkan dari partisipasi dalam kehidupan kampung. Karenanya kelas menengah bawah terbelah antara sekumpulan nilai yang terbentuk dari cara hidup dan sekumpulan nilai lain yang berasal dari daerah dimana mereka tinggal.

Di Indonesia, kelas menengah menurut Dick bisa berubah memiliki kesadaran sosial. Bila pembangunan berjalan lancar sehingga sanggup mempertahankan standar hidup dan kemajuan kelas menengah, maka kelas menengah atas akan tetap menjadi kelompok penguasa, yang memiliki desakan kepada para profesional dan intelektual di tingkat menengah. Namun bila pembangunan terhenti dan kelompok kelas menengah baru mengalami krisis keyakinan, maka kelas menengah bawah dan anggota tingkat menengah dapat tertarik oleh alternatif seperti Islam radikal dan menunjuk pemimpin bagi pergerakan semacam ini. Namun analisa ini tidak dapat diterapkan pada kelas menengah pedesaan yang secara eksklusif diidentifikasi dengan tingkatan rendah dari kelas menengah.

Perbedaan antara kelas menengah yang rendah di pedesaan dan perkotaan dijelaskan oleh Young (1989) yaitu, tingkat yang rendah di kota, tidak hanya

mendapatkan pemilikan atas alat-alat produksi, namun juga relasi dengan pemerintah dan oleh karenanya lebih merupakan kaum borjuis yang konvensional. Munculnya elit pedesaan dapat menunjukkan konservatisme politik yang tipikal dari kelas menengah bawah di negara lain.

Munculnya kelas menengah di Indonesia menurut Dick bukan merupakan hal yang unik. Terutama bila kelas menengah didefinisikan dalam kerangka pemikiran konsumsi, maka dapat dilihat adanya beberapa persamaan yang menarik dalam hal gaya hidup dan ekspresi dari beberapa nilai yang telah dikenal, bahkan di negara sosialis dimana perangkat produksi dikuasai oleh pemerintah. Di negara dunia ketiga, munculnya kelas menengah sulit dihindari sebagai proses pembangunan. Bagi Dick, kelas menengah nasional hampir tidak berbeda dan bahkan telah diupayakan menginternasionalisasi kelas menengah nasional ini, baik melalui personal maupun media massa. Munculnya budaya internasional juga bersifat kelas menengah. Dan pada akhirnya hal ini memberikan dukungan yang sangat besar bagi perkembangan kelas menengah di negara dunia ketiga seperti Indonesia.

R. William Liddle menilai bahwa kunci bagi keberhasilan Orde Baru adalah developmentalisme yang telah berhasil membentuk pertumbuhan ekonomi dan infrastrukturs sosial dan peningkatan kesejahteraan individual. Keberhasilan tersebut menanamkan kesan mendalam bagi para tokoh, dan seluruh kelas juga kelompok. Fakta tersebut sangat menarik pendukung politik kritis, warga Indonesia berpendidikan menengah yang memenuhi sektor modern dengan proporsi besar berkarya pada birokrasi negara. Yang menarik bagi birokrat pada ideologi developmentalisme adalah sifat paternalistik yang memberikan peran kunci, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks kelas menengah Liddle melihat bahwa banyak kelompok di luar birokrasi yang menginginkan sesuatu dari kelas menengah agar kelas tersebut responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, ekonomi dan kultural mereka. Kelompok-kelompok ini mencakup para usahawan dan profesional kota dari berbagai wilayah yang timbul di masa Orde Baru. Namun mereka juga mencakup kelas-kelas urban lebih rendah, petani kaya baru; penghasil komoditi pertanian seperti gula, tembakau dan kopi; pengusaha industri kecil di kota

kecil dan desa; pemeluk agama yang taat; serta kelompok-kelompok etnik.

Dalam hal aktivitas politik, terdapat proses akomodasi secara tidak memadai dalam sistem klasifikasi yang mempertentangkan otoritarianisme Orde Baru dengan nilai-nilai liberal dari kaum profesional kelas menengah. Bagi Liddle mayoritas kaum profesional dan wiraswastawan pada kenyataannya tidaklah liberal melainkan memiliki kerelaan untuk menjual ketergantungan untuk memperoleh keuntungan lebih besar dari dana negara. Liddle menganjurkan untuk tidak hanya mengkaji politik kaum profesional dan wiraswastawan dalam konteks kelas menengah, namun juga perlu memberi perhatian pada banyak kelompok lainnya. Ia juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam melekatkan pola kelas menengah pada kaum profesional dan wiraswastawan berdasarkan model klasik Barat mengenai bagaimana masyarakat berfungsi dan berubah karena masyarakat Indonesia dan pemerintah Orde Baru tidak cocok dengan model tersebut.

Aswab Mahasin menyepakati bahwa untuk membicarakan kelas menengah di Indonesia penting untuk menyebutkan budaya kelas menengah (*middle class*)

(*culture*) sebagaimana yang dikemukakan H.W. Dick. Mahasin setuju dengan hasil liputan majalah Prisma bahwa asal usul kelas menengah baru di Indonesia adalah dari keluarga priyayi di satu pihak, dan petani kaya dan pedagang-pedagang kecil ekonomi bazar di lain pihak. Keluarga priyayi menjadi sumber rekrutmen, suatu kecenderungan yang paralel dengan dominannya peran negara dalam bidang ekonomi dan pentingnya pendidikan sebagai jalan utama untuk menjadi anggota kelas menengah.

Sedangkan ekonomi bazar menurut Mahasin sulit ditransformasikan menjadi ekonomi model firma. Untuk dapat berperan dalam transformasi tersebut, maka para pedagang kecil ekonomi bazar mengirim anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan ke sekolah-sekolah modern sehingga dapat mendorong mereka masuk dalam keanggotaan kelas menengah. Namun menurut Mahasin yang terjadi bukan transformasi ekonomi bazar ke ekonomi modern melainkan pemborjuisan anak-anak kaum santri atau priyayisasi santri.

Mahasin berpendapat bahwa salah satu hasil utama gerakan modernis Islam adalah munculnya generasi muslim baru yang berpendidikan modern dan meniti jalan

ke dalam pranata-pranata modern dan gaya hidup kelas menengah. Perkembangan ini mulai terlihat pada demonstrasi mahasiswa tahun 1966, visi pembaruan oleh Nurcholis Madjid dan munculnya musik pop bertema keagamaan pada awal tahun 1970-an.

Menurut Mahasin lapisan menengah atas kelompok santri priyayi ini adalah anggota borjuasi negara, mereka yang menduduki posisi penting dalam berbagai jabatan negara. Banyak dari mereka adalah bekas aktivis mahasiswa yang meniti posisi strategis melalui sistem patronase. Anggota lainnya adalah rekrutmen baru melalui akses alumni dan organisasi mahasiswa berdasarkan pada loyalitas kelompok santri. Di sektor kaum borjuasi negara terdapat pengusaha yang hidup dengan dukungan dan koneksi negara.

Lapisan selanjutnya yaitu lapisan menengah tengah adalah kaum profesional seperti para eksekutif, manajer, ahli teknik, konsultan, akuntan dan pengacara. Mereka menduduki posisi karena keahlian dan pendidikan dan tidak secara langsung melalui sistem patronase birokrasi negara. Dalam lapisan ini juga dimasukkan kaum intelektual dan masyarakat pers, kaum profesional bebas seperti pengacara dan dokter, fungsionaris LSM, juga P

dengan eselon tiga dan empat dalam birokrasi. Lapisan menengah bawah meliputi seluruh kelas menengah bawah urban seperti pegawai negeri rendahan, usahawan kecil, buruh pabrik, dan mereka yang bekerja di bidang angkutan dan jasa urban lainnya. Kategori di atas diakui Mahasin merupakan kategori yang acak namun cukup masuk akal jika melihatnya dengan kriteria seperti tingkat pendapatan, pola konsumsi dan gaya hidup tertentu.

Menurut Mahasin lapisan atas biasanya tinggal di wilayah pemukiman kota yang bagus, lapisan menengah bawah tinggal di kampung-kampung atau wilayah pemukiman baru yang murah. Lapisan menengah tengah hidup diantara keduanya, yakni rumah-rumah bagus di kampung atau di perumahan murah dengan rumah tembok, berpenghasilan tetap dan menikmati kehidupan yang layak. Namun bagi masyarakat kampung, semua kelas menengah termasuk lapisan bawah digolongkan ke dalam masyarakat gedongan, yakni yang tinggal di rumah tembok, berpenghasilan tetap, berpendidikan baik dan menikmati kehidupan yang layak. Jika mereka tinggal di kampung, mereka termasuk dalam kelompok yang beruntung dan menjadi pemimpin informal.

Ketika mengalami priyayisasi, anggota kelas menengah santri mengubah sebagian pandangannya. Lapisan menengah atas cenderung menjadi sangat pragmatis, karena kepentingan mereka tertanam sangat kuat dalam sistem yang ada, mereka cenderung mempertahankan status quo. Mereka memilih untuk bersikap lebih harmonis, menerima sistem secara damai, kurang radikal dan kurang fanatik terhadap umat, karena mungkin mendelegitimasi posisi representasi mereka di dalam sistem. Dalam pembauran mereka dengan para birokrat, kelompok Cina dan mitra internasional mereka menjadi lebih kosmopolitan dan *amorphous* (menghilangkan ikatan komunal masa lalu), dan lebih toleran.

Dalam gaya hidup mereka secara hati-hati meniadakan simbol-simbol kelas menengah dengan pola konsumsi yang vulgar, urban dan gaya patronase. Tetapi ke dalam (internal), mereka cenderung bertahan dan memelihara solidaritas kelompok santri, baik untuk menjamin posisi representatif yang mereka pegang maupun untuk memperkuat pengendalian internal mereka. Mereka memiliki lobi yang kuat untuk mengurus organisasi mahasiswa dan lembaga umat yang lain, untuk

memastikan tidak ada gejala radikalisme muncul ke permukaan dan untuk menjamin bahwa hanya pemimpin yang direstui yang dapat dipilih untuk tingkat nasional.

Bagi lapisan menengah tengah, lapisan atas dianggap sebagai agen birokrasi daripada sebagai wakil umat. Lapisan menengah ini menjadi kurang radikal karena mereka telah belajar mengenai akibat radikalisme yang prematur dan tidak menginginkan terulang kembali. Mereka juga belajar banyak mengenai akibat dari sikap non kompromis dan tidak mengunggulkannya cita-cita negara Islam. Mereka mulai menghargai kerangka negara bangsa (*nation state*). Hal ini sejalan dengan runtuhnya tema Islam universal dan munculnya Islam Indonesia sebagai sesuatu yang khas dan merupakan ekspresi keagamaan yang sah secara historis. Mereka berkembang menjadi liberal. Agama menjadi terbuka terhadap berbagai interpretasi dan tidak ada satu lembaga dan juga tidak ada negara yang memiliki wewenang untuk memaksakan interpretasi tunggal.

Hal ini berarti merupakan berakhirnya konflik antara keyakinan Islam tradisional dan modernis, dan juga menghapus garis pembatas antara abangan dan santri yang berketuhanan, yang selama bertahun-tahun menjadi akar

perselisihan ideologi aliran. Islam liberal dan inklusif sedang terbentuk, karena berusaha meninggalkan isolasi dan situasi minoritas kuat yang melingkupinya. Dengan partai politik yang menjadi disfungsi karena rekayasa politik, kelas menengah santri berupaya memelihara hubungan mereka dengan umat melalui berbagai lembaga dan organisasi keagamaan juga LSM.

Aturan yang ada selama ini telah membuat lapisan menengah tengah terlihat malu-malu, mereka mengkritik tetapi dengan cara yang kelihatannya konstruktif dan non oposisi. Mereka tetap mengambil jarak dengan kelompok yang berkuasa, dan menghindari bentuk kooptasi untuk mempertahankan legitimasi mereka di mata masyarakat, meskipun mereka berbuat ini dengan cara sedemikian rupa agar tidak diinterpretasikan oleh kelompok elit sebagai pihak yang menentang. Dalam situasi yang sulit mereka mungkin ragu-ragu dan tidak tegas.

Kelompok radikal Islam menurut Mahasin sedikit jumlahnya, namun cukup efektif dalam mengendalikan jaringan jamaah mesjid tertentu. Melalui pertemuan keagamaan dan latihan, mereka berupaya memperluas pengaruhnya diantara pelajar mahasiswa dan generasi muda yang memerlukan spiritualitas dan alternatif yang

jelas. Panggilan untuk kembali pada ajaran dasar keagamaan telah memberi kepastian di tengah perubahan sosial yang membingungkan. Mereka tidak mendukung visi-cita negara Islam, tetapi mengaspirasikan ketaatan terhadap doktrin Islam di masyarakat. Dengan mempertunjukkan gaya dan simbol tertentu, seperti memakai jilbab bagi perempuan, mereka terlihat memproyeksikan aura sosial keagamaan melawan negara sekuler, dan kadang melakukan reaksi keras ketika aparat negara menanggapi berlebihan apa yang diperkirakan sebagai tanda-tanda kebangkitan Islam.

Kelas menengah santri belum mengartikulasikan ideologi yang sungguh-sungguh atau tema yang konsisten. Mereka hanya sekedar bereaksi terhadap isu-isu dan kebijaksanaan yang mereka anggap memojokkan atau mengancam umat. Mereka berupaya membangun citra kejujuran, puritan dan kepahlawanan baru yang berani dalam menghadapi sistem yang ada. Ini adalah cara perlindungan mereka melawan rasa tak aman, perpecahan dan persaingan keras di wilayah urban. Radikalisme dan ekstremisme muncul didorong atau dirangsang oleh suasana isolasi yang sistematis dan kekerasan yang repetitif. Persaingan antara pihak yang moderat dan radikal

dalam mengolah ketidakpuasan umat yang later bersamaan dengan tindakan pemerintah yang lunak atau keras, akan menentukan bentuk dan corak gerakan umat selanjutnya. Jika tekanan meningkat, pihak radikal akan memperoleh banyak pengikut, sebaliknya jika persuasi dan tindakan lunak yang dipilih, maka pihak moderat akan lebih banyak didengar.

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa masalah agak sulit untuk berbicara mengenai kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, tulang punggung kelas menengah bukanlah kelompok pengusaha, seperti pada kasus di banyak negara lain, melainkan kaum kelompok profesional, pegawai negeri dan para pejabat bahkan kaum akademisi. Wahid melihat tidak adanya diferensiasi yang tegas tentang kelas menengah di Indonesia.

Pada masa lalu menurut Wahid, kelas menengah Islam di pedesaan dapat diidentifikasi sebagai petani kecil dan pedagang dan di perkotaan adalah pengusaha batik, pengusaha rokok kretek; kerajinan kulit, perak dan emas. Watak pengusaha kelas menengah Islam sangat jelas bertentangan dengan kelas penguasa tradisional dan hampir dalam segala hal. Perbedaannya sama dengan perbedaan antara kelas penguasa tersebut dengan kelas

menengah keturunan Cina. Meskipun kelompok ini tidak kehilangan perspektif budaya, kecil kesamaan antara kelas menengah Islam dan kelompok penguasa asli sehingga respon yang sama terhadap kekuasaan politik, dominasi ekonomi dan penetrasi budaya Barat tidak dapat tumbuh.

Ketika pendekatan politik para ulama oposan gagal untuk mencapai tujuan dasarnya yakni membentuk suatu negara Islam, kelas menengah Islam kemudian mengembangkan respon ganda terhadap kekuasaan kolonial yaitu bergabung dengan perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan yang dipimpin oleh apa yang disebut pemimpin nasionalis, tetapi pada saat yang sama juga secara budaya mengambil jarak dengan kelompok asli yang lain. Mereka memelihara suatu identitas budaya independen untuk kaum Muslim demi menguatkan respon yang berakibat digunakannya agama Islam sebagai perlawanan politik maupun budaya terhadap kekuasaan kolonial. Ketika mereka memasukkan anak mereka ke sekolah berpendidikan Barat, yang ditolak elit ulama, kelas menengah Islam bersikeras untuk mempertahankan identitas budayanya dengan menyediakan sendiri bacaan (diwakili Hamka dan lainnya), kesenian (diwakili kaligrafi

Arab dan bukan lukisan) dan pendidikan (diwakili sekolah Islam modern).

Tidak lama sebelum dan sesudah kemerdekaan kelas menengah Islam menuntut diresmikannya ajaran Islam sebagai ideologi politik negara atau hukum negara. Mereka mendukung pemimpin politik yang memiliki komitmen yang sama, mereka mendukung pemimpin politik seperti M. Natsir, A. Wachid Hasyim dan Abikusno Tjokrosujoso. Dalam perkembangannya terdapat kondisi yang mematenkan aspirasi formalisasi Islam dalam kehidupan negara. Keadaan ini dibarengi dengan matinya kelompok pengusaha Muslim dan munculnya kelompok profesi, pegawai negeri, kaum intelektual dan pejabat militer sebagai tulang punggung kelas menengah Islam. Kelompok ini mulai memasukkan kembali peranan Islam dalam kehidupan anggotanya.

Berbagai kelompok Islam melakukan strategi untuk meresmikan ajaran Islam sebagai ideologi atau hukum negara. Yaitu, dengan mengidealisasikan Islam sebagai satu-satunya sistem sosial yang mampu memelihara demokrasi sejati, kesetiaan pada hukum dan keadilan ekonomi. Proses Islamisasi dalam kehidupan seluruh bangsa digunakan untuk mengangkat gagasan tentang

suatu masyarakat Islam di Indonesia. Strategi perjuangan bagi masyarakat Islam dengan sendirinya bersinggungan dengan strategi lainnya.

Bagi kelompok lunak, Islam memainkan peran penting dalam kehidupan bangsa karena penganut Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Peran yang harus dimainkan Islam bukan diambil dari idealisasi Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi situasi yang ada, namun lebih sebagai dasar inspirasi bagi kerangka nasional masyarakat demokratis. Dengan demikian menurut Wahid, Islam bukanlah suatu alternatif bagi sistem sosial yang lain, melainkan suatu faktor pelengkap diantara faktor-faktor lain dalam kehidupan bangsa. Islam bukanlah suatu perintah yang harus diterima secara otomatis, melainkan satu diantara banyak pilihan yang tersedia untuk membangun masa depan. Diantara dua pilihan ini, Islam sebagai sistem sosial dan Islam sebagai faktor pelengkap, kelompok menengah Islam belum jelas akan memberikan jawaban kelompok yang mana.

B. Catatan Kritis

Pembahasan tentang kelas menengah di Indonesia serantiasa menimbulkan kesulitan bagi wawasan teoritis dan politis Barat. Disiplin ilmu Barat yang mapan yang

mencakup abstraksi yang diderivasi dari formasi sosial yang jelas dari kondisi Barat yang selama ini dijadikan rujukan para ahli namun berbeda dengan kondisi negara Indonesia menyebabkan kesulitan dalam menulis tentang formasi kelas di Indonesia. Tidak bisa dielakkan sejumlah tulisan dalam buku ini mengalami tumpang tindih akibat kesulitan empiris dan teoritis dalam menggambarkan elemen-elemen kelas ini, sehingga konsensus tentang batas-batas sosiologis kelas menengah belum bisa ditarik.

Buku ini menurut Ariel Heryanto dalam pengantar kritisnya menyatakan sangat penting karena pertama, buku ini adalah buku pertama yang secara khusus membahas kelas menengah di Indonesia. Kedua, buku ini merencanakan kerja sejumlah sarjana yang menggeluti persoalan kelas menengah di Indonesia dari berbagai segi. Meskipun dianggap kurang terpadu karena ditulis banyak orang dengan wawasan yang berbeda, namun buku ini memiliki mutiara dalam khazanah intelektual pemikiran di Indonesia. Heryanto mencatat bahwa gabungan antara pemikiran, perdebatan, data empiris dan pembalasan teoritis dalam buku ini belum utuh atau memiliki kesimpulan akhir. Yang ketiga, buku ini datang dari Australia, dimana sebelumnya telah cukup lama

tentang Indonesia berada di bawah bayang-bayang dominasi pusat kajian Amerika.

Dalam pengantar kritisnya tentang buku ini Ariel Heryanto mengkritik pandangan Richard Robison tentang kelas menengah Indonesia dalam buku ini. Robison yang selama ini berada dalam garis terdepan dalam pergumulan dengan teori kelas sosial Indonesia mutakhir menurut Heryanto berada dalam tahap ragu-ragu. Robison menurut Heryanto tidak mengajukan sebuah posisi konseptual atau teoritis terpadu yang bisa ditimbang, disetujui atau ditolak. Ia baru mengemukakan sejumlah pertanyaan dengan bobot konseptual dan teoritis.

Menurut Heryanto, Robison ingin memisahkan kelas kapitalis dari kelas menengah tetapi tidak menemukan posisi yang pas untuk menempatkan kelas menengah dalam peta struktur kelas Indonesia. Karena penampilan kelas menengah di Indonesia (pejabat, manajer, profesional dan intelektual) menurutnya konservatif dan berpihak pada penguasa, Robison menempatkan kelas menengah ini diantara kelas atas sebagai petugas politik, ekonomi, sosial dan perangkat ideologis bagi kapitalisme di Indonesia. Dalam pengantarannya, Robison mengemukakan di Indonesia

hanya ada satu struktur sosial, yaitu kapitalisme, hanya ada satu tata produksi. Sehingga hanya ada dua kelas sosial di Indonesia yaitu kelas kapitalis dan pekerja. Namun ia menghadapi kesulitan konseptual. Ia berupaya menempatkan kelas menengah diantara kelas kapitalis dan kelas pekerja, namun ia sadar tidak pas.

Bagi Heryanto, diantara sejumlah kelas menengah (dari berbagai tata produksi yang kurang dominan), yang paling penting adalah kelas menengah dari tata produksi yang semakin lama semakin kokoh karena didukung oleh kekuatan produksi semakin lama semakin kuat. Posisinya dalam masyarakat kapitalis mutakhir, kelompok ini diidentifikasi sebagai kaum terpelajar kota dengan para kaum profesional, manajer, para ahli, dan tokoh intelektual yang tidak terikat dengan lembaga manapun. Mereka merupakan kelas atas dalam tata produksi yang baru dominan, yang memiliki produktivitas dan mengandalkan pengetahuan dan keterampilan.

Kelas menengah menurut Heryanto bukanlah kapitalis kecil atau proletariat besar. Kelas menengah tidak didefinisikan secara universal dengan kategori abstrak seperti jenis pekerjaan, tingkat pendapatan atau gaya hidup, tapi dalam hubungan sosial (antar kelas dan

produksi) yang spesifik dan tidak statis dalam sejarah. Dalam pemetaan ini, tidak akan dicari kelas menengah berdasarkan jumlah gaji, harta atau pola konsumsi yang diperkirakan berada di tengah-tengah kelompok lain yang berlebih (kelas atas) dan mereka yang kekurangan (kelas bawah).

Dengan mengutip teori kelas menengah klasik, Heryanto mengemukakan bahwa di Eropa abad 11, kaum borjuis sering diakui sebagai generasi pertama kelas menengah. Mereka juga disebut kelas menengah lama untuk dibedakan dengan kelas menengah baru yaitu kaum profesional, intelektual serta manajer. Sebagai kelas menengah lama, kaum borjuis bukanlah tuan tanah atau bangsawan dengan pemilikan tanah atau hak kebangsawanan menengah. Mereka juga bukan budak dengan pangkat lebih tinggi dari budak lain. Kedudukan mereka bukanlah diantara kelas atas dan kelas bawah, namun menurut Heryanto berada di samping atau di luar batasan dua kelas itu. Mereka anti bangsawan yang sedang berkuasa dan juga anti pranata kekratonan dan perbudakan. Berkat revolusi kapitalisme berhasil naik kelas dalam tata produksi baru.

Heryanto berpendapat bahwa banyak ahli yang menyamakan kelas menengah sebagai borjuasi karena kaum borjuis dalam tata masyarakat feodal aristokrasi pernah menjadi kelas menengah di Eropa. Hal itu menurutnya dapat diterima sepanjang memakai asumsi dasar bahwa tata produksi kapitalisme bukanlah tata produksi yang dominan dalam tata sosial Indonesia. Banyak terdapat kerancuan dalam memahami apa itu kapitalisme. Tidak adanya borjuasi yang kokoh di Indonesia sering dijadikan dasar tidak adanya kelas menengah atau dikatakan tidak ada kelas menengah sejauh seperti kapitalisme Indonesia dianggap kurang sejati. Jika borjuasi sebagai kelas menengah dianggap ada maka sulit mencari kelas atas karena mengabaikan kemajemukan tata produksi.

Di negara kapitalisme dunia, borjuasi telah menduduki kelas atas dalam poros modal buruh. Dengan mengutip Immanuel Wallerstein, Heryanto menyatakan mereka adalah kelas yang sibuk mengaristokraskan diri. Di negara pinggiran tumbuh kelas atas lewat birokrasi negara (militeristik) dan rakyat sipil. Bagi Heryanto militer pada masa Orde Baru yang menguasai perusahaan nasional besar tidak dapat dianggap sebagai borjuasi sejauh

keangkuhan dogmatis menurut Heryanto mendorong para sarjana menciptakan istilah kapitalisme semu atau kelas menengah dalam arti yang bukan sebenarnya.

Oleh karena itu menurut Heryanto penulis buku ini seperti Daniel Lev, William Liddle dan Howard Dick mungkin mampu membedakan kelas menengah dari kelas bawah namun akan kesulitan membedakan kelas menengah dari kelas atas. Mereka mencari kelas menengah diantara elit dan rakyat jelata. Sedangkan Robison sibuk membedakan kelas atas dan menengah sehingga kelas bawah menjadi lenyap. Heryanto menyatakan jika pemikiran tersebut dapat diterima, tidak perlu memaksakan menempatkan kelas menengah diantara satu dari dua kelas dalam struktur kapitalisme. Tidak perlu menambah jumlah kelas sosial dari dua menjadi tiga (atas-tengah-bawah) sebagaimana kaum Weberian. Yang perlu hanya melihat majemuknya struktur kelas dalam masyarakat kontemporer seperti Indonesia.

Heryanto menilai William Liddle mereduksi kemajemukan struktur sosial Indonesia yang menolak uraian Robison dan melihat Indonesia sebagai masyarakat kapitalistik uang, dan melihat Indonesia sebagai masyarakat patrimonial. Ia melihat ada kerumitan dalam

peta struktur kelas sosial Indonesia yang memasukkan persoalan militer, etnis, agama dan gender. Howard Dick dalam tulisannya di buku ini dikritik. Heryanto memperlakukan kelas menengah sebagai bagian yang bisa menarik untuk diteliti sebagai salah satu dari banyak kelas sosial sebagaimana pengikut Weberian. Menurut Heryanto, berbeda dengan kaum Weberian, kaum Marxis melihat perbedaan kelas tidak hanya menunjukkan perbedaan kepentingan, namun juga pertentangan kepentingan. Hubungan antar kelas sebagaimana dijelaskan E.O. Wright, bukan saja menunjukkan dominasi (yang satu lebih kuat dari yang lain), tetapi eksploitasi (yang satu bisa kuat selama bisa menghisap yang lemah). Karena itu kelas tidak bisa dibahas terlepas dari kaitannya dengan kelas lain.

Ariel Heryanto menyatakan bahwa untuk memahami kelas menengah secara konseptual dan teoritis, maka perlu untuk membicarakan politik, ideologi dan gaya hidup kelas menengah. Karena menurut Heryanto tidak ada kelas sosial yang seragam. Untuk memahaminya, menurut Heryanto dapat menggunakan dua pendekatan Wright, *pertama*, melihat kepentingan material kelas yang pada gilirannya dibatasi oleh kedudukan kelas

dalam struktur kelas sosial secara umum, yang terbentuk akibat proses dan hubungan sosial dalam produksi dan reproduksi masyarakat. Kedua, menurut Wright secara struktural berbagai kelompok yang biasa disebut kelas menengah mempunyai kedudukan kelas yang tidak persis sama. Maka menurut Heryanto ada sebutan kelas menengah sebagai kata benda jamak (kelas-kelas menengah), perbedaan mereka juga dapat disebut sub kelas.

Kaum manajer pada perusahaan swasta, mempunyai kedudukan yang berbeda dari pegawai negeri, berbeda dengan seniman, pemuka agama atau perwira militer. Diantara mereka, manajer perusahaan paling layak disebut kelas menengah dalam pengertian berada diantara dua kelas utama dalam produksi kapitalisme, yaitu pemodal dan pekerja. Manajer dalam kategori umum kelas menengah, bisa terlibat dalam struktur eksploitasi yang tidak berporos produksi pemodal pekerja. Para kelas menengah ini mengenali basis kekuasaan baru, kepentingan material sendiri, dan membayangkan sebuah struktur produksi baru yang mengandalkan kemampuan organisatoris (manajer), pengetahuan, ijazah, informasi,

wacana, dan kewenangan (profesional dan intelektual) atau politik birokrasi (pejabat negeri) sebagai aset utama.

Politik kelas menengah menurut Heryanto sebagaimana kelas lain berpihak pertama-tama dan terutama kepada kepentingan material mereka sendiri. Ideologi dan corak politiknya bukan menjilat kekuasaan kelas atas atau berkorban untuk kesejahteraan kaum tertindas di kelas bawah. Banyak dijumpai aneka corak penampilan dan perilaku. Mereka kadang-kadang bisa tampil sebagai oportunis politik atau ekonomi, penjiplak plan, pejuang hak-hak asasi dan tertib hukum dan bahkan aktivis radikal. Banyak ahli yang membayangkan kelas menengah (lama atau baru) di Indonesia seperti di Barat yang berwatak progresif untuk memperdebat konservatisme kelas menengah di Indonesia. Padahal banyak ahli Barat borjuis Eropa adalah penjiplak kelas atas sebelum mereka mampu menggulingkan kekuasaan tersebut.

Daniel Lev dalam buku ini berupaya melacak dan memahami pertumbuhan kelompok terpenting dalam kelas menengah Indonesia (kaum profesional). Ia menyatukan majemuk dan fragmenternya kelas menengah di Indonesia. Ia menghindari istilah kelas karena istilah ini dianggap

terlalu merepotkan, ia menyebut kelompok atau golongan menengah. Ia memperhitungkan berbagai sisi yang serba tidak pasti dan campur aduk dalam sejarah hubungan kelompok ini dengan negara. Ia menghindari generalisasi yang berlebihan yang menyesatkan. Lev ragu menyebutnya sebagai kelas dan tidak mengembangkan analisa kelas, namun data dan uraiannya merupakan sumbangan penting untuk konstruksi teori lebih lanjut. Menurut Heryanto yang perlu diwaspadai dari uraian Lev adalah empati yang terlalu besar dari kelompok yang dibahasnya, walau sudah menjaga jarak, Lev memiliki kecenderungan tergoda berpihak pada kepentingan kelompok ini. Lev tidak seperti penulis lain yang mencemooh sikap konservatif perilaku kelas menengah Indonesia.

Lev tertarik dengan tarik menarik yang halus antara ideologi dan kepentingan, serta hubungan antara negara dan masyarakat dan bentuk-bentuk legitimasi. Dengan menyebut kelompok perantara dibanding kelas menengah Lev berusaha melihat sejarah dari kaum profesional, birokrat dan pengusaha. Perhatian Lev pada kaum profesional memungkinkan dia untuk menjelaskan saling hubungan fungsi dan kepentingan masing-masing antara

ekspansi yang sangat cepat dari kapitalisme dengan kelompok profesional legal, komersial dan teknis yang melayani dan memfasilitasi pertumbuhan tersebut.

Kesamaan yang dilihat Lev dari ekspresi yang berbeda-beda dari kelas menengah yang heterogen pada dasarnya adalah tuntutan akan adanya masyarakat sipil yang mampu menandingi hak-hak istimewa negara. Menurut Tanter dan Young, hak-hak privasi dan tuntutan akan perlunya pembatasan atas kekuasaan negara dalam suatu tradisi politik yang statis dan kolektivistis merupakan bagian penting perdebatan oleh pemimpin negara pada masa kemerdekaan seperti Soepomo, Yamin dan Hatta. Bagi kaum muslim Indonesia, yang secara historis menjadi pusat diskusi mengenai kelas menengah, sebagaimana dikatakan Lev, mulai menanamkan kesan pada sensibilitas Islam, tentang ketidakmungkinan hegemoni politik Islam dan kebutuhan untuk melindungi Islam dari negara yang tidak bisa dikontrolnya.

Robison menggabungkan kaum pejabat, manajer profesional dan intelektual dalam satu kategori besar kelas menengah. Robison menempatkan semua kelompok ini ke dalam kategori fungsionalis yang sama, yakni sebagai kategori tangan kapitalis. Seolah-olah mereka tak punya

kepentingan kelas tersendiri, walau kepentingan itu mungkin untuk sementara dan untuk sebagian dapat terpuaskan dalam status quo Indonesia. Penyederhanaan ini sangat merugikan, karena kolaborasi dan pertentangan antar sub kelas menengah Indonesia merupakan bagian terpenting dari dinamika kelas, reproduksi dan perubahan sosial. Reduksionisme Robison menurut Heryanto tidak memungkinkan untuk penjelasan serius tentang gejala radikalisme di kalangan kelas menengah.

Berbeda dengan Robison, William Liddle menggambarkan konservatisme politik kelas menengah Indonesia secara esensial. Seakan-akan konservatisme merupakan jatidiri, watak, kepribadian, nilai budaya atau kebudayaan Indonesia. hal itu menunjukkan seolah-olah masyarakat secara esensial suka cita menerima tata politik yang otoriter dan tata ekonomi yang pincang. Banyak para ahli baik dari Indonesia maupun asing yang berpandangan seperti ini dan dikecam sebagai orang yang tak memahami realitas Indonesia, etnosentrik dan memaksakan kerangka berpikir Barat. Tanter dan Young mengingatkan perlunya memperluas pembahasan kelas menengah Indonesia dalam jaringan ekonomi global dan *rentier-militarist state*.

Richar Tanter dan Kenneth Young berpendapat bahwa pembahasan Howard Dick tentang kelas menengah dalam buku ini merupakan sumbangan dalam analisis mengenai kelas konsumsi. Perhatian Dick yang luar biasa mengenai kategori konsumsi menunjukkan adanya hubungan relasional, dimana pilihan keluarga kelas menengah dalam gaya hidup baru memiliki implikasi terhadap hubungan mereka dengan masyarakat. Bagi Dick pola konsumsi adalah masalah kesadaran kelas dalam tindakannya, yang merupakan artikulasi ideologis rasional namun memperlihatkan dan meyakinkan bagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri dan orang di sekitarnya.

Sedangkan Francisia Seda berpendapat bahwa tulisan Daniel S. Lev, Richard Ranter dan Kenneth Young secara implisit menekankan harapan bahwa kelas menengah Indonesia yang makin berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru, yang terdiri dari kelompok wiraswasta, birokrasi dan kaum profesional dapat menjadi pelopor dan pengambil inisiatif untuk membawa dan mengusung politik Indonesia setelah (beyond) Orde Baru. Lev menurut Seda terpengaruh pemikiran Benedict Anderson yang membedakan antara masyarakat (society) dan negara (state). Kelas menengah sebagai bagian dari

masyarakat akan selalu menuntut hak-hak prerogatif negara. Dalam jangka panjang, pertentangan antara society dan state dapat menggerogoti legitimasi dan keabsahan pemerintahan Orde Baru.

Seda juga melihat adanya urban bias dalam beberapa tulisan dalam buku ini yaitu kecenderungan penekanan pada masyarakat perkotaan dalam membicarakan kelas menengah Indonesia. Dengan mengutip pandangan Kenneth Young ia mengemukakan gambaran kelas menengah pada masyarakat pedesaan yang berbeda dengan kelas menengah pada masyarakat perkotaan. Kelas menengah pedesaan menurut Young cenderung mendukung pemerintah dibanding kelas menengah perkotaan dan tidak terlalu banyak menuntut. Seda menyimpulkan beberapa penulis bersikap pesimistis dan mempertanyakan seberapa jauh implikasi menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat anjloknya harga minyak di pasaran dunia dan resesi terhadap pertumbuhan kelas menengah Indonesia dan kesinambungan Orde Baru.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan tentang kelas menengah Indonesia dan tidak berusaha menjajaki lebih jauh kompleksitas struktur kelas di Indonesia ataupun politik secara umum. Sebagaimana dikatakan Lev

dan penulis lainnya bahwa terdapat seperangkat anggapan politik yang terbangun menyangkut kelas menengah atas yang berasal dari interpretasi Wright tentang peranan progresif yang dimainkan oleh munculnya kaum Borjuasi dalam sejarah Eropa. Namun apakah dengan mencontoh sejarah Eropa merupakan suara sumbang dan penegasan kaum buruh. Mungkin tidak masuk akal untuk membicarakan kelas buruh ketika kelas menengah atas saja diidentifikasi dan pembahasannya baru saja dimulai.

Hubungan sosial sehari-hari kelas menengah menurut Tanter dan Young biasanya terangkai sebagai sumber mata pencaharian bagi orang, hubungannya dalam beberapa hal sama penting dengan hubungan antara kelas menengah dengan negara atau dengan kelas kapitalis yang sedang bangkit. Hubungan kelas ini juga menyumbang pada terjadinya bentuk kesadaran dan sensitivitas politik kelas menengah.

Akhirnya, para penulis buku ini menurut Heryanto tidak mencari jawaban sikap konservatisme kelas menengah Indonesia dengan analisa kelas menengah mengaitkannya dengan kepentingan material yang bersifat struktural. Mereka tidak mempertimbangkan kondisi

kesejarahan yang membuka atau menindas peluang kelas ini untuk mengoptimalkan kepentingan mereka sesuai keunggulan komparatif (aset eksploitasi) yang mereka miliki masing-masing.

BAB III

RICHARD ROBISON: KELAS MENENGAH ASIA TENGGARA DAN INDONESIA

Bab ini berisi tentang pandangan dan tulisan Richard Robison mengenai kelas menengah di Asia Tenggara serta lokasinya tentang tumbuhnya kapitalisme di Indonesia. Pada dua dekade yang lalu, antara tahun 1960 hingga tahun 1970-an, gambaran Barat tentang wilayah Asia Tenggara banyak dipenuhi oleh petani dan sawah, kudeta militer serta kekuasaan besar para jenderal militer. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Namun lama kelamaan gambaran tersebut berubah dengan ikon baru wilayah Asia Tenggara seperti buruh pabrik dan pengusaha, politisi serta banyaknya kemacetan lalu lintas. Gambaran tersebut setidaknya muncul di Australia sebagai sebuah negara yang selama ini dianggap merepresentasikan negara Barat di kawasan Asia.

Gambaran baru yang muncul dari wilayah Asia Tenggara adalah daerah tertinggal yang membutuhkan bantuan negara Barat untuk mengembangkan industri yang menawarkan peluang tak terbatas untuk perdagangan dan investasi dan juga merupakan ancaman potensi ekonomi untuk

pekerjaan dan bisnis di negara Barat. Mengingat maka meningkatnya tingkat relokasi produksi industri dari negara-negara seperti Australia ke Asia Tenggara. Upah pekerja yang rendah di negara Asia Tenggara dalam hal produksi dan investasi dan juga pabrik atau perusahaan menimbulkan kecemasan.

Gambaran baru negara Barat tentang Asia Tenggara yang muncul yang penting adalah tentang berkembangnya kelas. Munculnya kekuatan sosial ekonomi baru di Asia Tenggara disambut sebagai pasar konsumen baru yang luas oleh negara industri maju yang mengalami resesi dan tingkat pertumbuhan yang rendah akibat tekanan ekonomi. Negara Barat dan Jepang berebut untuk menangkap peluang ekonomi dalam bidang otomotif, komputer, makanan, pelayanan pendidikan, film dan industri televisi.

Namun gambaran kelas menengah baru di Asia berbeda dan bahkan melampaui visi konsumen baru yang selama ini digambarkan Negara Barat. Kelas menengah baru di Asia digambarkan sebagai pekerja keras, berbeda dengan di Barat yang diikuti oleh kemerosotan moral dan berbagai hal negatif di Barat. Lee Kuan Yew memberikan penekanan untuk berhemat, disiplin, seiring dengan cita-cita stabilitas dan ketertiban yang diinginkan yang merupakan ciri masyarakat

kelas menengah. Dalam masyarakat kelas menengah Asia, kaum konservatif Barat ingin mengambil kembali hilangnya essentialisme Barat beserta nilai-nilai yang dibawanya.

Namun kaum liberal Barat mendapat pesan yang berbeda dari kelas menengah baru Asia. Menurut kaum pluralisisme liberal ortodoks, kaum borjuis dan kelas menengah dianggap sebagai pembawa modernitas dan budaya rasional yang menekankan pentingnya kepentingan individu. Mereka adalah musuh alami dari sistem politik dan sosial yang didasarkan pada warisan, kekuasaan yang sewenang-wenang dan hubungan politik yang mengutamakan kelompok dan nasional. Berdasarkan definisinya mereka adalah pemenang pasar bebas, reformasi liberal dan politik demokrasi. Bagi kaum liberal, kelas menengah adalah mereka yang turun ke jalan di Manila dan Bangkok untuk menggulingkan rezim otoriter dan mengantar reformasi demokrasi sebagaimana yang mereka lakukan di Lapangan Tiananmen. Kelas menengah baru adalah mereka yang memimpin gerakan baru untuk HAM dan lingkungan hidup, memproduksi film satirif dan berjuang untuk menghasilkan pers yang penting dan kritis. Dengan kata lain, mereka melihat kelas menengah baru melakukan peran historis yang sama sebagaimana yang dilakukan dalam mitologi liberal di Barat.

Dalam kenyataannya, kedua pandangan tersebut dapat benar dan juga salah. Sebagaimana yang dilakukan di Eropa, kelas menengah Asia mendukung variasi budaya, filosofi sosial dan politik dan tindakan. Di Singapura, sebagian besar dari kelas menengah di masyarakat adalah terutama konstituen kelas menengah yang mendukung rezim hierarki dan konformis sosial politik sebagaimana gambaran Orwellian. Dukungan untuk institusi korporatis dan statis organisasi rezim orde baru Suharto merupakan substansi dari kelas menengah Indonesia. Pada saat yang sama, kepemimpinan gerakan fundamental religius di Malaysia, Indonesia dan Filipina dapat dikategorikan sebagai dominasi kelas menengah. Di akhir spektrum, kenaikan jumlah gerakan progresif mendorong reformasi politik, sistem administrasi dan hukum, menekankan akuntabilitas negara dan para pejabatnya, hak asasi manusia yang lebih baik dan kebebasan dan penegakan hukum juga merupakan bagian gerakan kelas menengah yang penting.

Namun kontradiksi ini tidak menunjukkan kasus massal dari kegilaan sosial atau identitas sosial dan tindakan mereka tidak disengaja, kebetulan atau kacau. Sebaliknya, mereka sebagian berasal dari fakta bahwa kelas menengah luas secara internal berbeda kategori sosial dengan kepentingan dan hubungan dengan kekuatan sosial dan politik lainnya. Berbeda

terutama dengan kategori ini adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan kaum profesional kaya perkotaan, manajer sektor publik dan swasta yang berkuasa, para birokrat baru, dan tentara dengan gaji minim, guru dan intelektual dan perempuan. Dan ini tercampur dengan bagian atas kelas korporat kapital dan bagian bawah spektrum hingga ke kaum borjuis kecil dan kelas pekerja.

Peran sejarah dari kompleksitas elemen-elemen adalah mereka turun dan merubah susunan kekuatan sosial dan politik dan aliansinya. Di Indonesia, negara yang kuat memainkan peran penting dalam proses industrialisasi kapitalis dan dominasi aparat adalah variasi unsur-unsur kelas menengah yang mempertimbangkan pilihan sosial politik mereka dan membentuk aliansi mereka. Berbeda dengan lingkungan korporatis otoriter, kelas menengah Filipina berada dalam sistem oligarki keluarga yang kuat dimana kekayaannya dibangun di negaranya. Dalam beberapa kasus lain, unsur-unsur kelas menengah bersekutu dengan partai revolusioner atau dengan penurunan bagian kaum borjuis kecil dalam proyek-proyek politik dan sosial dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ideologi-ideologi populisme radikal atau nasionalis. Dampak dari kelas menengah tidak dipahami di luar konteks dari kondisi spesifik sejarah masing-masing negara.

A. Apa itu Kelas Menengah?

Kelas menengah menurut Robison menyajikan beberapa masalah konseptual. *Pertama*, atas dasar apa kelas menengah dapat didefinisikan dan dipisahkan dari kaum borjuis dan proletar. Elemen penting kelas menengah yang sama dengan kaum borjuis dengan ideologi sosial politik konservatif atau liberal yang menentang bagi dengan kaum proletar adalah terutama ketergantungan mereka pada upah dan gaji. *Kedua*, bagaimana mungkin untuk mempertahankan gagasan tentang kelas menengah yang koheren ketika komponen internalnya berjarak dari profesional perkotaan yang kaya hingga pegawai desa yang miskin dan guru sekolah dan seringkali mengadopsi posisi politik dan ideologi yang sangat berbeda. Pada akhirnya bagaimana mungkin mempertahankan bentuk kelas dengan perspektif dan kepentingan yang koheren ketika peran politik sangat bervariasi sepanjang waktu mendukung reformasi demokrasi liberal dalam beberapa kasus dan di lain pihak, merupakan variasi bentuk sistem politik otoriter atau populis.

Dalam teori pluralis, kelas menengah didefinisikan sebagian dalam indikator seperti pendapatan, pola konsumsi, pekerjaan, pendidikan, status dan sebagainya

dalam terma budaya. Bagi kaum pluralis, gagasan kelas, mewujudkan dua kelompok sosial yang besar, kelas menengah, atau kelas kerah putih (*white collar class*) dan kelas bawah (*blue collar class*). Kaum borjuis dan kelas menengah tercampur, keduanya dianggap berbagi budaya dan menempati level atas dan menengah dari pendapatan dan pekerjaan level tinggi. Akibatnya, tidak ada perbedaan antara jenis kekuatan sosial dan kepentingan yang berasal dari kepemilikan pribadi dan yang timbul dari gaji, kualifikasi kerja dan kantor.

Beberapa dari kaum neo Weberian menurut Robison berusaha untuk mengatasi masalah-masalah terakhir dengan membedakan antara kelas menengah dan borjuis berdasarkan fungsi mereka dalam masyarakat kapitalis. Robison mengutip Mills yang melihat kelas menengah baru muncul dari runtuhnya kewirausahaan kapitalisme dan munculnya kapitalisme korporasi, transformasi menciptakan pembagian kerja antara investor kapitalis dan fungsi sistem seperti manajer, teknokrat, pemasar dan pemodal yang merupakan tenaga kerja terampil dari sistem kapitalisme dan memperluasnya. Giddens membedakan kelas menengah dari kaum borjuis atas dasar kapasitas pasar yaitu kepemilikan perusahaan

dengan posisi kualifikasi pekerjaan. Dalam dua pandangan tersebut, ada penggabungan kepentingan antara kelas menengah dan kaum borjuis selama kondisi ekonomi sehat dan juga untuk perselisihan distribusi pasar ada mekanisme yang mengatur dengan baik.

Menjelaskan perbedaan politik dan ideologi dalam konteks kelas menengah juga menimbulkan masalah. Mengapa elemen penting kelas menengah, dalam berbagai situasi sejarah, diletakkan dengan banyak rezim otoriter atau oligarki yang didominasi kapitalis penghisap uang sedangkan elemen lainnya mendukung reformasi liberal. Dalam menganalisis ini, Roberts, Cook, Clark dan Semeonoff membedakan antara kelas menengah sebagai entitas subyektif dimana individu mendefinisikan diri mereka dalam konteks hirarki, dan gagasan tentang strata yang merepresentasikan kumpulan individu yang terletak pada poin khusus ketidaksetaraan, didefinisikan dalam terma sebagai faktor obyektif seperti kekayaan dan pendapatan. Menggunakan konsep ini mereka mereka dapat mempertahankan integritas kelas menengah sebagai suatu konsep dan pada saat yang sama sebagai identifikasi empat elemen yang berbeda di dalamnya, masing-masing dengan kecenderungan politik dan kepentingan yang

berbeda. Mereka mengidentifikasi kelas menengah yang berwirausaha yang cenderung mengambil berbagai bentuk politik konservatisme sayap kanan, bagian inti kelas menengah elemen profesional dan manajer yang cenderung berafiliasi dengan konservatif arus utama, posisi anti persatuan, kaum kerah putih proletar dengan pandangan politik kelas pekerja; dan liberal dan intelektual radikal.

Kesulitan dari pendekatan ini adalah bahwa konsep kelas menengah dibiarkan menggantung dari identifikasi subyektif diri yang tampaknya tidak membentuk perilaku politik dan posisi ideologis dengan konsisten. Ini menghindari penjelasan konsep yang bermanfaat nyata. Yang tersisa adalah pertanyaan apakah kelas menengah memiliki identitas yang koheren sendiri pada level manapun atau hanya merupakan sisa kategori dimana konstituen memiliki agenda dan kepentingan yang berbeda, dan yang bertindak hanya dalam aliansi dengan berbagai macam tenaga kerja atau modal saja.

Pendekatan Weberian dan struktural fungsional mendefinisikan kelas menengah lewat karakteristiknya sebagai kaum rasionalitas sekuler dan bersikap universal (*up to date* dengan perkembangan dunia) dalam budaya

mereka yang bertentangan dengan sikap religius dan personalistik masyarakat tradisional. Karakter ini merupakan proses perjuangan politik dan sosial yang kelas menengah definisikan untuk mereka. Oleh karena itu kelas menengah menjadi kategori universal melalui sifatnya yang semakin mendunia dan akrab dengan teknologi produksi, administrasi dan manajemen.

Masalah konseptual yang sama juga dihadapi oleh kaum Marxis. Bagaimana mungkin kelas menengah diklasifikasikan dalam proses perjuangan sosial dan politik yang merupakan karakteristik perkembangan kapitalis? Sebagaimana yang diteliti Burries, perpecahan politik utama kapitalis masyarakat biasanya dipotong (dilakukan?) oleh kelas menengah, yang dipahami sebagai kelompok kerah putih. Untuk menjawab paradoks ini, Robison menggunakan berbagai analisa seperti Poulantzas, Eright, Carhedi, Mill dan Ehrenreichs yang membagi kelas menengah (dimana mereka diidentifikasi dalam pengertian Weberian tentang distribusi hukum pasar) menjadi sub kategori berdasarkan divisi teknis tenaga kerja, yaitu pengawas dan yang diawasi, orang yang berpendidikan dan orang yang agak terampil. Sub divisi ini mengidentifikasi kontrol dan kapasitas pengawasan atas

kerja dan bukan berdasarkan pendapatan dan status. Dalam skema tersebut mental pekerja dipisahkan dari kelas menengah dan dimasukkan dalam kelas proletar. Kita dapat berpendapat bahwa mandor dipisahkan dari perkerja termasuk juga dengan kaum borjuis.

Perbedaan perilaku politik dari berbagai elemen kelas menengah tidak dengan mudah merefleksikan perbedaan kepentingan obyektif yang bisa identik. Yang mungkin berbeda adalah ruang kesempatan politik dan aliansi potensi yang tersedia untuk prestasi mereka.

Dalam paradigma liberal dan Marxis kelas menengah merepresentasikan kekuatan reformasi liberal, subordinasi dari negara kepada individu dan civil society melalui jaminan hukum HAM dan representasi sistem politik. Tetapi gambaran ini kurang menggambarkan kebenaran umum dari representasi kondisi revolusi sosial politik abad 18 dan 19 di Inggris, dan dalam tingkat lebih rendah, di Perancis dan Belanda. Dalam situasi ini negara-negara absolut diwakili oleh hak eksklusif terakhir, menahan perkembangan masyarakat borjuis. Melalui penelitian beberapa ahli, kondisi sosial politik dimana kapitalisme industri muncul adalah bahwa hasil politik dan peran berbagai kelas sangat tergantung waktu proses

industrialisasi dan konfigurasi kekuatan kelas dan negara. Di Bismarkian Jerman, masa pra Tsar Rusia, Meiji Jepang dan baru baru ini di Korea dan Taiwan, negara telah menjadi pewaris kapitalisme, bukan benteng terakhir kekuasaan feodal. Akibatnya, aliansi sosial politik berbeda bentuk. Tidak mengherankan, hubungan antara kelas menengah dan negara menjadi dekat.

Masalah besar untuk kaum liberal (termasuk kaum pluralis neo Weberian) dan Marxis adalah kecenderungan untuk melihat kelas menengah (dan memang semua kelas) sebagai agen kesadaran dan kekuatan perubahan sosial politik. Dalam beberapa kondisi hal ini mungkin merupakan kasus. Namun kelas menengah lebih baik dipahami bukan sebagai agen perubahan namun melekat dalam proses perubahan. Sebagai contoh, kita lebih memahami reformasi, membuat akuntabel negara dan pejabatnya sebagai jaminan integritas dan usaha yang baik dibanding menjelaskan dengan panjang lebar reformasi kelas menengah. Jelas bahwa kelas menengah merupakan hasil manfaat dari efisiensi dan akuntabel paratur negara tetapi mereka jarang menjadi pelopornya.

B. Munculnya Kelas Menengah di Asia Tenggara

Perekonomian Asia Tenggara, kecuali Filipina, memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar enam persen per tahun selama beberapa dekade terakhir. Gabungan ekonomi negara-negara ini tumbuh sekitar 150 miliar dolar Amerika pada tahun 1980 hingga di bawah 400 miliar dolar Amerika di tahun 1992. Pertumbuhan ini merupakan bagian dari proses industrialisasi kapitalis dimana juga terdapat pertumbuhan struktural penting. Terdapat penurunan yang dramatis dan sama pada sektor pertanian dari PDB sepanjang periode yang sama. Di Indonesia, penurunan terjadi dari sekitar 45 persen hingga menjadi di bawah 20 persen. Pada saat yang sama, sektor manufaktur dan jasa mengalami kenaikan secara substansial di sebagian besar negara.

Tidak mengherankan, pergeseran pada struktur ekonomi mencerminkan struktur pekerjaan di masyarakat. Penurunan secara terus menerus di sektor pekerja pertanian diimbangi dengan kenaikan jumlah sektor manufaktur usaha dan jasa. Di negara-negara dimana perusahaan untuk ekspor dengan pekerja berupah rendah mengalami kenaikan jumlah pekerja dalam manufaktur sangatlah dramatis. Di Indonesia, sebagai contoh, antara

tahun 1971 hingga 1990 jumlah pekerja dalam kategori ini mengalami kenaikan dari 2,7 juta hingga 4,4 juta. Di lain, ketika manufaktur mulai menggunakan teknologi secara intensif, dan dimana standar hidup telah meningkat, contoh kasus di Singapura dan Malaysia, sektor jasa mengalami kenaikan secara tajam.

Perusahaan-perusahaan industri dan jasa baru dan pabrik-pabrik membutuhkan tenaga baru yang profesional, ahli manajerial dan ahli teknis dan kategori ini tumbuh secara signifikan di banyak negara. Antara tahun 1980 dan 1990 jumlah mereka meningkat dari 3 persen menjadi 3,8 persen di Indonesia. Jika kita kembangkan angka-angka ini untuk prosentase dari total jumlah penduduk kita akan menemukan angka sekitar 7 hingga 8 juta untuk kelas profesional, manajer dan tenaga teknis. Pada kategori yang sama, Malaysia mengalami kenaikan dari 7,4 persen menjadi 9,5 persen, Singapura dari 18 persen menjadi 21,1 persen, Thailand dari 4,3 persen menjadi 4,5 persen dan Filipina dari 6,6 persen menjadi 6,8 persen.

Kategori yang sangat besar dari administrasi, penjualan dan pekerja jasa sulit untuk dikategorikan ke dalam kategori sosial. Jumlah besar pegawai kecil, penjual dan jasa tidak termasuk kelas menengah bawah, kelas

borjuis kecil dan kelas pekerja. Namun demikian, dalam indikator seperti ideologi, latar belakang pendidikan, kepedulian terhadap hukum dan sistem hirarki dari meritokrasi, akuntabilitas negara dan pejabatnya serta jaminan akan hak-hak warga negara sejumlah besar sebagaimana definisi ini masuk dalam kategori kelas menengah. Secara khusus, pengangguran banyak mengeluh, orang yang berpendidikan akan banyak ditemukan dalam administrasi dan penjualan dan akan menjadi pengangguran atau setengah menganggur. Implikasi politik ini jelas dan menarik untuk dicatat bahwa kepemimpinan populis, gerakan fundamentalis di Timur Tengah dan Afrika Utara menggambarkan kepemimpinan dari unsur-unsur kelas menengah.

Secara umum ada bukti bahwa proses pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi telah menghasilkan perbaikan dalam standar hidup utama. Berbagai indikator menunjukkan bahwa perbaikan standar hidup ini telah tersebar luas. Kepemilikan mobil, telepon, dan televisi meningkat, ada banyak dokter per kepala penduduk, dan persediaan air bersih lebih mudah didapat. Orang-orang menghabiskan sebagian kecil dari pendapatan mereka

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian.

Perdebatan lebih tentang konsentrasi kekayaan dan jika terdapat kenaikan jarak antara orang kaya dan miskin tidak mudah diprediksi. Data mikro yang ada menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan di tangan eselon atas dari populasi adalah besar namun yang nampak, tidak lagi dibanding masyarakat industri kapitalis seperti Amerika Serikat. Pembagian pendapatan atau pengeluaran konsumsi untuk 10 tertinggi jarak persen dari 27,9 persen di Indonesia menjadi 37,9 persen di Malaysia tetapi reabilitas data awal, khususnya yang berhubungan dengan pendapatan dari keuntungan bisnis dan biaya politik sangat meragukan.

Dari perspektif politik, masalah nyata bukan terletak pada banyaknya konsentrasi itu sendiri, tetapi pada perubahan cepat situasi dan pada keputusan mereka yang termarginalisasi dalam proses ekonomi dan politik. Konsentrasi kekayaan relevan untuk dipertimbangkan untuk mengaitkan peran politik kelas menengah yang cenderung aktif. Dalam masyarakat dimana kekayaan penting dari negara berada di tangan sekelompok elit kecil kelas menengah cenderung kecil, relatif tidak berdaya dan

khawatir akan aliran radikal dan populis yang potensial dari sejumlah besar massa miskin. Mereka cenderung dekat dan sejalan dengan kaum elit. Dengan profil yang datar, kelas menengah cenderung lebih besar, lebih independen dari negara dan kaum elit. Yang paling penting, dimana kelas pekerja dan kaum pedesaan digambarkan lebih fokus ke sektor ekonomi, maka sebaliknya dasar kelas menengah adalah sedikit takut akan radikalisme dan juga lebih suka mengambil posisi dalam reformasi politik.

C. Dampak Politik dari Kelas Menengah Asia Tenggara

Sebagaimana Barat memandang meningkatnya ketakutan atau harapan pada bentuk kapitalisme yang terjadi di Asia, kelas menengah menjadi faktor strategis dalam perhitungan di mata Barat. Akankah kelas menengah menjadi kekuatan reformasi liberal? Apakah mereka akan menjadi aktor hirarki otoriter? Akankah mereka menjadi pelopor yang membatasi jaranan kapitalisme yang kelihatan sangat kuat dan bersekutu dengan pejabat negara dan perampok negara yang sudah umum?

Meskipun kedudukan kelas menengah kota di Asia Tenggara sebagai pelaku reformasi demokratis dan liberal

telah tergambar, kelas menengah juga memberikan, di sisi lain, dukungan yang besar untuk rezim pembangunan otoriter dan kepemimpinan untuk gerakan populis. Secara umum, seperti kelas menengah di mana pun, perhatian utama mereka adalah keamanan sistem pasar dan jenjang karir yang didasarkan pada merit dan kualifikasi. Umumnya adalah ketika pemerintah memiliki ketidakmampuan dalam manajemen ekonomi atau korupsi akut dan mencari tambahan uang kebencian kelas menengah mulai tumbuh.

Mengaplikasikan/menerjemahkan kemarahan dalam suatu tindakan, bagaimanapun biasanya tergantung pada kemampuan memanfaatkan peluang yang disediakan kerangka/struktur/sistem negara dan tekanan struktural untuk reformasi atau paksaan ketika ada ancaman revolusi sosial dari kelas pekerja dan pedesaan. Respon kelas menengah telah diatur baik oleh konfigurasi yang ada dan kekuatan sosial politik dan oleh situasi yang berbeda dan berbagai elemen kelas menengah: kaum profesional kota dan manager kelas menengah dan level rendah administrasi dan penjualan yang sering merespon dengan cara dan bentuk yang berbeda aliansi sosial.

Filipina merepresentasikan kasus yang unik di Asia Tenggara. Kekuatan sosial berada di tangan kelas penguasa yang dibangun atas kepemilikan lahan pertanian yang besar. Sistem politik di negara tersebut di tandai oleh aparaturnya yang tidak memiliki kekuatan dan bentuk oligarki patron klien yang terfokus di kongres. Keterlibatan kelas menengah dalam perjuangan rakyat melawan Marcos dan militer untuk melawan bentuk otoriter dan terpusat dari kekuasaan negara pada pertengahan tahun 1980-an banyak dipuji oleh pengamat Barat sebagai bukti kekuatan alami antara reformasi demokrasi dan kepentingan kelas menengah. Kita harus berhati-hati dengan interpretasi ini karena dua alasan, pertama, faktor penting dalam ketidakpopuleran rezim Marcos adalah karena ketidakmampuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan menaikkan standar hidup. Apakah hal itu dicapai kelas menengah yang mendukung rezim Marcos melawan perubahan dari persaingan aliansi kekuasaan kuat keluarga yang akhirnya menang. Kedua, hasil politik tidak benar-benar merepresentasikan bentuk demokrasi yang menjamin perlindungan HAM dengan baik sebagai wujud otoritas keluarga besar dalam mekanisme bentuk oligarki dari elektoralisme. Kelas menengah membuktikan menjadi

pemain kedua dalam permainan yang didominasi oleh kaum borjuis dan berbagai kepentingan kelembagaan dalam aparatur negara.

Pola aktifitas politik yang biasa dilakukan kelas menengah di suatu wilayah adalah beraliansi dengan negara otoriter yang modern. Contoh ekstrim dapat ditemukan di Singapura dimana negara dan partai yang berkuasa PAP (Partai Aksi rakyat) telah menempatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya standar hidup dan stabilitas politik pada pusat legitimasi yang diklaim. Dalam sistem politik dimana pembagian antar negara, pemerintah dan PAP kabur, kelas menengah memiliki andil dalam aturan PAP. Tidak hanya PAP, partai yang memelihara pertumbuhan industri kapitalisme dan memimpin kenaikan standar hidup yang tidak pernah terjadi sebelumnya, hal tersebut mewujudkan cita-cita kepentingan kelas menengah, hirarki dan hak istimewa yang dibangun melalui meritokrasi, pentingnya mandu dan pendidikan, dan kekuasaan hukum. Kelas menengah mendapat keuntungan sangat banyak dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelas menengah Singapura saat ini menikmati akses yang setara, tidak hanya untuk berbagai barang dengan tipe khas yang dinikmati oleh

kelas menengah di negara-negara industri maju, namun juga untuk komoditi asing seperti liburan, rumah mewah dan pendidikan di luar negeri.

Hal yang penting adalah bahwa tidak ada kaum borjuis domestik yang kuat sebagai pemain utama pada sejarah politik Singapura, setidaknya di tahun 1950-an, 1960-an dan bahkan hingga 1970-an. Dalam kebuntuan awal antara PAP dan buruh, kepentingan kelas menengah telah selesai. Ada hubungan buruk yang jelas antara kelas menengah dan negara di Singapura. Reaksi untuk regulasi berlebihan dan perhatian pemerintah yang obsesif untuk kedamaian menyebabkan kenaikan tingkat emigrasi dan protes melawan contoh aneh rekayasa sosial, sebagaimana keengganan pemerintah untuk memungkinkan munculnya organisasi bebas kelas menengah untuk mengoperasikan dan mengkritik di luar lembaga yang dibentuk negara. Menghadapi masalah ini negara Singapura dapat menjamin cara penting sebagai otoritas penting kelas menengah.

Di Malaysia sampai beberapa tahun terakhir, konfigurasi kekuasaan hampir tidak ada dalam ruang politik, dengan dominasi kelas kerah putih kaum Melayu yang difasilitasi khusus oleh negara, tidak hanya sebagai sebagai produk sampingan dari keberhasilannya dalam

memberikan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetapi sebagai hasil kebijakan khusus dan perlakuan legislatif yang ditunjukkan untuk memastikan bahwa etnis Melayu masuk dalam jajaran profesional dan manajerial dalam jumlah yang besar. Tanpa intervensi negara, kuota yang ditetapkan di banyak area kerja dan perbankan, kenaikan besar jumlah kelas menengah Melayu tidak akan mungkin terjadi. Sebagaimana yang Crouch tekankan, unsur-unsur kelas menengah banyak memberikan kritik tajam seperti di bidang HAM dan lingkungan pada pemerintah dan beberapa telah memainkan peran utama dalam partai oposisi seperti DAP dan PAS, dalam konteks masyarakat dimana kekuatan ekonomi telah lama hilang dengan kaum Borjuis non Melayu, aliansi antara partai penguasa UMNO dan level lebih tinggi kelas menengah Melayu adalah kuat.

Di Thailand, kelas menengah yang sedang berkembang telah populer terkait kejadian di Barat dengan kerusuhan dan demonstrasi dari tahun 1992 yang menyebabkan jatuhnya Jendral Suchinda dan digantikan oleh koalisi demokrasi dibawah pimpinan Chuan Leekpai dalam pembangunan terlihat lebih sebagai kemenangan demokrasi melawan kontrol militer. Kevin Hewison

menyajikan bantahan menarik dari banyak asumsi bahwa menghubungkan kelas menengah dan kekuatan reformis lain sangat dekat pada perubahan demokrasi.

Dalam pandangan Hewison, kelas menengah Thailand semakin tidak bergantung pada negara dalam bidang tenaga kerja dan dukungan dan tidak lagi memerlukan negara untuk melindungi dari revolusi komunis yang baru tumbuh, selama tahun 1980, merasa mampu untuk bergerak menjadi reformis. Namun, yang utama adalah tidak seragam dan khususnya untuk mengamankan pemerintahan demokratis sehingga mencapai pemerintahan yang kompeten dan bersih. Hal ini telah ditunjukkan di masa lalu lewat kenyataan bahwa kelas menengah telah mempersiapkan untuk mendukung intervensi militer ketika dilakuka melawan pemerintah yang diindikasikan melakukan korupsi dan tidak kompeten. Tidak juga pada demokratisasi yang nyata pada tahun 1992, dalam pandangan Anderson, mewujudkan cita-cita politik kelas menengah.

Hal tersebut pada dasarnya merupakan transisi menuju elektoralisme sebagai mekanisme kekuasaan borjuis birokrasi aparatur pemerintah yang terpusat dibanding merupakan sistem perwakilan nyata dengan

jaminan pejabat liberal atau keadilan sosial bagi sebagian besar penduduk. Dalam situasi dimana kaum borjuis termasuk para bankir besar, tidak lagi memerlukan aspek koersif kekuasaan negara untuk mengamankan dominasi sosial mereka, lembaga baru elektoral memungkinkan kontrol politik langsung oleh berbagai pengusaha politik mewakili kepentingan borjuis baru di Bangkok dan semakin banyak, di daerah.

Di antara kelas menengah, menurut Hewison, demokrasi baru membangkitkan ketakutan yang meluas akan kekuatan gelap yang tidak diketahui, termasuk unsur kriminal, bersaing untuk mengendalikan kementerian pemerintahan pusat yang akan memungkinkan mereka untuk mendominasi politik tuntas habis yang dihasilkan dari proses reformasi. Dalam hal ini ada perbedaan pandangan antara reformis kelas menengah dan para pengusaha politik borjuis baru tentang sifat dan peran sistem baru elektoralisme. Untuk yang terakhir, gagasan representasi dan hukum perlindungan hak-hak warga tidak dapat didudukkan oleh mekanisme parlemen dan pemilu untuk tujuan berbagi kepentingan bersama. Faktor yang sama yang terlihat sebelumnya adalah aliansi dari unsur-unsur militer dan kelas menengah untuk membersihkan

dan pemerintahan yang tertib belum sepenuhnya sepenuhnya dihilangkan. Jika aliansi muncul kembali bergantung kepada sebagian besar struktur politik baru untuk ditangkap dan digunakan oleh kekuatan reformis untuk mencapai reformasi perwakilan yang nyata dan mekanisme politik yang akuntabel dan mapan.

Dalam beberapa hal, Indonesia menyajikan gambaran serupa bahwa kelas borjuis baru, yang dipelihara Orde Baru, terlihat mengamankan rumah politiknya. Sebagai rezim Orde Baru Suharto yang membangun dalam selama bertahun-tahun kekuasaannya pada tahun 1965 lembaga politik baru mulai muncul di luar struktur militer dan menggambarkan keberlanjutannya. Serangkaian organisasi korporatis menjadi dasar kontrol politik dan mobilisasi. Termasuk partai politik negara. Golkar, dan sejumlah negara menguasai organisasi korporatis mewakili kelompok fungsionalis dan kepentingan masyarakat seperti pemuda, perempuan, PNS, pebisnis dan sebagainya. Sebagai kerangka kerja untuk lembaga-lembaga ini suatu ideologi kompleks korporatisme organik disusupkan, dibawa gambaran masyarakat sebagai sebagai entitas organik dimana bagian komponen bekerja dengan tujuan bersama untuk kebaikan bersama. Fungsi negara

dalam pandangan ini adalah untuk melindungi kepentingan umum melawan kepentingan pribadi atau elemen destruktif dan disfungsional. Dalam persepsi politik dan masyarakat, tidak ada tempat untuk oposisi yang sah sebagai kekuatan konstruktif dan loyal.

Dalam aparatur negara itu sendiri, otoritas dan pengaruh militer sedikit demi sedikit terkikis oleh lembaga sekitar kepresidenan, terutama pada tahun 1980-an oleh Sekretariat Negara. Kekuatan ekonomi militer khususnya di bidang yang khusus mengadakan barang disesuaikan dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Riset dan Teknologi yang dipimpin Habbie. Unsur-unsur yang berkuasa dalam militer mulai mengambil posisi penting dalam kepresidenan dan aliansi bisnis disekelilingnya merupakan kekuatan yang tumbuh untuk mengurangi basis kelembagaan mereka.

Kebencian ini diperparah karena lembaga kepresidenan mulai menjadi keluarga birokrasi yang kuat untuk membangun basis kekuatan sosial di dalam korporasi. Menggunakan berbagai monopoli pasar termasuk izin impor, distributor minyak negara, Pertamina, kontrak pekerjaan umum dan infrastruktur, masuk dalam bentuk area monopoli negara seperti televisi, kreasi

perbankan negara, keluarga Suharto merupakan kelompok paling kuat sebagai perusahaan konglomerat pribumi. Keluarga lain dengan basis dalam birokrasi atau yang memiliki hubungan dengan lembaga kepresidenan membangun kerajaan serupa, meskipun lebih kecil. Dalam hal ini termasuk Habibie, Djojohadikusumo, Harmoko dan keluarga Sutowo. Dalam hal akses, kelompok pribumi lain telah mendapatkan lahan, terutama sebagai kontraktor dan pembangun dibawah patronase Sekretariat Negara dan di era sebelumnya, Sutowo ketika mengatur Pertamina. Hal ini juga ditopang oleh hubungan perusahaan yang luas dengan perusahaan negara dan kaum utama Tionghoa dari konglomerat perusahaan.

Suksesi politik muncul mengaktifkan perjuangan untuk menentukan bentuk rezim politik pasca Suharto. Dari pandangan Suharto dan keluarga baru dan beberapa tokoh, penting jika suksesi politik tidak melibatkan transisi/peralihan baik bentuk liberal, pemerintahan perwakilan ataupun bentuk peran militer populis. Perjuangan untuk kekuasaan antara oligarki baru dan sekutu mereka, dan unsur-unsur yang mewakili birokrasi atau yang mengaku mewakili, tradisi akuntabel dan aturan otoritarianisme hanya bagus di permukaan. Strategi

Suharto untuk membasmi elemen garis keras militer dan disaat yang sama, membuka jalan struktur korporatis negara yang menawarkan kesempatan untuk karir dan akses politik untuk tokoh dan kelas menengah baru. Dalam Golkar naiknya militer dan birokrasi negara ditantang oleh keluarga baru dan tokoh-tokoh muda lainnya. Dalam keironisan, militer garis keras, pembentuk kaum otoriter garis keras, menjadi penganjur reformasi demokrasi dan keadilan sosial, menentang keras tumbuhnya keluarga baru di sekitar lembaga kepresidenan.

Dimana kemudian, apakah munculnya kelas menengah masuk ke semua hal ini? Seperti di Thailand pertumbuhan dramatis sektor swasta telah meningkatkan pengaruh dan otonomi kaum profesional, manajerial dan teknokrat kelas menengah perkotaan. Pekerjaan makin banyak terdapat di luar negara, banyak dalam perusahaan internasional, memberi tingkat yang lebih besar dalam kebebasan dari negara. Dikombinasikan dengan periode keterbukaan politik yang lebih besar di lima tahun lalu, individu yang berasal dari jajaran profesional kelas menengah menghasilkan kritik yang banyak dari masyarakat karena sifat dan kekuatan politik dan ekonomi di Indonesia, yang berfokus secara khusus pada posisi

keluarga dan para konglomerat di dunia korporasi dan pada ketidakmampuan politik di parlemen dan partai-partai dalam sistem yang korporatis.

Namun, tidak seperti Thailand, di Indonesia tidak ada struktur elektoralisme yang memungkinkan pemerintah mengambil alih aliansi bisnis dan kelas menengah melewati sistem kontrol birokrasi terpusat. Yang lebih penting, kaum borjuis tetap terkait erat dengan negara dan strata pejabat yang masih terus memberikan jalan penting untuk kesuksesan bisnis melalui berbagai praktek penyewaan negara. Sektor borjuis non Cina, mampu terlibat dalam politik publik, juga mendukung struktur korporatis yang ada, khususnya Golkar. Oleh karena itu kaum borjuis bukanlah jembatan untuk transisi politik menuju elektoralisme tidak juga sekutu potensial dalam usaha untuk kelas menengah.

Untuk sebagian kelas atas, kelas menengah perkotaan, secara berkelanjutan menaikkan standar hidup, yang terlihat dari rumah yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan dengan budaya konsumerisme menyebabkan keburukan untuk dukungan umum untuk Orde Baru meskipun jengkel dengan aspek wewenang yang berubah-ubah dari otoritas militer dan birokrasi sipil dan naiknya

kejengkelan kepada tingginya penghancuran/perbuatan korporasi publik keluarga Cendana. Sebagian besar terlibat ingin mereformasi sistem. ICMI yang disponsori pemerintah, yang baru didirikan oleh Suharto dan Habibie telah cukup efektif dalam memberikan wadah bagi profesional kelas menengah muslim untuk memegang posisi yang berpengaruh dalam aparatur negara (pemerintahan) dan memberikan indikasi jelas dari keinginan presiden untuk membangun basis sipil yang lebih besar untuk rezim.

Ketika kelas menengah menjadi fokus untuk studi yang baik, terjadi kelangkaan kerja yang sistematis dalam politik oleh sejumlah besar pegawai kelas menengah dan pejabat di daerah serta di kota-kota. Meskipun mendapat keuntungan dari proses pertumbuhan ekonomi, ada tanda bahwa tradisi kuat populisme dikenalkan dalam sektor ini di masyarakat. Gerakan mahasiswa merupakan indikator menarik dari hal ini. Dua unsur yang berbeda nampak telah muncul. Di satu sisi elemen yuppie semakin peduli dengan karir dan pencapaian materi kerja dan hidup, sejalan dengan pertumbuhan konservatisme mahasiswa kelas menengah atas di Barat.

Di sisi lain, pada tahun 1960-an dan 1970-an unsur-unsur radikal dan reformis politik mahasiswa dipimpin oleh mahasiswa kelas menengah atas, yang mengharapkan reformasi spontan muncul dari dalam sistem sebagai hasil kritik moral mereka, gerakan mahasiswa radikal pada beberapa dekade lalu banyak dipimpin oleh mahasiswa kelas menengah bawah dan terlibat dengan aliansi petani dan kelompok sosial yang terpinggirkan, menyuarakan kritik sosial populis. Meningkatnya sarjana pengangguran, khususnya di kalangan universitas pinggiran dan sekolah, memungkinkan radikalisme mahasiswa ini bertahan di luar universitas. Dukungan yang banyak dan antusias untuk PDI adalah demonstrasi dan parade masyarakat sebelum pemilu 1992, yang memberikan reputasi sebagai partai kaum muda dan progresif dalam politik, jelas menunjukkan gambaran elemen penting dari rasa frustrasi pemuda kelas menengah bawah.

Sementara potensi yang tidak diragukan untuk radikalisme populis di kalangan kelas menengah bawah sering tidak dapat menemukan jalan untuk kiprah/wadah politik, era pos Suharto mungkin menyediakan lingkungan yang jauh lebih cair.

Jelas bahwa kelas menengah di Asia Tenggara memiliki dampak penting pada kehidupan di wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Pada saat tertentu, ketika rezim yang berkuasa mulai goyah, Thailand pada tahun 1992, di Filipina tahun 1988, dan sebelumnya di Jakarta pada tahun 1965, kelas menengah telah turun ke jalan dan sempat tampil mendominasi panggung politik. Namun, mereka selalu melakukan ini dengan bekerja sama dengan kelompok lain dan mengikuti dinamika politik yang diatur oleh rezim yang terpecah dan tekanan untuk perubahan yang dihasilkan dari pergeseran struktural dalam bidang ekonomi. Tidak juga ada demokrasi yang muncul selalu mengandung elemen liberal yang dikaitkan dengan kepentingan kelas menengah. Hak asasi manusia dan supremasi hukum serta jaminan kebebasan individu sering tidak diakomodir dalam konstitusi dan sistem kenegaraan.

Kecenderungan untuk melihat kelas menengah terutama sebagai agen politik mungkin keliru. Signifikansi politik nyata mereka sebagai produk himpunan dinamika sosial dan ekonomi yang menyajikan kekuasaan politik dengan sistem yang penuh kendala, kontradiksi, serta pilihan-pilihan. Terdapat beberapa contoh

perkembangan terakhir di Indonesia. Di Indonesia, kaum kelas menengah liberal telah lama dalam penekanan untuk kebebasan pers. Sementara pemerintah Indonesia tidak pernah berusaha secara sistematis untuk memaksakan Pravda seperti kontrol yang jelas di Singapura, Departemen Penerangan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan atau mencabut izin dan siap untuk menutup media yang dianggap melanggar batas.

Dalam bulan Juni 1994 mereka telah menggunakan kekuasaannya untuk membredel majalah Tempo, Detik dan Editor. Namun, menjadi semakin sulit bagi mereka untuk melakukannya. Hal tersebut bukan karena tekanan politik kelas menengah liberal yang menginginkan kebebasan berekspresi. Tekanan tersebut dapat dengan mudah diabaikan. Salah satu faktor adalah bahwa pers Indonesia adalah bisnis yang berkembang makin besar. Keuntungan bergantung pada pendapatan iklan yang pada gilirannya dapat menjaring pangsa pasar yang semakin menuntut hal yang menarik dan berita yang menghibur. Ini adalah pasar untuk mendapatkan akses menjadi media internasional. Satu dari anak presiden, Bambang, memiliki tabalit yang bergantung pada keuntungan atas jasa menyewakan waktu untuk media luar seperti CNN. Kelas

menengah oleh karena itu, menjalankan kekuatan mereka sebagai konsumen massa baru, kaum borjuis sebagai investor mencoba untuk mendapatkan keunggulan dalam persaingan pasar yang semakin menguntungkan.

Contoh kedua adalah sektor industri perbankan. Bank-bank pemerintah di Indonesia telah lama digunakan sebagai sapi perah bagi investor yang disukai. Skandal terbaru yang terekspos adalah jumlah besar hutang yang mengalir dari pinjaman yang diberikan kepada investor nakal yang melanggar praktek perbankan dan tokoh yang terlibat dekat dengan pusat kekuasaan. Selama beberapa dekade, kritikus kelas menengah telah sangat kritis terhadap kegiatan rent seeking (sewa) ini tetapi tidak ada hasilnya. Sementara para pengamat masih skeptis bahwa reformasi yang dramatis dan berkelanjutan akan dilakukan oleh pejabat bank dan pelaku bisnis. Orang-orang yang terlibat dalam skandal terbaru telah dicoba dan dipenjarakan. Faktor-faktor yang menyebabkan tindakan ini telah muncul akibat berbagai kendala ekonomi struktural akibat perilaku rent seeking.

Penurunan harga minyak dan meningkatnya ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan bantuan anggaran pendapatan telah menyebabkan persaingan tajam

untuk sumberdaya fiskal yang relatif menyusut. Memompa dana negara ke dalam sistem perbankan negara untuk menutupi hutang semakin sulit untuk dipertahankan. Selain itu, integrasi yang makin meningkat dalam sistem keuangan internasional untuk investor publik dan swasta di Indonesia memerlukan kepatuhan yang lebih besar untuk standar internasional dan untuk menjaga kredibilitas. Menjadi lebih sulit untuk menagbalkan tekanan ketika perusahaan publik Indonesia (seperti Telkom dan Indosat) tercatat di Bursa Efek New York. Dengan kata lain tujuan kelas menengah yang berkaitan dengan akuntabilitas negara dan para pejabatnya dapat tercapai, tidak melalui tindakan agen politik kelas menengah, tetapi sebagai hasil tekanan struktural perekonomian industri kapitalis.

Akhirnya, reorganisasi politik Indonesia sedang dilakukan dalam konteks datangnya suksesi dari pemerintahan Suharto. Dalam pemerintahan rezim dimana lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dan seluruh jenjang karir yang ditemukan di birokrasi sipil dan militer, presiden mulai membuka wadah baru seperti Golkar dan ICMI, memberikan peluang karir dan politik untuk pengusaha politik kelas menengah. Ironisnya, lembaga-lembaga baru bukan menjadi pergeseran ke pemerintahan

yang representatif tetapi merupakan sarana untuk mempertahankan korporatisme otoriter. Hal ini adalah proses civilinisasi tanpa demokratisasi. Yang paling penting, pergantian tidak mewakili respon terhadap tekanan kelas menengah tetapi merupakan strategi kepresidenan untuk memelihara konstituen politik dan institusi untuk mengaktifkan oligarki kapitalis baru untuk mempertahankan kekuasaan era pasca-Suharto dalam menghadapi ancaman potensial dari populisme nasionalis dalam militer dan liberalisme dari unsur kelas menengah atas. Kelas menengah telah mendapatkan tempat politik tetapi dalam struktur otoriter korporatisme, bukan demokrasi liberal, dan sesuai dengan agenda oligarki kapitalis.

Sedangkan analisis ini menunjukkan bahwa identitas politik dan ideologi kelas menengah adalah relatif terhadap konfigurasi bagi kekuatan sosial politik dan tergantung pada kerja sama potensial dan koalisi yang disana namun sesuatu yang universal tentang kepentingan kelas menengah kebutuhan untuk kerangka regulasi yang dapat diprediksi dan aturan resmi dan hukum yang menjunjung legitimasi dan perlindungan melawan kesewenang-wenangan penguasa. Dengan kecepatan

internasionalisasi keuangan, informasi, pendidikan, teknologi dan manajemen, elemen elit kelas menengah dalam memperluas kelahiran lingkungan mereka yang baru, transnasional dan lembaga yang bersifat teknis. Di sini, pendapatan mereka, status, otoritas, ideologi dan bahasa mereka mencapai tingkat isolasi dan otonomi. Kepentingan mereka dapat diamankan oleh berbagai rezim politik dan sosial.

D. Richard Robison: *The Rise of Capital in Indonesia*

Buku yang ditulis Richard Robison yang berjudul *Indonesia: The Rise of Capital* pada tahun 1986 ini merupakan kajian ekonomi politik Asia umumnya dan Indonesia khususnya. Ia menjelaskan mengenai pembentukan borjuasi Indonesia modern dan signifikansinya dalam pelaksanaan kekuasaan negara pada masa puncak otoritarianisme Orde Baru Suharto. Kelas kapitalis domestik dan kapital negara menurut Robison merupakan faktor penentu dalam revolusi kapitalisme di Indonesia. Karya Robison ini ingin mengetahui realitas kapitalisme negara Orde baru yang tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor historis yang membentuknya. Pertentangan antara kapital domestik dan asing, pribumi dan non pribumi (Tionghoa), pedagang dan industriawan

serta relasinya dengan pembentukan negara merupakan pokok tulisan Robison.

Buku Robison ini merupakan usaha ke arah analisis kelas dalam studi Indonesia kontemporer yang memberikan gambaran empiris mengenai komponen-komponen kapitalis borjuasi domestik di Indonesia. Robison menekankan perlunya membedakan kelas kapitalis dari kelompok campuran yang untuk sementara disebut kelas menengah, yaitu fungsionaris politik, ekonomi dan sosial serta para aparat ideologis dari kapitalisme.

Robison berpendapat bahwa struktur masyarakat kolonial, dampak kolonialisme terhadap struktur sosial dan ekonomi, pembentukan dan penghancuran kelas-kelas di bawah kolonialisme, konflik pasca kolonial, relasi dengan ekonomi internasional dan pembukaan serta eksploitasi berbagai sumber daya alam, merupakan faktor-faktor yang membentuk watak kapitalisme negara Orde Baru. Di Indonesia menurut Robison beberapa perubahan penting seperti penanaman modal asing, bantuan luar negeri dan minyak bumi memungkinkan pemerintah Orde Baru melaksanakan berbagai kebijakan yang memperbaiki kedudukan dan peran kelas kapitalis negara (1980).

capitalist) dan kelas kapitalis domestik (domestic capitalist). Robison melihat berbagai usaha domestik yang pada awalnya hanya merupakan usaha perdagangan spekulatif berubah menjadi konglomerat besar disertai dengan penanaman modal massal di bidang perdagangan dan industri.

Menurut Robison, borjuasi modern tidak ditemukan diantara ahli waris kaum borjuis kecil muslim tradisional yang pernah berpengaruh pada awal munculnya nasionalisme Indonesia pada awal abad 20 yang sering menuntut perlindungan negara. Borjuasi modern seperti itu berada pada pertumbuhan konglomerat yang dijalankan oleh etnis Tionghoa dan beberapa keluarga yang memegang kekuasaan birokrasi dan berhubungan erat dengan konglomerat. Kehadiran kaum borjuis baru menurut Robison tidak selalu berakibat pada munculnya demokrasi borjuis atau jenis ekonomi pasar bebas yang didominasi ekonom neo klasik.

Robison menjelaskan beberapa warisan kolonial yang membentuk watak kapitalisme negara Indonesia. Pertama, kegagalan kaum borjuasi pribumi pemilik tanah karena hubungan mesra diantara negara kolonial Hindia-Belanda dengan para penguasa pribumi feodal. Penguasa

pribumi lebih menikmati pajak, upah, upeti dan sebagainya untuk mengongkosi politik rumah tangga daripada mementingkan akumulasi kapital dan peningkatan produksi untuk mengembangkan borjuasi pribumi. Proses yang demikian menurut Robison mewariskan dan memperkuat watak patrimonial. Demikian pula pemerintah kolonial Belanda yang mengeksploitasi tanah jajahan dengan menerapkan sistem tanam paksa pada kaum petani di perkebunan besar swasta. Proses ini memperkuat dominasi perusahaan perkebunan swasta dalam produksi tanaman komersial, seperti tebu dan kopi, sehingga menghambat transformasi masyarakat pedalaman untuk menjadi petani kapitalis serta kaum proletar yang kuat.

Warisan kolonial yang kedua dominasi borjuasi non pribumi (Tionghoa) di bidang perdagangan dan manufaktur. Terpisah-pisah golongan non pribumi (Tionghoa) dengan pribumi serta sifat ketekunan dan pertalian keluarga yang eksklusif di kalangan non pribumi dalam perdagangan banyak menguntungkan proses efisiensi perekonomian kolonial. Namun, melalui VOC kolonial Belanda menyerahkan semua hak monopoli perdagangan seperti pajak pertanian, pungutan jalan, pajak pengumpulan dan penjualan garam, pemotongan hewan

bea masuk dan sebagainya kepada golongan Tionghoa. Dominasi golongan non pribumi ini menyebabkan para pedagang pribumi menjadi sangat terbatas. Di bidang manufaktur, kapitalis pribumi hanya berada pada produksi manufaktur skala kecil, sedangkan kapitalis non pribumi menguasai industri skala menengah bahkan skala besar. Akibatnya para pedagang kecil pribumi tetap mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

Yang ketiga, kondisi Depresi Besar tahun 1930-an yang mengakibatkan kemerosotan tajam hasil sektor perkebunan terutama gula di Jawa dan Karet di Sumatera yang membuat peran modal asing di luar Belanda seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang semakin signifikan untuk investasi di sektor tambang dan manufaktur skala besar. Kelas kapitalis yang mendominasi perekonomian Indonesia hingga akhir masa kolonial adalah orang-orang Belanda, namun kapital Belanda terbukti tidak mampu memberi dan menyumbang basis akumulasi kapital bagi restrukturisasi kapitalisme Indonesia mengiringi perkembangan sumber daya dan industrialisasi.

Perkembangan sosial dan struktur ekonomi yang tidak merata serta lemahnya borjuasi domestik pada

akhirnya mewariskan kekosongan ekonomi kapitalis Indonesia. Kekosongan ini memberi dampak signifikan terhadap posisi strategis dan otonomi relatif negara pada masa kolonial dalam relasinya dengan konsolidasi kelas kapitalis.

Dengan mendasarkan analisis pada teori otonomi relatif negara, Richard Robison menyatakan bahwa negara pada masa Orde Baru memiliki otonomi relatif terhadap kepentingan kelas-kelas kapitalis pribumi, non pribumi (Tionghoa) dan asing untuk melanggengkan kekuasaan sekaligus melestarikan sistem kapitalisme. Robison memetakan beberapa faksi kelas kapitalis, birokrat, dan sosial dalam dimensi konflik ideologi, politik, ekonomi terhadap kebijakan Orde Baru. Konsolidasi kelas kapitalis tempat Orde Baru berperan sebagai fasilitator penuh bernilai konflik kepentingan kelas-kelas di bawah ideologi ortodoks kapital liberal, nasionalisme ekonomi negara reformisme liberal dan nasionalisme borjuasi kelas. Sedangkan kapitalis yang bekonsolidasi adalah kapital negara, kapital asing dan kapital swasta domestik pribumi dan Tionghoa.

Robison menyatakan bahwa kapitalisme negara tidak hanya menjadi sekedar pelengkap kapital swasta

melainkan juga pertanda bagi kemunculan kapital negara. Kapitalisme negara kian memperkuat posisi kapital birokrat. Para birokrat, terutama militer memupuk dan mengembangkan kapital dengan membangun bisnis bersama kapital pribumi, asing dan Tionghoa. Mereka menguasai dan mengelola berbagai bidang usaha mulai dari perusahaan otomotif hingga konsesi hutan. Melalui usaha patungan dengan kapital asing dan Tionghoa, posisi militer sebagai pemilik kapital menjadi penting, baik kelembagaan maupun pribadi. Pemeliharaan kondisi yang tepat bagi akumulasi kapital akhirnya menjadi kepentingan politiknya sendiri.

Robison juga melihat menguatnya pola patrimonial dan terbatasnya akumulasi kapital pribumi. Robison membagi tiga kategori kelas kapitalis pribumi yang menonjol di era Orde Baru, yaitu mereka yang dilahirkan oleh Program Benteng dan Ekonomi Terpimpin yang memiliki kaitan dengan PSI antara lain, Grup Soedarpo Nasrosatomo, Grup Sultan Hamengkubuwono IX; kaum birokrat yang membangun bisnis dengan kalangan swasta yang didominasi keluarga misalnya Grup Probosutedjo dan kroni Suharto seperti Grup Ibnu Sutowo; dan kelompok kapitalis baru yang muncul dengan perlindungan politik

dan birokrasi seperti Grup Poleko, Kosgoro, Grup Sahas dan sebagainya.

Robison mencatat mencuatnya kelas kapitalis Tionghoa. Seperti era sebelumnya, kapital Tionghoa telah mengakumulasi kapital dengan landasan sangat kokoh. Selain memiliki akses keuangan dan jaringan korporasi di luar negeri, kapital Tionghoa mampu melakukan integrasi ke tingkat korporasi internasional. Para perwira militer dan investor asing senantiasa diuntungkan oleh kapital Tionghoa.

Konsolidasi berbagai kelas yang dilakukan Orde Baru tidak dicapai begitu saja. Selain berhasil meredakan kritik dan menjinakkan kelompok reformis liberal Angkatan 66, rezim Orde Baru juga berhasil memberangus kritik Angkatan 1974. Para pemimpin dan aktivis kelas angkatan tersebut banyak yang ditangkap, ditahan dan dipenjarakan. Beberapa surat kabar yang menyuarakan kritik terhadap Orde baru juga dibredel. Dalam membangun kapitalisme, rezim Orde Baru menempuh dan menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan kehendak negara disertai dengan aksi represi terhadap kritik yang dianggap mengganggu akumulasi kapital.

F. Catatan Kritis

Richard Tanter dan Kenneth Young melihat karya Robison tersebut dilihat dari kerangka teoritisnya sangat kabur karena secara teoritis tidak ada cara pembedaan dasar atas apa yang secara jelas bisa dibedakan. Karena itu perlu dilakukan analisa ketat atas posisi ekonomi kelompok khusus baik dalam hubungannya dengan modal maupun negara. Baik kelas kapitalis maupun kelas menengah bukanlah kelas yang homogen dan analisa Marxis menurut Tanter dan Young akan memungkinkan kembali pada pemahaman yang lebih utuh mengenai basis produktif dari formasi sosial secara keseluruhan.

Salah satu karakteristik mendefinisikan teori kelas menengah klasik adalah hubungan yang penting dengan negara. Dengan alasan historis, hal itu menimbulkan sedikit perbedaan analisis berkaitan dengan kelas menengah Asia Tenggara. Analisis hubungan negara dan masyarakat di Asia Tenggara selama ini menjauhkan diri dari batas-batas konseptual kelas menengah yang kaku dan membuang faktor yang menunjukkan hubungan yang kuat dengan kekritisian negara untuk pemahaman lebih baik tentang perubahan sosial dan politik yang berkembang di wilayah tersebut.

Berbagai hasil penelitian tentang kelas menengah Asia Tenggara menunjukkan bahwa usia dan pendidikan merupakan faktor kunci dalam menentukan sikap warga negara terhadap pemerintah. Negara Singapura berhubung banyak pada Partai Aksi Rakyat (PAP). Rakyat di wilayah Asia Tenggara sangat bergantung pada negara. Mereka umumnya percaya bahwa pemerintah masing-masing bekerja untuk kepentingan masyarakat mereka. Namun demikian ada juga masyarakat yang berpendapat berbeda. Ada ketidakpuasan terhadap kekuasaan negara selama beberapa waktu, masalah hak istimewa untuk kelompok tertentu dalam politik, sosial dan ekonomi menimbulkan ketidakpercayaan pada negara. Mereka yang berpandangan kritis terhadap negara umumnya adalah yang berpendidikan dan berasal dari kelas menengah Asia Tenggara.

Reaksi warga yang kritis mencerminkan ciri kelas menengah Asia Tenggara yang kemunculannya dan perkembangannya tergantung pada negara dan hubungannya dengan modal global. Pusat perkotaan di kawasan Asia Tenggara semakin terintegrasi ke dalam jaringan keuangan dan produksi global dan regional sementara perusahaan multinasional bernegosiasi dengan

pemerintah daerah untuk proyek yang menguntungkan. Peran sentral negara Asia Tenggara dalam pertumbuhan ekonomi menjadi penjelasan bahwa kelas menengah Asia Tenggara telah mengalami proses demokratisasi. Perkembangan negara telah meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap negara dan aparatnya di Asia Tenggara. Beberapa survei menunjukkan bahwa orang Asia Tenggara mengklaim memiliki kepercayaan yang lebih kepada pemerintah mereka untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat lebih daripada orang Asia Timur atau tempat lain.

Namun survei juga menunjukkan bahwa kaum muda terdidik cenderung kurang percaya kepada pemerintah dan lembaga negara dibanding rekan mereka yang lebih tua. Tidak mengejutkan jika kelas menengah Asia Tenggara telah menjadi produk negara. Masyarakat di Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina sampai batas tertentu pada akhir 1980-an telah mengalami transformasi ekonomi dan sosial yang menyebabkan peningkatan kelas masyarakat di perkotaan. Pusat perkotaan negara telah menjadi terbuka untuk modal global, industrialisasi dan konsumsi massa, juga nilai-nilai kosmopolitan, dan hasrat pluralisme politik.

Temuan dari Barometer Asia menyebutkan bahwa pemuda dan pendidikan merupakan agen kesadaran politik. Kelas menengah yang lebih tua atau yang lebih mapan cenderung memiliki hubungan lebih dekat dengan negara dan status quo. Gerakan reformasi terutama yang didorong mahasiswa dengan didukung media alternatif dan masyarakat sipil. Kaum muda dan berpendidikan merupakan kombinasi idealisme dan nilai-nilai pluralisme politik. Idealisme tergantung pada berbagai faktor seperti ketidakadilan sosial atau politik, isu-sisu kebebasan pribadi serta kapasitas jaringan seperti teknologi media baru. Berdasarkan kesimpulan tentang nilai-nilai dan persepsi orang Asia Tenggara terdapat tiga kesimpulan umum, pertama, tingkat kepercayaan pada pemerintah pusat dan lembaga-lembaga negara tetap relatif tinggi dibanding dengan Asia Timur dan seluruh dunia. Kedua, kaum muda Asia Tenggara cenderung kurang percaya pada lembaga pemerintah dan negara dibanding mereka yang lebih tua, dan ketiga, mereka yang memiliki pendidikan yang lebih baik cenderung kurang mempercayai sistem pendidikan umum dan lembaga negara lainnya.

Menurut King, ada ambivalensi dalam sikap politik kelas menengah. Di satu sisi, terjadi kecenderungan elemen kelas menengah untuk mendukung status quo untuk mempertahankan keuntungan materi mereka, namun di sisi lain beberapa anggota kelas menengah melihat diri mereka sebagai pendukung demokrasi, memainkan peran dalam masyarakat dan dalam gerakan sosial. Kelas menengah dalam beberapa hal bersama dengan anggota kelas lain ikut dalam gerakan anti pemerintah dan protes, terkadang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan diktator atau pemerintahan otoriter. Contoh keterlibatan kelas menengah adalah protes yang memberikan kontribusi pada pemerintahan Indonesia, Filipina, Thailand dan Malaysia. Anggota kelas menengah juga mengembangkan kegiatan kelompok kepentingan yang menunjukkan pembentukan kelompok strategis, mereka melobi pemerintah mengenai isu-isu tertentu seperti lingkungan dan kesejahteraan sosial, meskipun mereka mungkin tidak menghitung tantangan politik yang serius atau langsung pada rezim yang berkuasa. Dalam kegiatan politik, kelas menengah dari empat negara Asia Tenggara memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi dalam pemungutan suara, namun partisipasi mereka dalam kegiatan politik

lainnya agak rendah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kelas menengah pada satu sisi terdidik, rasional, demokratis dan umumnya liberal, namun di sisi lain berorientasi pada keamanan, sarat kecemasan, tergantung pada negara dan umumnya bersikap konservatif.

Sedangkan untuk kasus Indonesia, pandangan Robison tentang kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi kebijakan negara perlu diletakkan dalam kerangka teori strukturalisme otonomi relatif negara. Robison merujuk pemikiran Poulantzas yang menegaskan bahwa negara tidak serta merta menjadi alat atau mewakili kepentingan ekonomi kelas-kelas dominan, dalam hal ini kelas kapitalis, tetapi kepentingan politik mereka, yaitu kohesi sosial. Demi kepentingan umum, negara melanggengkan kapitalisme dengan mengontrol kelas-kelas sosial agar tidak mengganggu sistem kapitalisme itu sendiri. Pembahasan Robison tentang tekanan kekuatan sosial, yaitu reformisme nasional dan liberal merupakan konsekuensi dari elaborasi teori otonomi relatif negara.

Jeffrey Winters melihat fokus Robison dalam bukunya *Indonesia: The Rise of Capital* terombang-ambing diantara perspektif struktur negara dan perspektif masyarakat. Hal itu terlihat ketika Robison menilai bahwa

pada tahun 1974 telah terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan perekonomian menuju industrialisasi di bawah komando negara seiring dengan melonjaknya pendapatan dari ekspor migas. Winters mempertanyakan mengapa mengapa faktor pendapatan (*revenue related factors*) yang menyebabkan perubahan kebijakan perekonomian pada tahun 1974 tidak menjadi fokus analisis Robison.

Robison dalam buku itu membedah penguatan borjuasi domestik yang merupakan perubahan mendasar kebijakan perekonomian tahun 1974 merupakan akibat dari misi borjuasi nasional yang berada di bawah tekanan kekuatan-kekuatan sosial atas nama reformisme nasionalis awal tahun 1970-an dan reformisme liberal Malari tahun 1974. Sebagaimana diketahui, melonjaknya pendapatan migas hanya digunakan untuk memperkaya negara dan aparaturnya, bukan untuk memperkuat borjuasi domestik.

BAB IV

KELAS MENENGAH INDONESIA DAN ILMU SOSIAL

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kelas menengah Indonesia dan ilmu sosial di Indonesia. Menurut Francisca Seda, membicarakan kelas menengah juga berarti membicarakan harapan akan peranan kelas menengah, yaitu harapan sebagai agen perubahan sosial, sebagai agen pembawa modernisasi dan demokratisasi. Harapan ini merupakan harapan normatif yang serupa dengan harapan masyarakat di negara industri maju. Dengan mengacu pada pengalaman industrialisasi dan modernisasi Barat sejak revolusi industri dan revolusi Perancis dua abad yang lalu, munculnya kelas menengah kapitalis yang kuat memungkinkan lahirnya proses demokrasi secara menyeluruh. Meskipun untuk kondisi Indonesia hal ini dianggap ahistoris namun harapan akan peran kelas menengah sebagai agen perubahan itu tetap besar.

Pembangunan ekonomi yang menjadi orientasi politik pemerintah Orde Baru sejak tahun 1967 yang menekankan pertumbuhan ekonomi memungkinkan lahirnya suatu kelas yang mapan secara materi. Kelas sosial baru atau lapisan sosial baru yang semakin bertambah baik dari sisi jumlahnya maupun kemampuan material menyebabkan sejumlah pertanyaan

apakah kelas menengah baru dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dan bagaimana peran yang dimainkannya dalam sistem politik, ekonomi dan sosial Indonesia.

Francisia Seda berpendapat bahwa membicarakan kelas menengah tidak dapat dilepaskan dari konteks teori stratifikasi sosial. Dalam ilmu sosial terdapat beberapa pemikiran yang sangat berpengaruh terhadap analisis kelas sosial dan stratifikasi sosial. Yang pertama adalah teori Max Weber yang menjelaskan pengelompokan dasar tentang stratifikasi sosial. Pertama, kelas; kedua, kelompok status; dan ketiga, partai politik.

Max Weber menjelaskan konsep kelas sebagai pengelompokan atau penggolongan semua orang yang berada dalam situasi kelas yang sama. Situasi kelas diartikannya sebagai probabilitas atau kemungkinan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh barang, posisi atau kepuasan batin. Weber mengelompokkan masyarakat ke dalam tiga kelas yakni kelas pemilikan (*property classes*), yaitu kelas pedagang (*commercial classes*) dan kelas sosial (*social classes*). Keanggotaan kelas pemilikan ditentukan oleh perbedaan kepemilikan barang-barang konsumsi yang dapat diperoleh secara khusus, monopoli penjualan dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan monopoli, monopoli akumulasi

kekayaan yang didapatkan dari surplus yang tidak terpakai lagi, monopoli pembentukan modal dari tabungan dan monopoli privilese status pendidikan.

Kelas pedagang mencakup orang-orang yang mampu mendapatkan monopoli manajemen usaha bagi para anggota dan kepentingan bisnis yang sanggup menjaga kepentingan mereka dengan mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam organisasi politik dan organisasi non politik. Kelas pedagang dan kelas pemilikan masing-masing dikelompokkan lagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelas privilese, kelas menengah, dan kelas tanpa privilese. Sementara kelas-kelas sosial menurut Weber terdiri dari kelas pekerja pada umumnya, kelas borjuis kecil, kelas intelegensia yang tidak punya kepemilikan, para spesialis atau ahli, serta kelas privilese karena kepemilikan dan pendidikan.

Berbeda dengan Weber, Karl Marx menganggap kepemilikan faktor-faktor produksi sebagai kriteria utama yang membedakan kelas pemilik modal (kapitalis) dengan kelas bukan pemilik modal yang menjual tenaga kerja (proletar) kepada kelas kapitalis. Pada dasarnya, hubungan antar kelas dalam masyarakat kapitalis merupakan hubungan yang bersifat eksploitatif dimana kelas kapitalis mengeksploitasi tenaga kerja kelas proletar. Selain eksploitatif, hubungan antar kelas sosial

merupakan hubungan yang sarat dengan kompetisi dan konflik untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang langka. Sumber daya langka tersebut antara lain dimensi *privilege*, *prestise* dan kekuasaan.

Selain Weber dan Marx, pemikiran teoritis Thorstein Veblen mengenai *embourgeoisement* (teori emborjuasi) juga patut dicermati. Menurut Veblen, hubungan antar kelas sosial dalam masyarakat kapitalis di Barat tidak bersifat kompetitif dan penuh konflik, namun ada kecenderungan kelas bawah yang berusaha meniru (imitasi) segala aspek kehidupan kelas sosial di atas mereka, terutama gaya hidup yang mencakup dimensi *prestise*, *privilege* dan kekuasaan, sehingga masyarakat menjadi semakin borjuis. Hubungan antar kelas sosial adalah *social envy* dan bukan *social jealousy* atau konflik sosial.

A. Kelas Menengah, Civil Society dan Demokrasi

Cornelis Lay menyatakan tentang perspektif modernisasi yang menyatakan bahwa demokratisasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Semakin makmur suatu masyarakat atau bangsa semakin besar pula peluang masyarakat atau bangsa yang bersangkutan untuk mempertahankan demokrasi. Dengan mengutip Lipset, Lay menyatakan bahwa kemakmuran suatu bangsa diukur dari pendapatan perkapita, rasio

kepemilikan kendaraan bermotor dan dokter per seribu penduduk, serta rasio radio, telepon dan koran per seribu orang. Hasil temuan Lipset juga menyatakan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara variabel pendidikan dan demokrasi. Negara-negara demokrasi yang stabil ditemukan memiliki literasi yang tinggi dibanding negara yang dikuasai para diktator. Akan tetapi bekerjanya demokrasi boleh jadi merupakan ancaman langsung terhadap status dan kepentingan yang sudah dinikmati kelompok terdidik ini di negara-negara dunia ketiga, dimana status dan kepentingan yang dinikmatinya justru karena sistem yang ada menurut logika anti demokrasi.

Hubungan antara pembangunan ekonomi terhadap demokrasi dan prosesnya dapat digunakan untuk memahami proses pembentukan kelas menengah dan civil society, dengan kekuatan yang menopang keduanya. Kelas menengah menurut Cornelis Lay merupakan konsep yang sedemikian longgar dan karenanya kadang dimerosotkan dengan istilah lain sebagai Orang Kaya Baru (OKB) yaitu adalah produk langsung proses modernisasi atau pembangunan (ekonomi). Bagi Lay, proses modernisasi yang memberikan alasan pembentukan kelas menengah. Oleh karena itu pilihan rute bagi modernisasi merupakan

determinan yang menentukan karakteristik dasarnya dan kelas ini yang akan menentukan tempat dari kelas ini dalam proses demokratisasi sebuah masyarakat dan bangsa.

Pengalaman negara industri maju (Barat) memastikan kehadiran kelas pengusaha baru (borjuis) melalui proses industrialisasi kapitalis memainkan peran penting dalam menghancurkan negara-negara otokrasi maupun otoritarian dan melicinkan jalan bagi proses demokratisasi. Berdasarkan pengalaman negara-negara Barat terungkap dalam sebuah ekonomi pasar, kelas menengah dan tumbuh sebagai akibat dari persaingan yang sangat ketat diantara pelaku ekonomi. Kelas ini terbentuk sebagai hasil seleksi pasar dan bukannya produk dari patronase politik, baik oleh negara dengan kekuatan politik maupun kelas penguasa politik tertentu. Proses pembentukan kelas menengah semacam ini menurut La. mempunyai implikasi yang serius terhadap pola interaksi atau hubungan antara kelas menengah dan negara.

Kelas ini memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk menolak kehadiran atau keterlibatan negara dalam kehidupan luar politik, terutama dalam kehidupan ekonomi. Intervensi negara dianggap sebagai kekuasaan

yang akan mendistorsi proses kerja pasar yang akan berakibat serius pada peluang mobilitas sosial kelas ini. Kelas ini beranggapan memiliki legitimasi sebagai pemegang otoritas ekonomi yang merupakan kawasan terlarang bagi negara. Dengan legitimasi ini kelas ini menjadi pemegang otoritas ekonomi yang telah dan tidak tergantung pada negara dan lembaga politik lainnya sebagai pemegang otoritas politik. Independensi dan pembidangan otoritas yang tegas telah menjadi karakter pokok kelas menengah yang tumbuh dari proses pasar ini.

Sebagai pemegang otoritas otonomi kelas ini memiliki basis material yang kuat yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tawar-menawar politik dengan negara atau kekuatan politik lainnya. Pengaruh politik mereka ke infrastruktur politik sangat substansial dan senantiasa diperhitungkan oleh pelaku politik. Lewat mekanisme pajak, kelas ini menjadi salah satu sumber pokok basis material negara yang mengakibatkan kepentingan, pandangan dan tuntutan harus senantiasa dikalkulasi dan diakomodasi negara dalam setiap kebijaksanaan yang relevan.

Di luar penguasaan basis material yang kuat, kelas ini merupakan sumber terpenting keahlian atau

keterampilan teknis dan manajerial yang diperlukan oleh sebuah bangsa. Sumber daya manusia terbaik yang ada dalam suatu negara terkumulasi dalam kelas ini menyebabkan basis legitimasi kelas ini semakin kokoh dihadapan negara dan dihadapan kelas sosial lainnya dan massa secara umum. Demikian pula penguasaan informasi dan saluran informasi sebagai sumber kekuasaan penting merupakan sumber legitimasi politik lainnya dari kelas ini dan menjadikannya semakin penting.

Secara sosial dan politik menurut Lay, kelas menengah adalah kelas yang resah. Keresahan kelas dengan basis material yang kuat, skill yang tinggi, informasi dan saluran informasi yang memadai ini menyebabkan kelas ini menempatkan perubahan sebagai hukum pokok yang harus hadir dalam setiap masyarakat. Mereka bukan pemula status quo karena dalam perubahan harapan baru tersedia bagi mereka untuk dimasuki. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tangguh untuk memenangkan harapan baru yang disediakan oleh setiap perubahan. Hal ini merupakan kekuatan penting yang bisa mendinamisasi sebuah masyarakat politik ke arah yang lebih demokratis secara politik dan makmur secara ekonomi.

Kelas menengah dalam rumusan lain adalah kelas yang berada di tengah-tengah arus perubahan yang sangat pesat. Mereka adalah kolektivitas pengembara di tengah perjalanan panjang. Tidak ada hal yang bermakna bagi mereka untuk kembali ke belakang, ke masa lalu, ke status sosial ekonomi lama dan juga tidak ada alasan untuk berhenti di tengah pengembaraan. Satu-satunya pilihan adalah terus melangkah ke masa depan walaupun tempat akhir dapat mengecewakan. Hal ini merupakan sumbangan kelas ini bagi proses demokratisasi yaitu menuntut adanya kepastian tentang masa depan yang akan diraih.

Selanjutnya Lay berpendapat bahwa kelas ini bukanlah risk taker atau orang-orang yang berani mengambil resiko begitu saja tanpa didasari oleh kalkulasi yang matang yang mengarah pada kepastian. Resiko bagi kelas menengah ini adalah sesuatu yang bisa dan sudah diperhitungkan secara cermat. Secara politik kelas ini adalah kelas yang sangat kuat dalam menuntut kepastian hukum, kepastian aturan main, keterbukaan, kepastian politik dan lainnya. Karena itu kelompok ini sangat berkepentingan dengan supremasi hukum dalam sistem politik. Fondasi penting bagi terbentuknya sebuah masyarakat dan negara yang demokratis adalah kepastian

hukum. Karenanya kelas menengah secara politik telah dan akan terus memainkan fungsi-fungsi parlementariat di masyarakat, yang akibatnya sangat positif terhadap demokrasi. Mereka menurut Lay adalah jembatan yang menghubungkan negara dan masyarakat.

Kelas menengah terbentuk bukan semata-mata akibat kerja ekonomi, kelas ini juga ditempati oleh mereka yang diproduksi oleh proses pendidikan. Pendidikan telah memainkan peranan penting dalam proses mobilisasi sosial kelompok masyarakat. Pendidikan menyebabkan terjadinya mobilitas sosial dan mengakibatkan terjadinya mobilitas psikologis. Semua itu menempatkan mereka pada pusran perubahan yang sangat pesat, menyebabkan perubahan menjadi nilai ideologis kelas ini. Oleh karena itu, tuntutan akan kepastian hukum, kesamaan peluang, keterbukaan dan lainnya yang merupakan dasar demokrasi menjadi imperatif bagi kelas menengah.

Daya empati kelas menengah juga besar sekali. Mereka memiliki kapasitas luar biasa dalam membayangkan peran-peran di luar yang sedang mereka jalankan. Sifat empati merupakan salah satu energi yang mendorong kelas ini melakukan tuntutan lebih jauh. Harapan untuk melakukan ekspansi peran akan menemukan politis

sebagai hal yang dituntut terbuka untuk mereka. Kelas menengah membuka peluang perluasan partisipasi politik, terutama bagi kelas ini. Politik menjadi arena yang terbuka bagi banyak kelompok dan lapisan masyarakat, dan tidak berhenti sebagai urusan sebagian orang yang terbatas. Demokrasi bisa berproses menemukan bentuk jadinya melalui keberadaan kelas menengah.

II. Kelas Menengah dan Demokrasi di Indonesia

Kelas menengah di Indonesia menurut Cornelis Lay adalah buah kerja politik yang terencana. Ia adalah produk politik rekayasa yang terpisah dari proses kerja pasar, bahkan bertolak belakang dengan pasar. Mereka ditemukan, dibesarkan dilindungi dan kemudian digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan politik negara. Di Indonesia, perkembangan ekonomi dan industrialisasi yang sangat pesat selama Orde Baru berakibat pula pada kemunculan kelas konglomerat yang menempati posisi penting bagi ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini hubungan antara bisnis dan negara masih ditandai karakter patrimonial yang ketat. Perusahaan negara yang menggantikan perusahaan asing berubah menjadi sumber kemakmuran bagi politisi dan birokrat. Bisnis swasta berada di tangan kelompok minoritas yang bersekutu

dengan patron pribumi yang umumnya adalah militer. Kelompok bisnis pada level menengah bukan hanya bergantung pada patronase negara, dalam beberapa kasus, mereka telah membentuk organisasi sendiri guna memperjuangkan kepentingan kolektif mereka.

Menurut Lay, tanda-tanda kelas baru ini akan memainkan peran penting dalam proses transformasi ke arah demokratisasi masih sulit ditelusuri, meskipun terdapat fakta bahwa bagian terbesar mereka mulai merumuskan dan memaksakan tuntutan mereka ke agenda kebijakan negara. Walaupun kelas ini tumbuh pesat dan memiliki basis material yang sangat kuat, bagi Lay kelas ini sangat sulit untuk dapat menghadirkan diri sebagai kelas penguasa politik. Legitimasi mereka yang sangat lemah di hadapan masyarakat menyebabkan kelas ini senantiasa membutuhkan perlindungan negara untuk tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai sebuah kasta ekonomi.

Situasi ini secara politik berfungsi sebatas sebagai sayap ekonomi dari kelas penguasa politik yang bisa digunakan setiap saat untuk kepentingan politik dan preservasi kekuasaan negara. Sebagai bagian dari kelas penguasa, kelas menengah ini sangat berkepentingan

dengan status quo. Karena itu masuk akal bila tuntutan bagi perubahan, kepastian hukum, kejelasan aturan main dan sebagainya merupakan skala prioritas rendah bagi kelas menengah Indonesia. Situasi yang berkembang di akhir tahun 1980-an yaitu kuatnya dominasi peran negara dalam kehidupan ekonomi yang kokoh, kepercayaan yang tinggi terhadap negara sebagai agen kemajuan ekonomi di tingkat global dan distribusi kemakmuran masih sangat kuat. Karena itu para pengamat pesimis tentang peluang demokratisasi dan demokrasi yang dapat dibawa oleh kelas ini bagi Indonesia.

Sebelum ideologi pasar bebas masuk ke Indonesia secara besar-besaran, bukan berarti pengaruh politik tidak bisa dinikmati oleh kelas menengah Indonesia. Kelas menengah di Indonesia juga terlibat dalam mempengaruhi politik dan kekuasaan. Menurut Ong Hok Ham, sebagai golongan pemegang kekuatan ekonomi, golongan menengah Indonesia juga turut membeli pengaruh dan kekuasaan politik. Namun berbeda dengan di negara maju, di Indonesia rute yang ditempuh bukannya legal melainkan dalam kerangka politik birokratis.

Di Indonesia, kelas menengah kedudukannya semakin ringkih bukan saja karena akar sejarah

pembentukan dan perkembangannya yang dilahirkan dari rahim negara dan dibesarkan melalui proses proteksi politik, namun karena kelas ini menurut kategori ekonomi selama Orde Baru merupakan pengusaha pariah, etnis minoritas Cina yang mudah mengundang kontroversi. Mereka berasal dari kelompok minoritas yang secara politik dan ideologis senantiasa diambang oleh negara dan bisa dengan mudah disodorkan oleh penguasa politik untuk dijadikan sasaran kemarahan massa. Akibatnya meskipun secara ekonomi kelas menengah ini menikmati status yang sangat istimewa, secara politik dan ideologi kedudukan mereka sangat rawan karena senantiasa berada dalam tekanan permanen dua kekuatan, yaitu negara dan masyarakat.

Bagi kelas menengah Indonesia, kemerosotan kemampuan distributif negara berakibat pada kurangnya peran negara sebagai satu-satunya sumber aktivitas ekonomi yang bermakna. Hal ini membuka peluang bagi terciptanya jarak yang semakin jauh antara kelas menengah dan negara, yang akan berakibat pada independensi kelas menengah. Jika demikian maka harapan peran kelas menengah sebagaimana di negara Barat juga akan terjadi di Indonesia.

Namun demikian menurut Lay, ada sejumlah kendala yang menyebabkan kelas menengah masih jauh perannya sebagai kekuatan yang mendorong proses demokratisasi. Pertama, berkaitan dengan kuatnya anggapan umum di kalangan aktivis demokrasi atau kekuatan pro demokrasi dan juga para ahli yang melihat kelas menengah menurut kategori ekonomi sebagai kelas tanpa harapan bagi demokrasi di Indonesia. Bahkan secara apriori mereka diandaikan sebagai musuh demokrasi dan karena itu bukan saja harus diabaikan dalam proyek demokratisasi yang dirancang, namun juga ditempatkan sebagai lawan yang harus dimusuhi secara sistematis. Akibatnya kelas menengah Indonesia menurut kategori ekonomi teralienasi dari arus besar proses demokratisasi yang menyebabkan potensi yang dimiliki kelas ini terabaikan begitu saja.

Kelas menengah Indonesia mengalami keterpecahan menurut sejumlah kategori yang ada. Kelas menengah yang dihasilkan lewat proses kerja ekonomi, mendiami dunia sendiri yang terisolasi dari kelas menengah menurut kategori pendidikan dan seterusnya. Karena itu mereka tidak pernah bisa menampakkan diri sebagai kolektivitas kelas yang memiliki basis ideologi

yang satu. Sehingga Lay menyimpulkan negara mungkin baru memiliki sebatas orang kaya baru (OKB) ataupun orang-orang pintar baru yang secara kolektif menunjukkan tingkah laku politik sebagai massa menengah dan bukan sebagai kelas menengah.

Kendala yang kedua menurut Lay berkaitan dengan fakta bahwa untuk kategori ekonomi, kelas menengah Indonesia yang tumbuh dengan pesat dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir, bertumpang tindih dengan parameter garis keturunan. Bagian terbesar dari penguasa prinsip di Indonesia adalah bagian dari kasta atau klan politik yang pernah atau sedang berkuasa. Akibatnya sekalipun terjadi perluasan cakupan kelas menengah Indonesia, bagian terbesar darinya masih tetap merupakan bagian dari kekuasaan politik, yakni para penguasa partai yang tumbuh sejak tahun 1960-an dan pengusaha baru yang bersumber dari keluarga klan politik yang berkuasa atau yang pernah berkuasa. Kelas ini memiliki kepentingan yang sangat untuk mempertahankan *status quo*, karena di dalamnya, bukan saja kepentingan-kepentingan ekonominya mereka terjamin, di dalam sistem yang berkembang terdapat pula nasib dan keberuntungan politik mereka.

C. Ilmu Sosial dan Masalah Kelas di Indonesia

Perbincangan dan literatur mengenai kelas di Indonesia beberapa tahun belakangan mengalami kelangkaan. Menghilangnya konsep dan diskursus kelas dalam ilmu sosial oleh banyak ahli sering dikaitkan dengan munculnya Orde Baru. Menurut Hilmar Farid, Orde Baru berupaya menghilangkan konsep kelas dari diskursus politik dan keilmuan dengan menyingkirkan semua intelektual yang mengusung perspektif semacam itu dan mengganti semua istilah yang lazim mereka gunakan dengan berbagai istilah baru yang dianggap lebih sesuai oleh rezim.

Beberapa waktu kemudian dilakukan suatu studi tentang kelas menengah dan perannya dalam proses demokratisasi. Kalangan intelektual kritis melihat bahwa gerakan mahasiswa, kegiatan LSM dan kritik sosial dalam media massa serta ekspresi artistik adalah tanda-tanda kebangkitan kelas menengah dan karena itu perlu membekali diri dengan perangkat teoritik agar dapat memahami dan mendorong gerakan kelas menengah itu lebih lanjut. Sebagian besar studi dicurahkan untuk mengenali sosok kelas menengah melalui pendapatan, gaya hidup, bahasa dan perilaku sosialnya.

Beberapa ahli melihat hanya sedikit ahli yang beranjak lebih jauh untuk menganalisis secara lebih sistematis dan ketat dalam merumuskan keberadaan kelas menengah dalam sistem kapitalis antara lain dilakukan Bulkin, 1984; Kuntowidjojo 1985; Muhaimin 1988; Mahasin 1990 dan Heryanto 1990. Dalam studi yang lebih sistematis mengenai kelas ini lebih menekankan untuk membicarakan kelas menengah sebagai agen perubahan dan tidak banyak tergerak untuk menelaah lebih mendalam. Dan hal ini mendapat dorongan baru dengan munculnya konsep *civil society*.

Kalangan yang lebih kritis menganggap analisis dan praktek politik berbasis kelas sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan di hadapan kenyataan sosial yang semakin kompleks. Mereka menilai bahwa perspektif yang menekankan perbedaan kelas bukan hanya ketinggalan zaman tetapi juga mengganggu tercapainya persatuan yang mutlak diperlukan untuk menghadapi otoritarianisme. Namun ada juga kalangan yang berpendapat sebaliknya analisis kelas justru semakin relevan dan dapat membantu mencari jalan keluar dari kebuntuan teoritik dan politik yang dihadapi gerakan demokrasi.

Para ahli mencoba membuat klasifikasi mengenai kelas menengah. Bulkin (1984) melihat kelas menengah sebagai kelompok sosial dalam masyarakat yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa, pemimpin surat kabar, kaum pengusaha dan pedagang pribumi, ahli hukum dan kelompok-kelompok profesional lainnya. Mahasin (1990) menetapkan kriteria kelas pada asal usul sosialnya dalam keluarga priyayi, petani kaya dan pedagang kecil, dan terutama pada kebudayaan dan gaya hidup yang berbeda. Penetapan kaum cendekiawan sebagai bagian dari kelas menengah perkotaan dalam ilmu sosial historis disebabkan karena pemikiran mereka yang terbuka.

Usaha klasifikasi seperti ini menurut Farid seringkali terjerembab ke dalam pemberhalaan kategori yang bukan hanya lemah secara teoritik tetapi juga bermasalah secara politik. Pada aras teoritik, kategori kelas semacam ini biasanya digunakan untuk menempelkan label pada seseorang atau kumpulan orang yang dianggap memiliki karakteristik serupa. Terdapat beberapa masalah yang sangat mendasar ketika konsep ini menemui kenyataan sosial yang begitu dinamis. Ketika krisis melanda Indonesia, ribuan tenaga profesional yang umumnya disebut kelas menengah menjadi kehilangan

pekerjaan. Jika mengikuti logika kategori ini maka mereka menjadi orang tanpa kelas karena tidak punya pekerjaan, menjadi bagian dari kelas pekerja dengan menjadi supir taksi atau kembali menjadi borjuis kecil perkotaan dengan membuka toko setelah mendapat suntikan modal dari orang tua yang kapitalis. Begitu pula dengan ratusan ribu buruh yang dipecat dan menjadi borjuis kecil karena tidak lagi bekerja di pabrik dan menyambung hidup dengan menjadi perantara dalam ekonomi obyek di kota besar.

D. Catatan Kritis

Upaya melakukan batas-batas kelas dengan melakukan klasifikasi berdasarkan pada asal usul sosial, kebudayaan, gaya hidup atau karakteristik yang sama menurut Farid akan senantiasa menghadapi kesulitan ketika melihat kenyataan sosial yang konkret, kecuali dengan mengubah kriteria dan kategori tersebut terus menerus sampai kehilangan arti sebagai kategori. Selanjutnya tidak banyak membantu memahami dinamika masyarakat. Kecenderungan ini juga rentan terhadap kritik dari pandangan mainstream yang akan ditantang.

Masalah yang terjadi bukan terletak pada ketepatan menentukan kategori dan menggambarkan skema kelas yang canggih, tetapi justru pada upaya membuat klasifikasi

itu sendiri. Kelas yang disimpulkan dari agregat sosial tertentu dalam konteks tersebut menjadi berbahaya. Sebagai analisis untuk mendukung gerakan perubahan kategorisasi kelas seperti ini bisa menjadi menyesatkan. Misalnya gerakan buruh di Indonesia dalam menghadapi gelombang pemecatan massal yang membuat ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan, jika menggunakan kategorisasi kelas yang ketat maka saat dipecat mereka tidak lagi menjadi bagian dari kelas pekerja dan karena itu tidak dapat diperjuangkan lagi oleh serikat buruh.

Jalan buntu analisis kelas yang selama ini dikembangkan di Indonesia menurut Hilmar Farid disebabkan dua sebab. Pertama, karena kegagalan menempatkan keseluruhan diskursus dalam analisis mengenai sistem kapitalis. Meskipun menekankan pentingnya sejarah, ilmu sosial historis dalam banyak hal juga bersifat a-historis. Pandangan teleologis yang menempatkan kapitalisme yang berkembang dan mapan sebagai titik tolak menyebabkan analisis mereka lebih terarah pada kegagalan atau hambatan yang dihadapi masyarakat untuk menuju bentuk ideal, dibanding memperhatikan bagaimana sistem kapitalis tumbuh dan berkembang dalam kenyataan.

Kedua, adanya pemahaman yang keliru mengenai sistem kapitalis itu sendiri. Dengan mengutip Marx, Farid menjelaskan bahwa terdapat kekeliruan ekonomi klasik yang mempertukarkan penampakan dengan substansi, dan melihat hubungan antar manusia yang kompleks sebagai sesuatu. Bagi Marx, persoalan terpenting adalah memahami bagaimana perwujudan dan hubungan yang melandasinya tumbuh dan meluas dalam masyarakat. Kapital adalah bukan sekedar *thing*, tetapi keseluruhan proses atau sebuah hubungan sosial yang bergerak. Konsep kelas semestinya digunakan untuk memahami hubungan antagonistik dalam melihat kapital sebagai hubungan sosial.

Pembentukan kelas di masa Orde Baru juga bukan proses yang sekali jadi, tetapi proses yang sangat kompleks yang hanya dapat dipahami secara penuh melalui pengamatan historis yang cermat. Implikasi teoritik paling mendasar dari analisis kelas adalah pemikiran ulang mengenai *disciplinary division* yang dipegang kuat dalam ortodoksi ilmu sosial Indonesia. Perlu ada sumbangan dari berbagai bidang ilmu mulai dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, hukum hingga kriminologi. Hal yang menghalangi berkembangnya

analisis kelas di Indonesia menurut Farid antara lain adanya pembagian ilmu sosial ke dalam berbagai disiplin yang berbeda. Karena itu setiap kajian serius mengenai kelas dan kapitalisme di Indonesia sudah sepatutnya menyeberangi batas-batas artifisial tersebut.

Masalah lain menurut Hilmar Farid adalah *embedded statism* dalam ilmu sosial yang bermuara pada penetapan negara bangsa sebagai unit analisis. Penggunaan batas-batas negara tidak hanya mengandung problematik tersebut, namun juga mengarahkan fokus kajian pada kebijakan nasional daripada kenyataan sosial yang konkret dimana batas-batas wilayah administratif tidak terlalu berarti. Analisis tentang kelas dan kapitalisme di Indonesia sejauh ini hanya berkutat pada pengalaman wilayah tertentu terutama Jawa dan Sumatera, sementara sedikit sekali analisis tentang daerah-daerah lain, sehingga klaim nasional menjadi diragukan.

BAB V

KELAS MENENGAH BARU: GAYA HIDUP GLOBAL, KONSUMERISME DAN MASALAH LINGKUNGAN

A. Kelas Menengah Baru: Isu yang Berkembang dalam Debat Publik

Kelas menengah baru, dengan gaya hidup mereka yang ala Barat kadang merepresentasikan standar dalam banyak hal di dunia, baik kepatuhan atas kelas secara normatif maupun praktis. Perhatian utama untuk kelas ini ditujukan bahwa kehidupan ala Barat (*western lifestyle*) tidak lagi terbatas pada negara-negara industri, namun juga sudah menjangkiti dan umum terjadi pada kehidupan negara berkembang. Hal ini bisa menjadi masalah dibanding janji kemakmuran yang mengikuti terma masyarakat industri. Masa depan negara berkembang tergantung pada usaha mereka untuk menjadi seperti Negara industri dalam bidang politik sebagaimana struktur ekonomi mereka, bidang pendidikan, kualifikasi profesional dan dalam hal nilai-nilai, kebiasaan dan gaya hidup. Akumulasi konsumsi barang-barang bagus dilihat sebagai kekuatan awal dan ukuran modernisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam prakteknya, di negara-negara berkembang, berbagi konsumsi kunci yang berpatokan pada negara industri, selama beberapa dekade merupakan harapan dibanding kenyataan. Sekarang ini, sedikitnya dalam beberapa hal, kelas menengah baru muncul di hampir seluruh dunia dengan mengadopsi unsur-unsur gaya hidup barat. Proses ini menjelaskan penyebaran luar biasa pembelian produk industri yang mahal. Terdapat dua alasan mengapa kenaikan kelas menengah baru dan gaya hidup mereka tidak hanya menarik perhatian media namun juga perhatian politik pula.

Menurut Hellmuth Lange dan Lars Meier (2009), alasan pertama berasal dari fakta bahwa munculnya kelas menengah baru dipandang sebagai simbol dari perubahan komprehensif hubungan kekuatan ekonomi dan nasional. Faktanya di banyak Negara yang dikategorikan Negara berkembang terdapat banyak standar hidup kelas. Ada dua gambaran secara umum, pertama, untuk waktu yang lama, pada kelas lebih tinggi di negara ini, hanya sedikit kelompok yang mengadopsi gaya hidup Barat. Kedua, sampai saat ini, negara-negara ini hampir tidak mampu memainkan peran independen dalam ekonomi global. Kedua faktor ini telah berubah dan sangat erat

berhubungan. Pertumbuhan potensial kelas menengah baru untuk mengkonsumsi barang-barang mahal, produk Barat hanya dimungkinkan dilakukan di Negara-negara yang mampu mengatur ekonomi mereka dengan kenaikan pendapatan independen. Kenaikan kelas menengah baru merupakan indikator perubahan bahwa terdapat relativitas kekuatan ekonomi dari Negara industri maju.

Fokus kedua adalah bahwa perhatian yang tinggi oleh media membuat kelas menengah baru, tidak disebabkan karena pembangunan. Perhatian disebabkan oleh gaya hidup kelas menengah baru dan peran mereka sebagai barisan depan dari dimensi pembangunan berdasar pengalaman negara selama satu atau dua dekade. Hal yang mengikuti adalah kenaikan konsumsi, polusi dan sampah lingkungan dan jasa. Contoh yang banyak mendapat perhatian media adalah Cina dan India. Semenjak kelas menengah menjadi kelompok sosial penting dengan gaya hidupnya, terdapat konsekuensi yang dikhawatirkan menjadi bencana besar pembangunan. Gaya hidup yang berkembang pesat, yang berarti lebih banyak permintaan akan konsumsi energy dan emisi gas rumah kaca.

Kelas menengah baru disalahkan karena tidak memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan lingkungan.

Varma (1998) dan Gupta (2000) menyatakan anggota kelas menengah baru contohnya di India diberi label "konsumerist predator" dengan keprihatinan social secara intensif. Mereka dicela sebagai kelompok pasif, berpandangan sempit, dan merupakan konsumen yang *naïf* dilihat dari konsumsi mereka yang tidak bermanfaat dan tidak berguna yang menunjukkan kelemahan mereka. Said (1978) menyebut hal ini sebagai gambaran negara kolonial India dan negara lain yang tidak tercerahkan oleh kaum orientalis.

Klasifikasi kritis lain dari kelas menengah adalah mereka digolongkan sebagai orang kaya baru. Klasifikasi ini merupakan studi awal mengenai kelas menengah baru pada tahun 1996 yang dilakukan oleh (Robison dan Goodman, 1996; Rodan, 1996; Sen dan Stivens, 1998; Pinches, 1999, Chua, 2000; Hutchinson & Brown, 2001). Terma kelas menengah baru di satu sisi memperlihatkan fakta penting. Sebagian besar kelas menengah baru menunjukkan pencapaian kemakmuran yang baru. Di sisi yang sama, terdapat terma yang menghakimi seperti orang kaya baru (*the nouveau rich, the upstars, the new rich des the parvenu*). Perspektif ini diberikan oleh kelompok sosial yang mapan yang mengklaim bahwa pendatang baru

belum mengetahui bagaimana berperilaku dan dianggap kurang rasa dan gaya yang berarti hal ini merupakan perbedaan sosial melampaui kekayaan belaka. Dalam istilah sosiologi mengikuti Bourdeau (1985), mereka memiliki modal finansial tetapi tidak memiliki modal kultural.

Meskipun pernyataan mengenai kelas menengah yang dianggap memiliki masalah sosial dan lingkungan seperti konsumeris predator, memiliki cara berpikir dan bertindak yang tidak sesuai, kelas menengah baru dianggap dapat membahayakan bangunan peradaban dan masa depan kita. Kelas menengah baru berada dalam posisi sebagai penggali kubur dalam keberlanjutan masa depan.

Kelas menengah baru terlihat sebagai harapan baru negara berkembang. Mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat yang merepresentasikan inovasi dan manajemen yang potensial. Kemampuan suatu Negara untuk mencapai kemakmuran tergantung pada awalnya dan terutama pada kelas ini. Eksistensi kelas menengah yang kuat merupakan kondisi yang penting untuk mendorong kemajuan ekonomi sebagaimana juga kemajuan sosial. Perspektif ini didorong oleh politisi dan

kelas menengah baru di negara-negara termasuk Cina dan India. Di sisi lain, opini yang mendukung kelas menengah baru tidak terlalu penting. Ada harapan yang berbeda bahwa kelas menengah baru membawa harapan konflik baru dalam bidang ekonomi, politik dan budaya.

Adalah penting untuk memberi perhatian pada kelas menengah baru, karena *pertama*, peran kelas menengah baru yang akan mereka mainkan baik sebagai pembuat kebijakan dan sebagai konsumen dalam pembangunan dan 'penarik ekonomi' yang signifikan. *Kedua*, kelompok ini memberi kontribusi penting untuk fakta bahwa modernisasi sosial memiliki banyak dimensi yaitu dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan teknologi yang muncul dalam kota metropolitan dalam dunia industri. Kelas menengah menjadi fokus istimewa dari modernisasi sosial dalam skala global dan mereka akan memainkan peran lebih intensif dan penting di masa depan.

B. Kelas Menengah Baru: Perspektif Klasik

Terma kelas menengah, dalam analisis awal menunjukkan kemungkinan kategori formal dalam hubungan sosial yang mengindikasikan kelas masyarakat yang berada tidak di level atas dan tidak juga di level

bawah yang ditentukan masyarakat tetapi merupakan situasi diantaranya. Terma ini berbeda maknanya jika digunakan dalam konteks status kekayaan dan status sosial. Namun demikian, terma kelas menengah sejak awal ditujukan dengan penilaian bahwa kelas menengah merupakan strata sosial menengah dari situasi penting dua kelas utama, kelas kaya dengan kekuasaan dan kelas miskin yang tanpa kekuasaan. Dalam interpretasi kategori ini terma kelas menengah menyoroti perubahan sosio kultural yang disusun sebagai gambaran inti transisi dari struktur masyarakat feodal menuju masyarakat industri dan kapitalis, dengan jumlah besar kelompok ini dalam kelas sosial modern, termasuk kenaikan polarisasi yang tajam antara pekerja kelas miskin dengan para pemilik perusahaan. Gambaran ini menunjukkan dasar tipe politik, terutama ketika melihat gerakan kelas pekerja sosialis mengikuti teori Marxis.

Pentingnya kelas menengah baru adalah kedekatan hubungan namun di saat yang sama berlawanan dengan penafsiran umum dimana analisa berada di sekitar para pekerja yang merepresentasikan kelompok sosial baru yang muncul sekitar pertengahan abad 19. Para pekerja kantor yang bekerja di sektor operasional dan teknik serta

ahli sains. Mereka bekerja di bidang industri baru. Namun berlawanan dengan hal tersebut, kelas menengah tua utamanya pedagang kecil dan ahli teknik adalah mereka yang eksis pada abad pertengahan. Sebagai borjuis kecil, mereka membentuk struktur sosial kota secara signifikan. Para lulusan universitas memainkan peran yaitu menjadi bagian yang mengisi berbagai profesi seperti pengacara, dokter, guru dan staf administrasi.

Pekerjaan yang membutuhkan keahlian memerlukan pelatihan dan pendidikan, status sosial bagus dan pendapatan yang sesuai dengan gaji yang diinginkan merupakan karakteristik kelas menengah baru. Perkembangan kelompok ini dapat dijelaskan secara kritis dari perspektif gerakan buruh. Kelompok ini faktanya meskipun memiliki gaji yang cukup besar, namun tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan, meskipun mereka bergerak pada manajemen perusahaan daripada sebagai pekerja. Menurut perspektif gerakan sosial, hal ini disebut dengan 'kesadaran palsu'. Kajian sosiologi tidak melihat hal ini dalam analisisnya. Namun demikian, dari studi-studi yang dilakukan cukup memberi bukti nyata bahwa kelompok ini dapat membedakan diri mereka dari mayoritas pekerja dengan

image sosial dan perilaku yang mengacu pada mental kerah putih (*white collar*).

Sejak tahun 1920-an, jumlah kelas menengah baru mulai naik dengan cepat sehingga jika dilihat dalam kajian sosio kultural dan spesialisasi disebut memunculkan heterogenitas kelompok. Hal ini menandakan pada awal perkembangannya pada awal PD II yang disebut sebagai masyarakat gelombang ketiga (*tertiarization society*). Istilah tersebut menunjukkan tidak hanya sektor ketiga dari awal yaitu produksi pertanian dan proses produksi, namun juga kenaikan signifikan variasi jasa dalam bidang industri. Setelah periode ini berakhir, pertumbuhan kelas menengah baru dari sebelumnya sebagai kelompok sosial baru dari minoritas menjadi kelompok yang lebih besar keberadaannya.

Ahli sosiologi C.W. Mills merupakan ahli sosiologi pertama yang melakukan investigasi pada kelompok ini. Dalam bukunya "*The White Collar: The American Middle Classes* (1951) ia menganalisis proses awal lahirnya kelompok ini pada masyarakat Amerika dan Eropa yang sedang tumbuh. Bagian dari struktur sosial yang tumbuh digolongkan dan disebut Mills disebut kelas menengah yang secara khusus menunjuk pada kelompok pekerja atau

buruh, pelayan sipil atau buruh pribadi, ahli pertukangan, professional serta pedagang.

Banyak peneliti kelompok ini mengakui bahwa masyarakat kelas kapitalis pada abad 19 dan 20 telah merubah mereka menjadi tipe masyarakat kelas menengah, mengatasi pembagian sosial serta menjawab pertanyaan sosial abad 19. Kriteria utama kelompok ini adalah adanya produksi massa dan naiknya tingkat pendapatan yang memungkinkan pekerja untuk mengakses lebih besar produk konsumerisme mewah seperti kepemilikan radio, televisi, lemari es, mesin cuci, mobil, apartemen atau rumah.

Di sisi lain, pentingnya istilah kelas menengah baru adalah mudahnya kelompok ini merubah struktur sosial dan juga perusahaan. Eropa dan Amerika adalah contoh paling relevan karena merupakan pusat pembangunan sosial yang dinamis termasuk cara hidup baru beserta identitas kultural. Amerika dan Eropa merupakan wilayah transisi dari feodalisme menuju kapitalisme melalui Revolusi Industri dan perubahan wilayah desa menjadi kota. Kelas menengah baru merupakan hasil kapitalisme dan menjadikan kota baru menjadi dinamis. Dalam konteks ini kelas menengah baru dapat diklasifikasikan

melalui tingkat pendapatan. Karakteristik kunci dari kelas ini adalah faktor sosial seperti pendidikan, profesionalitas, serta gambaran kultural dan mental. Pada awalnya kelompok ini menunjukkan perbedaan dalam istilah sosio kultural sebagaimana nilai, preferensi kultural dan gaya hidup. Para pelajar lebih condong digolongkan sebagai kelas menengah baru sebagai pembeda dibandingkan kelas tersendiri.

C. Pentingnya Kelas Menengah Baru dalam Negara Berkembang

Kelas menengah baru merupakan kelompok sosial baru yang menjadi bagian dari perubahan sosial yang dihasilkan oleh kota dan menjadi fokus dari analisa dinamika sosial baik dalam istilah ekonomi maupun budaya. Hal ini terutama disertai kurang signifikansinya produksi subsistensi desa dan kenaikan signifikan produksi dari industri. Namun berbeda dengan Eropa dan Amerika Utara, dimana proses industrialisasi telah berlangsung lebih dari dua abad, di negara miskin dan berkembang hal tersebut membutuhkan waktu, meskipun keadaan ekonomi dan kemajuan teknologi dapat diatur oleh banyak negara berkembang dan perusahaan dunia, namun negara maju telah mendahului untuk mengawali proses industrialisasi

tersebut. Dalam konteks munculnya kelas menengah baru ini tidak hanya petani kecil yang berada dalam tekanan yang keras, namun juga kelas menengah kota yang lebih dahulu ada seperti pedagang dan ahli pertukangan.

Perhatian pada kelas menengah baru di negara berkembang juga dinilai berbeda dengan di negara industri maju yang telah lama ada. Berbeda dengan negara industri dimana adanya industri modern telah mencetak kelas menengah baru, adanya sektor industri di negara berkembang dibarengi dengan sikap yang terbatas dan terlambat bukan karena sejarah kolonisasi mereka dan hubungan bentuk kelas pekerja. Kelas menengah menentukan pembangunan yang didukung oleh negara. Kekuatan kolonial secara sistematis telah mendorong pertumbuhan kelas jasa baru. Anggota kelas menengah baru menempati posisi rendah dan menengah seperti bidang administrasi dan jasa, termasuk profesi vokasi seperti pengacara, dokter dan ilmuwan. Sebagai bagian dari agenda pembangunan negara dan masyarakat, negara post colonial mendukung munculnya proses industrialisasi yang memunculkan kelas ini dan menjadikan hal itu sebagai bentuk kreatifitas kelas menengah pribumi. Di Negara Asia Selatan dan Afrika yang mendapat

kemerdekaan dari negara kolonial, proses munculnya kelas menengah baru membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Sektor industri di negara-negara ini dibangun dengan konsep negara tentang pembangunan termasuk dasar-dasar rencana ekonomi yang akan dilakukan.

Analisa tentang kelas menengah baru jarang sekali dilakukan karena status negative mereka. Saat ini sektor prestisius dan paling menjanjikan adalah perusahaan dengan orientasi internasional yang bebas dari kontrol pemerintah. Sektor tersebut dianggap memiliki kondisi yang dapat meningkatkan jumlah kelas menengah seperti perusahaan IT dan sektor jasa. Kerjasama antar sektor termasuk juga pekerja telah mendukung dan merepresentasikan proses modernisasi di negara mereka. Kebijakan pemerintah memiliki perang penting dalam modernisasi dan tumbuhnya konsumerisme. Contohnya adalah pemerintah dengan rezim otoritarian seperti Cina dan Singapura atau negara demokrasi seperti India. Aktor lain seperti politisi dan jurnalis bersikap skeptis melihat kelas menengah baru yang dianggap terlalu dikendalikan oleh nafsu untuk mengkonsumsi dan mengabaikan nilai-nilai dalam masyarakat, hal tersebut dianggap sebagai karakteristik kelas menengah pada tahap awal.

Di India, kelas menengah lama memiliki peran penting dalam memodernkan India. Program Gandhi dan Nehru sebagai gabungan kerangka ideologi yang pada perkembangan kelas menengah tahap awal memberikan pedoman beraktivitas. Modernisasi suatu negara selama proses industrialisasi tidak dapat menghindari pengabaian sensitivitas sosial dan sikap gemar pamer kekayaan (Varma, 1998: 33). Varma menyimpulkan sulit untuk mengharapkan gerakan ini. Keegoisan kelompok ini dengan menarik diri dari pengaruh negara dan menghindari dari komitmen terhadap komunitas dan kesejahteraan sosial merupakan hal yang banyak terjadi. Hampir di setiap Negara, yang belum dan sudah merdeka, banyaknya jumlah kelas menengah terdahulu dalam analisis proses dekolonisasi di satu sisi dan karena aktifitas profesional mereka antara negara dan masyarakat di pihak lain terlihat seperti gerakan khusus atau gerakan ideologi. Contohnya adalah Indonesia, Malaysia, dan Cina.

Negara menjadi sangat penting untuk kelompok kelas menengah baru ini karena menjamin pekerjaan, dan pengaruh sosial menjadi titik orientasi untuk membangun image politik dan profesionalitas. Fenomena ini berlangsung di beberapa Negara Asia. Kelas menengah

muncul dan berada di bawah dukungan negara, kecenderungannya dan anggotanya mencerminkan kreasi dan bahkan pendukung negara dan rezim dominan. Korupsi dan penghambaan menjadi pandangan perusahaan dalam pembangunan suatu negara dan ini kelihatan terjadi bebas baik dalam sistem pemerintahan otoritarian maupun demokratis.

D. Menghitung Jumlah dan Struktur Kelas Menengah Baru

Selama ini tidak ada kesepakatan dalam mendefinisikan kelas menengah baru. Spektrum heterogenitas dalam mengkaji bidang ini sangatlah besar. Definisi sederhana untuk kelas menengah baru adalah pada kemampuan untuk berbelanja. Myers dan Kent menghindari istilah kelas menengah baru meskipun mereka berbicara tentang konsumen baru. Menggunakan data Bank Dunia, mereka menggolongkan empat anggota keluarga yang pada tahun 2000 memiliki pendapatan di negara mereka dengan daya beli melebihi \$10000 setiap keluarga. Jumlah ini menunjukkan tingkat kekayaan yakni kemungkinan mampu berbelanja peralatan rumah tangga dan televisi, AC, computer pribadi, dan alat elektronik lain yang menjadi indikator gaya hidup mewah. Orang dengan

gaya ini berjumlah total 1,1 milyar yang disebut juga sebagai konsumen baru. Jumlah ini terdistribusi di lebih dari 20 negara dengan 17 negara adalah Negara berkembang dan 3 negara transisi di Eropa Timur. Berdasarkan indikator ini lebih dari setengah milyar konsumen baru tinggal hanya di tiga Negara yaitu Cina, India dan Brazil. Proporsi dari total populasi negara ini sebagai konsumen baru kelas global bergantung pada kekayaan Negara masing-masing. Terdapat perbedaan di masing-masing Negara, di Malaysia dan Thailand kelas ini berjumlah sekitar 53% dari populasi, Brazil 44% dan populasi, Indonesia 30%, Cina 24% dan India hanya 13%. Rata-rata pertumbuhan kelas menengah baru di tiap-tiap Negara sangat berbeda.

Analisis lain mengenai kelas menengah mengadopsi kriteria sosiologi dengan membedakan antara kelas atas dan kelas menengah bawah di satu sisi dan kelompok miskin di sisi lain. Secara substansi mereka juga menyinggung tingkat kemampuan berbelanja yang cukup mengenai pasar, namun definisi ini terlalu sempit untuk mendapat jawaban berarti dari pertanyaan tentang pola pola dan nilai sosial budaya, perilaku dan hobi yang berkaitan dengan hal ini. Definisi yang paling penting

adalah untuk memahami berapa pendapatan mereka dan bagaimana mereka mengatur pendapatan tersebut. Tidak mudah untuk menganalisis masalah ini hanya melalui statistic murni karena keterbatasannya.

Penilaian pertama dapat menggunakan perbedaan kategori profesional sebagai statistik pekerja resmi. Dalam hal ini kelas menengah baru termasuk "pekerjaan profesional dan teknik" serta "pekerjaan administrasi dan manajerial". Dua kelompok pekerjaan seperti juru tulis, penjualan dan jasa dimasukkan sebagai kelas menengah bawah. Pemilik usaha pribadi dan usaha kecil dimasukkan sebagai kelas menengah lama. Cara ini menggambarkan secara jelas bagaimana struktur sosial berubah selama kurang lebih 20 tahun ini. Berdasarkan penilaian ini, jumlah kelas menengah baru tumbuh di Malaysia dari 6% tahun 1970 menjadi 15% tahun 2000, di Singapura dari 11% di tahun 1950 menjadi 40% di tahun 1999.

Perbedaan yang didasarkan pada profesi, diferensiasi kultural dapat menjadi pertimbangan yang signifikan untuk penelitian tentang kelas ini. Negara dengan jumlah penduduk besar dengan kondisi penuh tradisi religiusitas dalam aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat adalah Malaysia, Indonesia dan India.

Klasifikasi lain dapat dilakukan melalui perbedaan etnis keturunan Cina di luar Cina (di Negara Asia Tenggara), struktur gender (perbedaan lapangan pekerjaan dan bidang aktivitas serta tingkat harapan antara pria dan wanita), pola mobilitas sosial dan struktur biografi (perubahan sosial selalu berhubungan dengan perubahan desa menjadi kota). Seluruh faktor ini dapat mempertimbangkan pola konsumsi dan perhatian pada lingkungan oleh kelas menengah baru, baik secara umum maupun spesifik Negara-negara yang akan diteliti.

Untuk meneliti kelompok ini, adanya perbedaan kultural yang dihubungkan dengan gaya hidup adalah penting. Mereka tidak berhubungan dekat dengan tradisi sosial dan budaya masyarakat. Mereka dapat mengotonomi pendapat dan preferensi mereka. Data statistik tentang kajian kelas menengah baru tidak menunjukkan karakteristik sosial yang relevan secara keseluruhan. Menyelidiki sumber daya keuangan seperti yang difokuskan studi sosiologi tidak mudah untuk dilakukan. Namun demikian, meskipun tidak terdapat kenaikan jumlah studi kelompok ini terutama untuk studi pola sosial masyarakat kelas menengah baru baik dari sisi jumlah maupun komposisi juga sikap dan perilaku. Kajian kelas

menengah baru menimbulkan perdebatan bagaimana globalisasi dijadikan pedoman bagi modernisasi sosial. Globalisasi telah menciptakan homogenisasi dan heterogenisasi budaya, cara hidup (*way of life*) dan gaya hidup (*lifestyle*). Kenaikan jumlah kelas menengah baru juga menimbulkan harapan dan kegelisahan juga keraguan dan keyakinan akan globalisasi.

E. Kelas Menengah Baru: Bentuk Penilaian Kontroversial Globalisasi

Topik mengenai kelas menengah penting untuk dipelajari demikian juga topik mengenai globalisasi. Selama beberapa waktu makna globalisasi hanya berfokus pada dominasi ekonomi dan politik dengan perhatian pada negara dengan tingkat perbedaan kekayaan dan identitas kultural. Globalisasi sering disebut sebagai mekanisme homogenisasi kultural dengan kelas menengah baru sebagai penggerak utama. Globalisasi telah menghasilkan perdebatan mengenai homogenisasi, diversifikasi, dan hibridisasi.

Sistem kolonialisme yang dilakukan Spanyol dan Portugis dalam periode pre industri ditandai sebagai awal penyebaran secara cepat politik ekonomi yang tergantung pada hubungan negara-negara dalam skala global.

Integrasi sistem ini mengikuti sistem industrial yang dibangun oleh ekonomi perusahaan global serta adanya dominasi politik dan budaya. Marx dan Engels dalam penelitiannya tahun 1848 menyatakan bahwa kebutuhan akan ekspansi pasar yang terus menerus untuk produk yang dilakukan kaum borjuis itu jumlahnya melebihi permintaan dunia, harus menyebar ke seluruh penjuru dunia, menembus seluruh penjuru dunia serta memiliki jaringan ke seluruh dunia. Kaum borjuis dengan eksploitasinya ke pasar dunia memberi karakter cosmopolitan dengan menyebarkan produksi dan konsumsi setiap Negara (Manifesto Komunis). Di beberapa Negara terdapat kurangnya pengaturan sistem ekonomi global, struktur politik dan militer selama periode dekolonisasi dan perang dingin. Globalisasi memberi perhatian pada akhir fase ini dan hal ini tidak hanya di beberapa Negara melainkan secara global.

Dimensi yang mengikuti sistem globalisasi ini adalah pada perbedaan tingkat khusus globalisasi yaitu investasi ekonomi, ekspor dan impor barang dan jasa, migrasi dan inovasi teknologi dan alur pasar. Perbedaan wilayah bergantung pada indikator yang digunakan. Penciptaan dan perkembangan pasar dunia sebagai proses

pokok globalisasi berhubungan erat dengan seluruh proses sejarah yang berhubungan dengan naik turunnya sistem colonial.

Dua topik yang mendominasi topik globalisasi adalah pertama, efek distribusi globalisasi yaitu negara mana saja yang memperoleh keuntungan dan negara mana yang mengalami kerugian. Hal ini termasuk juga pertanyaan bagaimana negara kolonial menggunakan cara dan kebebasan yang mereka mainkan untuk menaikkan peran politik dan ekonomi mereka. Kedua, dimensi kultural, yaitu adanya homogenisasi kultural mengikuti Barat dan Amerika. Aspek lain mengenai gaya hidup adalah hibridisasi interkultural. Perhatian pada kelas menengah baru relevan dengan keberadaan aktor sosial, memiliki dampak kuat dalam proses ekonomi, peningkatan teknologi dan perubahan kultural di negara-negara di dunia.

Istilah McDonalisasi merupakan pertanda homogenisasi kultural yang terjadi secara komprehensif. Ritzer mengenalkan istilah ini dalam analisa sosial tentang globalisasi. Ritzer memahami McDonalisasi sebagai bentuk khusus manajemen perusahaan. Dalam definisi ini manajemen perusahaan berusaha untuk melakukan

efisiensi, prediksi pengukuran dan mengontrol proses dalam perusahaan, strategi yang digunakan menyebabkan pentingnya budaya perusahaan yang dilakukan secara terus menerus oleh pekerja. Hal itu meliputi kecepatan waktu dalam jumlah besar, konsep keuntungan besar di bidang makanan cepat saji. McDonaldisasi adalah proses dengan prinsip restoran cepat saji yang mendominasi banyak sektor masyarakat Amerika sebagaimana juga dilakukan di seluruh dunia (Ritzer, 2004:1).

Frederick W. Taylor melihat bahwa dalam membangun, bentuk yang paling efektif adalah proses mengatur produksi dan proses sebelum dan sesudah produksi yang menjadi topik penting manajemen perusahaan modern. Keberhasilan tesis Ritzer tentang McDonaldisasi adalah bahwa konsep jaringan manajemen perusahaan penting dalam globalisasi. Dalam konteks ini McDonaldisasi mengajarkan makna baru tentang strategi, sebagaimana cara hidup Amerika yang telah berlaku universal di Negara, wilayah dan budaya lokal yang tidak dapat dihentikan dan menyebabkan mereka mengalami kekecewaan. Tendensi ini melekat secara harfiah pada pemiskinan dan ketergantungan ekonomi baru sebagai daya tarik global yang dilakukan oleh warga negara yang

menjadi pendukung proses baik konsumen dan dalam kerangka yang sesuai dengan konsepnya sendiri.

Ritzer menghubungkan konsepnya dengan sosiologi klasik. Fakta tentang rasionalitas dan keberhasilan organisasi perusahaan pada masyarakat industri memiliki topik yang menarik bagi sosiologi. Perhatian terutama tidak hanya ditujukan pada organisasi, prinsip teknikal dan ekonomi tetapi juga dimensi subyektif seperti nilai, kepercayaan dan mentalitas. Gagasan Max Weber tentang makna etika protestan dalam mengembangkan kapitalisme dan prinsip manajemen rasional adalah contoh jelas karakteristik paradigma pemikiran dan tindakan masyarakat modern dan administrasi modern. Perlu memahami globalisasi sebagai proses homogenisasi dan westernisasi sebagai bagian dari analisis dan interpretasi sosiologi yang panjang dan mapan tentang masyarakat modern.

Menafsirkan globalisasi sebagai proses homogenisasi secara menyeluruh menjadi perhatian baik bagi ilmu politik maupun sosiologi. Kebanyakan perdebatan sosiologi mengacu pada karya Eisenstadt tentang modernitas ganda yang memperhatikan perbedaan. Mengikuti Eisenstadt (2000), modernitas dapat

didefinisikan sebagai peradaban baru yang ditandai oleh karakter budaya dan institusi yang khas. Modernitas terlihat seperti contoh perlawanan komprehensif awal masa kuno yang ditandai oleh pemusatan religiusitas dan agama sebagai faktor kunci dalam membentuk peran sosial dan pemerintah. Masyarakat modern menurut Eisenstadt ditemukan pada masyarakat yang berbasis sekuler dan dengan banyak pilihan sosial. Meskipun seluruh masyarakat modern memberi karakteristik dasar proyek modernisasi, pola kultural dan institusi memberi bentuk yang berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Munculnya modernisasi ganda memberi nuansa baru pada istilah perbedaan budaya konsep Eisenstadt dan merupakan lanjutan homogenisasi kultural yaitu westernisasi.

Yang menjadi permasalahan adalah kerangka pemikiran Eisenstadt berdasar pada periode beberapa tahun terdahulu (modernitas vs kuno), analisis ini berasal dari periode waktu yang singkat dalam waktu tertentu. Dalam konteks ini membandingkan Negara-negara yang berbeda dengan perbedaan subsistem ekonomi, politik dan kultural dapat menemukan banyak contoh heterogenitas. Eisenstadt menganggap ada pengaturan institusi, tipe baru

hegemoni dan luasnya karakteristik budaya (dalam konteks Islam, Hindu, dan tradisi konfusianis) berbeda dengan model Barat dan juga menimbulkan asumsi dari modernitas yang berbeda.

Pandangan Eisenstadt ditentang oleh argumen bahwa membandingkan negara-negara yang berbeda seperti melihat bermacam-macam perbedaan dalam institusi, struktur pemerintahan, politik dan budaya. Tetapi sejak masing-masing sektor tumbuh dan berfungsi mengikuti logika khusus dan temporal membuktikan bahwa susah untuk menjelaskan hal ini sebagai bagian dari homogenisasi budaya yang relative seperti di Negara India, Indonesia, Brazil dan Cina yang secara substantive berbeda dengan budaya Barat. Hal tersebut berdasar analisis Hofstede dan Globe dengan mempelajari budaya khusus dalam Negara-negara tersebut melalui analisis skema dan metode. Pendekatan yang dilakukan dalam menganalisis kapitalisme yang bervariasi menghindari analisis makro dengan membatasi analisis yang berfokus pada kebijakan internasional dengan memperhatikan peraturan Negara tentang kekayaan (Streeck & Yamamura, 2004).

Ketika melihat fakta bahwa gaya hidup dan pola konsumsi menunjukkan tema heterogenitas tradisi dan rasionalitas yang berhubungan satu dengan yang lainnya, maka pendekatan ketiga diambil. Pendekatan tersebut memusatkan perhatian pada proses sejarah budaya bertemu dengan yang lain menimbulkan sesuatu yang baru, bercangkok dan berpola. Pencangkakan (hibridisasi) adalah produk baru dan merupakan penyatuan identitas dan budaya sendiri dengan pihak luar. Bukan hanya campuran tetapi juga sesuatu yang baru yang timbul dari pertemuan-pertemuan yang ada. Bhaba (1996, 2007) berpendapat bahwa tempat ketiga berkembang dari globalisasi dan migrasi, memberi peluang meluasnya identitas hybrid. Istilah ini lebih spesifik dari istilah *creolisasi* yang berasal dari identitas asli penduduk Caribbean.

Identitas global atau variasi kosmopolitanisme merupakan analisis yang sedang berkembang. Fokusnya adalah pada efek wisata dan migrasi. Dimensi kedua dari pertumbuhan identitas hibridisasi dan budaya adalah jaringan yang muncul dari hubungan professional dalam firma transnasional.

Kelas menengah baru dideskripsikan sebagai lapangan sosial dimana terdapat kontak yang intensif dan sering dengan pihak lain seperti media yang merupakan kontak professional dan juga migrasi ekonomi atau perjalanan wisata. Ada kondisi di luar kebiasaan yang di atas umumnya dari identitas hibrida ini. Dalam perspektif ini, kelas menengah baru merepresentasikan poin penting dari globalisasi budaya. Dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya, kelas menengah baru lebih terbuka pada globalisasi kultural dan menjadi agen khusus globalisasi kultural dan juga pandai menyesuaikan dengan pengaruh budaya luar sebagaimana juga ia memberi kontribusi bagi budaya mereka.

Dengan mempertimbangkan heterogenitas kelas menengah baru dalam istilah sosio ekonomi dan perbedaan dari pengaruh budaya yang saling mempengaruhi, selama ini tidak dikaitkan antara aspek sosial dan budaya serta perhatian pada politik dalam menganalisis kelas menengah baru. Heterogenitas dan inkonsistensi terjadi dalam melihat sub grup sosial yang khusus (sosial ekonomi, professional, okupasi), perbedaan kerangka budaya (agama, Negara, budaya politik), jarak yang dalam yang berasal dari dampak politik yang berasal dari peraturan

institusi dan kebijakan pemerintah serta preferensi individu, yang tidak sama tiap waktu.

Satu hal yang paling sering dijumpai dan dikemukakan terdapat empat komponen barang mewah yang terdapat dalam masyarakat. Dimulai dengan kepemilikan gadget murah, mobil mewah dan perjalanan wisata sebagai gambaran hidup level atas. Beberapa kelompok ingin lebih dari yang lain untuk membelanjakan kekayaan mereka. Kelas menengah baru dianggap sebagai pendukung modernisasi pada tingkat nasional dan global.

F. Civil Society dan Modernisasi Reaktif

Tanggung jawab masyarakat umumnya dianggap sebagai eksistensi dan relevansi negara dan tidak perlu ada identitas untuk keuntungan pribadi. Ide tanggung jawab warga Negara dapat dilihat sebagai bentuk perhatian pada lingkungan dan menjadi elemen yang dapat memotivasi perilaku masyarakat. Rasa tanggung jawab sosial dapat diterapkan dalam masyarakat luas dan bagaimana hal itu dapat menjadi dasar budaya politik suatu Negara merupakan perdebatan paling mengenai civil society. Ide mengenai civil society berhubungan dengan dimensi politik individu dan tanggung jawab pada dimensi

meta-individu pada budaya masyarakat dan politik pembuatan kebijakan.

Kelas menengah baru yang dianggap kurang peduli pada lingkungan dan masyarakat, menjadi ekspresi ke depan, sebagaimana pencipta, kekosongan atau bahkan ancaman permanen terbentang dari fungsi budaya civil society di Negara berkembang. Sebaliknya, di Negara industri memperhatikan dasar sejarah dimana politik ruang publik mengambil bentuk dan merupakan budaya politik khusus yang dibangun atas penerimaan luas tanggung jawab sipil untuk Negara. Dari banyak perspektif, Negara-negara berkembang perlu untuk mengambil bentuk yang sama dari budaya politik. Tetapi perspektif ini jauh dari bantahan.

Dengan mengutip Bhargava dan Reidfield, menurut Lange dan Meier, konsep yang bertentangan tentang civil society adalah berada dibawah kecurigaan lebih jauh dari Barat yang mengesampingkan atau bahkan mengabaikan Barat, dan ini adalah struktur spesifik dan tuntutan politik Negara berkembang. Problem inti dari masalah ini adalah di Negara berkembang pelaku bukanlah warganegara tetapi kelompok sosial (keagamaan, wilayah etnis dan sosial ekonomi) yang mewakili tingkat yang relevan

dengan niat membangun pemahaman politik dari mayoritas warga Negara. Tujuan yang ingin dicapai struktur ini menyerupai bentuk individual Barat dari pandangan yang memperhatikan sipil untuk dilihat, bergantung pada cara pandang. Bisa pula untuk menyerang kemampuan warga Negara yang ingin mewujudkan keinginan mereka sebagai bagian yang efektif dari kelompok sosial yang lebih besar dan tegas atau sebaliknya sebagai kondisi dari bentuk forum politik masyarakat yang relevan.

Dari pandangan nyata, asumsi yang berkembang terlihat menghilangkan dikotomi. Ada dua alasan untuk ini. Pertama keseimbangan Negara industri tetap merupakan bagaikan hasrat yang tertunda. Bahkan sekarang mengabaikan periode kediktatoran seperti di Jerman, Spanyol dan Negara sosialis, yang mengenyampingkan hampir banyak debat publik yang bebas dan tindakan sipil, yang merupakan gambaran budaya politik yang berbeda secara substantive dengan Negara-negara Barat. Dalam bukunya yang terkenal "*The Struktural Transformation of The Publik Sphere*" (1991) dengan fokus Jerman abad 19, Habermas menggambarkan proses pembatasan sikap warganegara pada ruang publik,

sesudah periode pendek dari kegemaran debat publik warga Negara, penyebaran sirkulasi surat kabar dan partai politik yang mulai terbentuk dan bahkan menempatkan perdebatan sebagai hal yang penting.

Kedua, sejak abad 19, bentuk civil society dan pemerhati sipil dibangun sebagai bentuk independen dan mode politik sebagai gambaran diri warga Negara, mereka tidak menjadi ekspresi nilai sejak lahir dan sikap individualitas Barat tetapi sebagai jawaban atas konflik sosial dan politik antara bagian mayoritas kelas urban dan aristokrat (Frevort, 2007). Pengakuan atas aturan umum dari perjanjian politik, dicoba untuk dihindari dengan hanya mempertimbangkan kepentingan kelompoknya sendiri, yang merupakan jawaban atas pertarungan politik dibanding jawaban atas kerangka normatif yang ada. Dalam pertarungan antara kelas borjuis yang berpengaruh dengan kelas buruh, proses ini terus berulang sejak akhir abad 19 dalam setiap Negara industri maju sebagai proses belajar menghargai, merupakan biaya yang mahal dari konfrontasi sosial, termasuk bentuk kekerasan serius sebagai poin perang sipil dan revolusi. Pentingnya tanggung jawab sipil di Barat yang merupakan konsep

rupanya menjadi petunjuk praktek yang relevan, terutama jawaban atas benturan sosial yang terjadi.

Di negara berkembang hal ini tidak mungkin, negara seperti India dan Cina pemerintahannya berulang kali mendukung kebijakan patriarki di wilayah kota dan semi kota, terutama sebagai respon atas perkembangan yang lebih baik anggota kelas menengah baru. Kebijakan ini selalu menimbulkan penderitaan kaum miskin yang mendiami area ini. Mereka meninggalkan tempat yang telah mereka tinggali sejak lahir dan banyak dari mereka yang kehilangan tempat berjualan serta hidup di lingkungan yang kotor.

Dari perspektif yang berkembang tentang masalah lingkungan dan habisnya sumber daya, tumbuh ide tanggung jawab sipil sebagai lahan perhatian politik pada bidang pembuatan kebijakan dan memiliki dua gambaran umum. Pertama, faktor paling relevan di belakang isu adalah pendirian dan sikap tidak normatif, mereka juga menjawab tantangan yang berkembang dari efek yang diharapkan dan tidak diharapkan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, yang membidik industrialisasi dengan membangun kota dengan cepat tanpa ada perlindungan untuk kaum miskin. Upaya untuk mereaksi

keadaan ini adalah apa yang disebut modernisasi refleksif menurut Beck, Giddens & Lash (1994). Modernisasi ekologi dalam istilah inovasi teknologi dan pembangunan lingkungan menimbulkan reaksi. Kedua, terjadi perkembangan pengaruh politik Barat yang relevan mengenai isu-isu yang berkembang terus di belahan dunia lain. Modernisasi refleksif juga menjadi politik imperative pada Negara-negara berkembang, hal ini terutama terlihat jelas di Cina. Saat ini pemerintah merasa dipaksa untuk mereaksi adanya sampah lingkungan dan polusi yang disebabkan oleh kebijakan yang memfokuskan pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir.

Negara-negara berkembang memiliki problem yang sama dengan Negara-negara industri maju. Sebaliknya, kondisi lingkungan dan sumber daya yang berkaitan dengan problem saat ini sebagian besar merupakan hasil dari model industrialisasi di Barat, termasuk model pola konsumsi Barat yang saat ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di saat yang sama, tidak dapat disangsikan bahwa masalah-masalah sosial yang muncul di negara berkembang tidak dapat diatasi tanpa penambahan penggunaan sumber daya. Negara-negara berkembang berada dalam situasi yang buruk.

Kelas menengah baru di negara-negara berkembang akan terus memainkan peran sangat penting ketika memutuskan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam bidang industri, ekologi dan pembangunan sosial sesuai yang mereka inginkan. Banyak dari mereka memiliki kualifikasi spesialis dengan kemampuan hebat, pengetahuan dan tanggung jawab. Mereka adalah warga negara yang mampu mengatur diri mereka sendiri secara profesional dan politik dengan perilaku di atas rata-rata yang akan memastikan mereka untuk mendengar, mereka adalah orang-orang yang terlihat seperti orang lain yang berperan sebagai role model bagi masyarakat atas pola konsumsi, gaya hidup dan perilaku masyarakat sipil.

G. Menghubungkan Kesadaran Lingkungan Individual dan Masyarakat

Ide tentang kesadaran akan lingkungan sebagai regulasi moral suatu tindakan dapat diringkaskan dalam dua hal, pertama, langkah tegas secara simultan dan obyektif dengan seluruh ide kesadaran akan lingkungan memiliki fokus sosial ekonomi dan kultural pada kelas menengah Negara industri terdahulu. Ia memusatkan peraturan untuk memproteksi alam, membatasi individu dan mengatur kembali pola konsumsi individu. Contohnya adalah

pelarangan sebagian mobil sebagai alat transportasi pribadi dengan tujuan untuk mengurangi emisi CO₂, menggunakan air dan energy secara ekonomis, serta memisahkan dan mendaur ulang sampah menjadi tujuan yang paling utama. Tipe ini merupakan pilihan orientasi yang memberi kelonggaran dan dapat dilihat pada seluruh konsep tentang Negara.

Di Negara global bagian selatan, sebagian besar populasi berada dalam kemiskinan, bahkan tidak dalam posisi untuk persaingan pola konsumsi. Ketika lingkungan menjadi topik relevan untuk mereka, hal tersebut tidak bertujuan untuk melindungi alam, tetapi lebih pada melindungi diri sendiri melawan alam, dalam hal bencana alam atau penurunan sumber daya alam. Tipe yang diambil untuk lingkungan ini tidak ditujukan pada ketakutan individu tetapi lebih merupakan upaya kolektif dan ditujukan untuk mewujudkan lingkungan sebagai bagian Negara dalam menanggulangi bencana secara konkret seperti timbulnya polusi. Sebagai program lingkungan untuk kelompok miskin, program ini mengajarkan untuk melawan perhatian pada lingkungan sebagaimana yang dilakukan kelas menengah.

Adalah jelas bahwa kelas menengah baru di Negara-negara berkembang merubah gambaran tradisional sejauh mereka memiliki kekuatan untuk meniru gaya hidup Barat. Sebagai konsekuensi di Negara-negara ini, fokus Negara Barat dalam menangani dampak lingkungan oleh kelas menengah merupakan gaya hidup mendapatkan signifikansi. Usaha yang dilakukan kelas menengah di Negara Barat merupakan dimensi perilaku personal warga Negara dalam politik untuk menentukan kebijakan dan debat publik. Negara-negara miskin tidak memberi perhatian dan obyektifitasnya dalam kebijakannya tentang lingkungan.

Keprihatinan kedua akan harapan terhadap lingkungan adalah merupakan bentuk kewajiban moral. Dalam banyak perdebatan publik, kesadaran akan lingkungan selalu terlihat seperti problem kuantitatif, tingkat kesadaran individu dan masyarakat akan lingkungan dapat bersifat tinggi, sedang atau rendah dan beberapa orang tidak menghargai hal ini. Kelas menengah baru diduga berada dalam kelompok ketiga dengan tingkat kesadaran rendah terhadap lingkungan.

Dengan menggunakan informasi yang akurat dan baik menurut Schwartz (1977), kesadaran akan efek

lingkungan yang negatif dari pola perilaku masyarakat dapat ditingkatkan. Banyak informasi tentang efek lingkungan yang negatif akibat perilaku dan nilai dalam masyarakat, dan meneruskan norma dan nilai yang selama ini melestarikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran akan lingkungan. Nilai dan sikap dapat meningkatkan kesadaran akan lingkungan meskipun dalam skala kecil. Tidak ada mekanisme nyata bagi masyarakat untuk memperhatikan lingkungan menjadi suatu tindakan praktis.

Tindakan yang didasarkan atas kesadaran pada lingkungan tidak tergantung semata-mata pada tingkatan individu dalam masyarakat. Terdapat batasan-batasan dari luar yang dapat membatasi aktifitas individual masyarakat. Penggerak lingkungan tingkat individual dalam masyarakat beraneka ragam, pertama, ada harapan masyarakat dan tindakan dari system pembagian kerja kelas menengah seperti tempat kerja, lingkaran teman dan tetangga. Kedua, kenyataan ekonomi seperti pendapatan yang dapat dihitung seperti pajak, lingkup sikap dan perilaku yang bersahabat dengan lingkungan tergantung pada ketersediaan material dan teknikal fasilitas seperti sikap efisien, harga yang masuk akal dan transportasi

masyarakat yang dapat menyediakan CO2 untuk menyediakan alternatif kendaraan masyarakat. Yang menjadi masalah adalah bahwa seluruh faktor terbatas ini susah untuk dirubah oleh warga negara atau untuk dirubah dalam waktu yang singkat.

H. Cina: Meningkatnya Kapitalisme dan Munculnya Kelas Menengah

Pembangunan dan perubahan struktural pada kelas menengah Cina merupakan kasus penting untuk membahas kenaikan secara global keberadaan kelas menengah. Titik awal pembahasan adalah asumsi bahwa pasar kapitalis (tanpa memperhatikan komoditas, buruh dan pasar uang) adalah tidak murni bergantung hanya pada institusi ekonomi dalam arti sempit, tetapi juga institusi sosial yang mereka belum anggap sebaagi rangkaian sosial yang dapat membantu mengatasi tiga masalah koordinasi untuk pasar, yaitu: kreasi dan pelaksanaan nilai-nilai, peraturan tentang kompetisi dan pengaturan koordinasi. Kondisi kontekstual pasar selalu terpengaruh oleh perilaku ekonomi dan organisasi internal dari perusahaan, meninggalkan sistem perusahaan nasional yang berbeda.

Untuk menguji karya Weber, ada lima elemen konfusianisme yang terutama relevan untuk menyesuaikan adanya sistem kapitalis:

1. Loyalitas pada pemerintah (*Government loyalty*). Kepercayaan pada pemerintah sangat tinggi di Cina. Budaya Konfusianis mewariskan pemberian kepercayaan pada keluarga dan otoritas politik, menghilangkan ketidakcocokan, dan menyediakan aktor sosial dengan motivasi untuk menyukai aturan dan khususnya untuk menyetujui keputusan pemerintah.
2. Preferensi pendidikan (*Educational Preference*). Salah satu inti inovasi sosial dari sejarah Konfusianisme adalah untuk memisahkan penghargaan sosial dari nilai kelahiran dan keturunan, terutama aturan konstitutif pendidikan dan kepatutan. Ketaatan dan elemen formal dihilangkan (pada komunisme, menolak ritual baru), warisan Konfusian menjadi dasar kokoh yang menggerakkan usaha individu dan institusi untuk mewujudkan simpanan sumber daya manusia.
3. Etos Kerja (*Work Ethic*). Meskipun konfusianisme kurang kuat dalam penyucian nilai transcendent dibanding Protestanisme pada etos kerja, hal itu membuktikan kelas pekerja dengan role model melakukan kewajiban dan

menahan diri dari konsumsi yang menyolok, ketika pada saat yang sama secara ekonomi para elit yang tidak aktif mengakui perlunya keberhasilan ekonomi sebagai syarat awal untuk tugas politik dan spiritual. Peserta proses ekonomi cenderung untuk menerima ketidaksamaan pendapatan.

4. Jaringan Sosial dan Kepercayaan (*Trust and Sosial Networks*). Konfusianisme merasa individu adalah bagian dari unit sosial yang lebih besar dan hal ini sudah tertanam, berbeda dengan individualism murni. Konsep shu (timbang balik) adalah pusatnya. Ren (cinta tulus, kebajikan, kemanusiaan) ditegakkan untuk memusnahkan individualitas, semangat berkorban, mengendalikan diri sendiri, privasi yang minim dan kontrol secara ideologi. Konfusianisme merasa keluarga (dan ikatan keluarga) adalah unsur penting dan menjadi contoh peran untuk hubungan sosial lain. Li menyatakan untuk aturan sosial yang ideal, dimana setiap orang dapat tempat dari hirarki. Kehidupan sosial di Cina banyak bergantung pada jaringan personal dan hubungan yang saling percaya dibanding Negara Barat.
5. Keselarasan Kosmis (*Cosmic Harmony*). Keselarasan merupakan nilai penting pada budaya tradisional Cina,

tidak hanya dalam dunia sosial, dimana dapat menghindarkan konflik terbuka dan penjagaan tatap muka yang penting, tetapi juga dalam hal yang umum dan rasa spiritual. Saat ini, keselarasan diinterpretasikan lagi dalam cara yang fungsional, merepresentasikan pertalian sosial dan aturan politik.

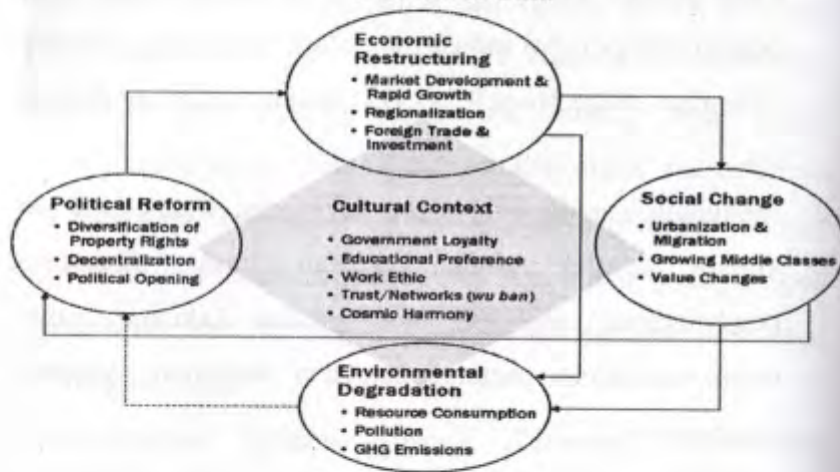
Banyak ilmuwan yang mencoba untuk memahami dan menjelaskan pertumbuhan Cina yang luar biasa sejak reformasi tahun 1978. Perkembangan nilai Asia dapat dibangun kembali sebagai ideologi politik pemerintahan otoriter dan juga membalikkan orientalisme. Ada tiga paradigma untuk membandingkan interpretasi yang ada:

1. Mengikuti paradigma pasar bebas, kesuksesan ekonomi Cina adalah konsekuensi dari liberalisasi pasar dan orientasi ekspor dari industri ini. Studi Bank Dunia tentang "*The East Asian Miracle*" (1993) menunjukkan pandangan ini.
2. Mengikuti paradigma Negara revisionis, kesuksesan ini kurang berefek pada kekuatan pasar dibanding pembangunan birokrasi, menggunakan kekuatan pasar untuk menjamin pertumbuhan dan kekuatan ekonomi nasional.

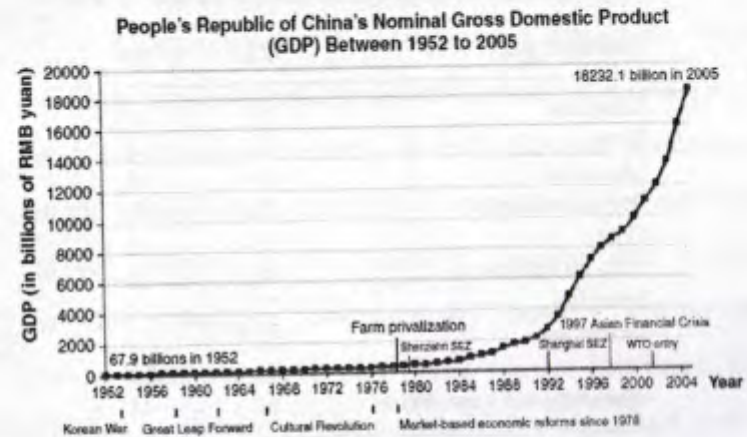
3. Paradigma kultural mencatat kesuksesan ekonomi dan prestasi pemerintah kembali pada nilai-nilai tradisional budaya yang memungkinkan dan mendukung keduanya.

Kesuksesan pertumbuhan ekonomi Cina bergantung pada pasar, negara dan nilai budaya, dan kesemuanya tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling bergantung. Berdasarkan pandangan Weber tentang sosiologi agama, bahwa pertama, efek religius dapat berpengaruh dalam tindakan ekonomi, kedua, terdapat hubungan antara ide religious dengan kelompok sosial maka ajaran konfusianisme Cina dapat menjelaskan pembangunan sosial ekonomi Cina setelah reformasi Cina.

Gambar Proses Analisis Sistem Tumbuhnya Kapitalisme Modern di Cina



Tabel Gross National Product Cina dari Tahun 1952 - 2005



Tabel Perkembangan Pendapatan Kelas Masyarakat di Cina

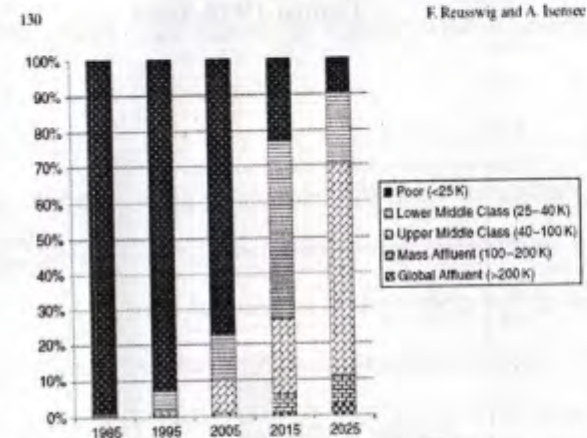


Fig. 7.3 Time Development of Chinese Income Classes (in CNY, 2015 and 2025 are Scenario Based Estimates) (Based on Data from MGI 2006)

Gambar Kelompok Kelas Pekerja di Cina

Table 7.2 Occupational Class Groups in Percent (Based on Data from P. Li, 2004)

Occupational groups	1978	2004
Ruling Class	1.0	2.1
Manager	0.3	1.6
Entrepreneurs	0.0	1.0
Technical Intelligence	3.5	4.6
Clerks	1.3	7.2
Crafts- and Tradesmen	0.3	7.1
Service Staff	-2.2	11.2
Working Class	19.8	17.5
Farmers	67.4	42.9
Urban Unemployed, Casual Workers	4.6	4.8

Tabel Perubahan Struktur Kelas di Cina Antara Tahun 1978-2004

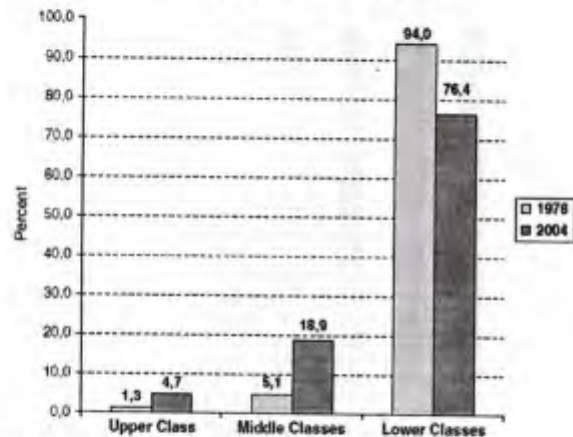


Fig. 7.4 Change in Chinese Class Structure between 1978 and 2004 (Based on Data from P. Li, 2004, Re-categorized)

I. India: Kelas Menengah Baru, Konsumsi dan Pembangunan Negara

Sebagai gambaran kemakmuran, konsumsi Negara India kini menurut Leela Fernandes menjadi lebih baik sebagai perwujudan budaya domestik di India maupun pembicaraan politik internasional, India telah mengalami perkembangan dahsyat ekonomi global. Ideologi, budaya dan tindakan masyarakat dianggap tidak membuat konsepsi yang normatif tentang kelas menengah baru India sebagai kelompok kaya dengan kapasitas konsumsi yang tumbuh dengan baik sebagai simbolisasi keberhasilan liberalisasi dan merupakan mesin penggerak liberalisasi. Perubahan di India menyebabkan perhatian publik dan akademisi tertuju pada konsumsi kelas menengah.

Studi tentang konsumsi kelas menengah di India selama ini cenderung dilakukan untuk memperkuat analisis model dari preferensi konsumen, dan salah satu hal yang dibicarakan adalah hubungan antara perubahan ekonomi serta perilaku dan keinginan konsumen. Fokus hubungan antara kelas menengah dan strategi pembangunan Negara dimulai dengan memberikan perangkat konseptual yang menghubungkan tingkat konsumsi kelas menengah dan bagaimana keberlanjutannya. Liberalisasi ekonomi di

Negara seperti India memperlihatkan secara terus menerus perubahan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Konsumsi menjadi isu sentral dalam perdebatan dan wacana kontemporer kelas menengah India. Perbincangan publik tentang kelas menengah India (saat ini diperkirakan berjumlah 350 juta) diperhitungkan sebagai konsumen pasar potensial dan merepresentasikan sebagai orang India dan bisnis multinasional. Pola yang terlihat dari praktek konsumsi baru (dengan konsumen barang mahal baru seperti telepon seluler dan mobil) adalah pola konsumsi mereka yang sangat besar yang berbeda dengan pola konsumsi kelas menengah pada awal abad 20 yang terbatas dalam kaitannya dengan konsumsi kelas menengah di India setelah mengalami liberalisasi. Pengidentifikasian diri dilakukan anggota kelas menengah dengan pola baru konsumsi. Kelas menengah secara individual menyediakan komoditi baru sebagai tanda kesuksesan ekonomi di India dan menyatakan identitas pribadi dan kepotensialan sosial ekonomi mereka untuk menjadi konsumen yang siap dibawah liberalisasi.

Studi dalam konteks komparatif menggambarkan peran sejarah dimana kelas menengah bermain di ruang publik. Pada kasus India, penelitian ini cenderung untuk

menyamakan praktek konsumsi baru dengan perluasan ruang pribadi dan peran yang meluas yang tumbuh dari kebijakan liberalisasi ekonomi. Keinginan untuk menjadikan konsumsi sebagai pilihan individual bebas dan cara pribadi diperbesar kemungkinannya oleh adanya proses privatisasi.

Pembangunan yang dihasilkan India akibat liberalisasi ekonomi telah berlangsung sejak tahun 1990. Perbincangan publik tentang liberalisasi ekonomi berpusat pada meningkatnya jumlah kelas menengah. Kelas menengah baru India adalah baru dalam istilah ideologi dominan baru dan identitas kebijakan liberalisasi. Komposisi sosial dan struktur kelas menengah baru di bawah liberalisasi tidak berbeda dari kelas menengah sebelum liberalisasi. Sebagai contoh, kelas atas digolongkan sebagai kelas menengah yang berpotensi untuk mengadakan perbaikan, lapisan tengah kelas menengah dianggap selalu mencoba untuk mendapat akses pekerjaan dan keduanya digolongkan berada dalam lapisan atas, kemampuan berbicara dengan Bahasa Inggris yang dimiliki kelas menengah berkontribusi bagi Negara dalam hal pendidikan.

Masyarakat kelas ini yang direpresentasikan dalam iklan dan media secara terus menerus sehingga semakin membuat dan memperkuat identifikasi ini. Kelas menengah secara individual menekankan pada eksistensinya untuk menjadi konsumen baru dan konsumen barang mewah sebagai tanda bagi citra tanpa memperdulikan kemampuan daya beli mereka sendiri. Identitas sebagai konsumen kelas menengah merupakan hal baru dalam masyarakat India. Kekuatan kerah putih dan penyatuan sektor publik di India memberi bagian signifikan bagi kelas menengah. Dan identitas mereka selama ini adalah lebih sebagai pekerja daripada sebagai konsumen.

Konsumsi kelas menengah sebagaimana pembangunan berkelanjutan dilakukan dalam merespon kebijakan untuk kemiskinan desa dan kelompok sosial ekonomi marginal. Ada hal yang berbeda antara gambaran kehidupan desa tradisional dengan gambaran konsumsi kelas menengah yang berjalan dalam sejarah tradisional dan modern. Secara signifikan, studi menemukan bahwa terdapat perbedaan ekonomi dan terdapat gambaran bahwa kelas menengah dan kelompok sosial 'subaltern' merupakan masing-masing bidang kajian India kontemporer.

Kelas menengah menempati wilayah dalam masyarakat yang ditandai oleh mundurnya Negara serta banyaknya emisi gas karena meluasnya konsumsi. Kelompok subaltern merupakan kaum miskin desa yang terdapat dalam pembangunan Negara yang berlanjut dengan tingkat konsumsi yang tidak terbatas. Menyamakan kelas menengah dan kelompok subaltern membuat peran Negara menjadi kabur dan memperkuat kebijakan liberalisasi. Kelas menengah baru bertindak sebagai agen liberalisasi, didukung oleh kebijakan Negara dan kadang dianggap sebagai perpanjangan tangan Negara dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diperoleh. Wacana pemisahan kelas menengah dari pembangunan dapat menggeser sumber daya yang ada, dalam prioritas pembangunan dan kebijakan pembangunan desa miskin dapat terhambat.

Munculnya kelas menengah di India secara spesifik dihubungkan dengan pergeseran budaya politik nasional yang dikaitkan dengan periode liberalisasi setelah tahun 1990. Kelompok sosial ini secara spesifik dihubungkan dengan pandangan politik dan budaya dalam liberalisasi dan menolak adanya pengaturan ekonomi oleh negara pada awal kemerdekaan India. Dalam penelitian dan perdebatan ilmiah,

kelas menengah terdahulu dihubungkan dengan kuatnya ketergantungan pada negara, berbeda dengan kelas menengah baru yang berkaitan dengan banyaknya pilihan dan kesempatan untuk bekerja di sektor privat. Pemerintahan Nehru dan rezim sesudahnya dalam dekade pertama India memainkan peran penting dalam menciptakan dan memperbesar kelas menengah dimana peran negara adalah menyumbang pendidikan tinggi (termasuk kemampuan berbahasa Inggris) serta kemudahan untuk bekerja di sektor publik. Kelas menengah baru digambarkan sebagai kelompok sosial yang terikat oleh perluasan modal privat serta bekerja pada sektor ekonomi baru, berbeda dengan kelas menengah terdahulu yang sangat bergantung pada negara.

Dalam konteks rejim pembangunan baru, negara juga tetap menjadi agen sentral dalam membentuk dimensi material formasi kelas menengah baru. Merubah praktek konsumsi sesuai politik gaya hidup merupakan keinginan paling banyak kelas menengah baru India. Munculnya politik gaya hidup bukanlah fenomena sosio kultural yang tumbuh untuk mengubah preferensi individu konsumen, melainkan karena individu kelas menengah merespon kondisi global baru dan hal itu merupakan praktek gaya hidup.

Politik gaya hidup kelas menengah baru adalah komponen penting liberalisasi negara. Politik gaya hidup dan ekonomi negara terstruktur melalui strategi negara dalam kebijakan lokal yaitu pembangunan kembali kota yang merupakan bentuk dukungan bagi kelas menengah baru yang berakibat pada penggunaan tanah yang meluas, menguntungkan secara ekonomi baik bagi pemerintahan lokal maupun pihak swasta. Peran negara banyak tergambar dalam memfasilitasi privatisasi dengan memberikan modal kerjasama maupun modal privat baik secara resmi atau informal maupun tidak legal dalam membangun infrastruktur (seperti pusat perbelanjaan, mal, jogging track, dan komplek perumahan elit).

Negara merepresentasikan sistem tindakan dan kebijakannya yang menggunakan produksi material gaya hidup kelas menengah baru. Strategi membangun kembali kota ditunjukkan untuk secara tidak langsung mendukung keberadaan dan perilaku kelas menengah baru dan membuatnya mengalami kenaikan (contohnya, program mempercantik kota dan konflik dengan pedagang kaki lima). Negara dalam konteks ini adalah aktor yang berperan bukan sebagai entitas netral dalam menghadapi kelompok kepentingan seperti kelas menengah (misalnya

mengatur persaingan anggota kelompok masyarakat seperti antara kelompok subaltern dengan proyek pembangunan).

Negara memerlukan peran kelas menengah baru dalam keberlangsungan pembangunan. Hal tersebut mengkhawatirkan karena peran negara yang besar dalam keberlanjutan pembangunan. Kebijakan negara dalam pembangunan sedikit banyak berpengaruh terhadap kelas menengah sehingga membuka peluang kelas menengah untuk bersekutu lintas kelas dimana negara tidak dapat menjangkaunya.

Kecenderungan dominan yang menjadi karakter kelas menengah baru India menjadi penghalang penting untuk proyek besar pembangunan yang berkelanjutan. Hubungan antara kelompok sosial baru dengan rezim yang berkuasa dalam pembangunan juga menggambarkan bahwa pembangunan lintas kelas merupakan kebutuhan yang dibutuhkan segera dibandingkan merubah praktek dan perilaku individu kelas menengah baru. Efek besar bagi masyarakat diperlukan melalui pengaturan negara dalam model pembangunan kelas menengah baru dan strategi pembangunan pemukiman layak kota.

Pembangunan pemukiman layak di perkotaan merupakan hal penting dalam membangun kembali kota. Pembangunan yang luas dan berkelanjutan merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan untuk kelas menengah baru. Sejarah panjang gerakan sosial lintas kelas memberikan gambaran penting untuk mewujudkan potensi terciptanya kebijakan untuk dapat membangun melalui koalisi jaringan kelas menengah, masyarakat kota dan masyarakat miskin pedesaan.

J. Catatan Kritis

Selama dua dekade terakhir beberapa ahli seperti Robison dan Goodman (1996), serta Abdul Rahman Embong (2001) melihat kepentingan akademis akan kelas menengah baru semakin mengalami perluasan dengan munculnya unsur penting seperti orang kaya baru dan kaum borjuis baru. Akibat meningkatnya pendidikan dan pengetahuan menjadikan kelas menengah baru menjadi produk perubahan dalam organisasi ekonomi masyarakat yang berkembang dengan bermacam permintaan bagi keterampilan dan keahlian baru mereka. Robison dan Goodman serta Embong berpendapat bahwa keinginan orang untuk memperoleh pendidikan tinggi adalah untuk pertimbangan profesional dan karir dan mereka adalah

konsumen par excellence dalam mengejar gaya hidup baru, mereka mengkonsumsi produk media, perlengkapan listrik dan elektronik, fashion dan barang-barang mewah, masakan, hiburan, pariwisata dan jasa pendidikan.

Praktek konsumsi adalah elemen penting dari status dan gambaran konstruksi pengalaman sehari-hari kelas ini. Konsumerisme atau konsumsi menurut Heryanto (1999) dan Young (1999) juga memiliki konsekuensi politik dan tujuan dalam konteks politik budaya atau politik identitas dalam kajian modernisasi. Robison dan Goodman menyatakan bahwa orang kaya baru dari Asia telah menarik minat atau menggilai produk Barat. Mereka adalah pasar baru produk Barat. Beberapa ahli menyatakan bahwa mendesak untuk baik kelas menengah maupun pemerintah untuk memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh materialisme yang telah menjadi kegemaran kelas menengah.

Munculnya kelas menengah menurut Victor King juga merupakan proses mendalam gender dalam pembangunan gaya hidup, kehidupan keluarga dan konsumsi, perempuan dengan peran mereka dalam rumah tangga dalam memutuskan apa yang akan dikonsumsi, sebagai agen dan aktor penting. Meskipun diakui dangkal,

namun menarik untuk sebuah konsep beberapa aspek konsekuensi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat di Asia seiring dengan meningkatnya konsumerisme dan penyebaran nilai-nilai budaya, praktek global tertentu dan gaya hidup, nampaknya menimbulkan lebih banyak kesulitan daripada menawarkan solusi.

Dalam berbagai literatur, kelas menengah banyak diharapkan menjadi agen perubahan karena mereka memiliki kemampuan lebih besar secara ekonomi, lebih berpendidikan dan posisi sosial yang baik. Bagi masyarakat yang berada dalam sistem kapitalis dan ekonomi pasar, gaya hidup bukan hanya menjadi bagian logis masyarakat kontemporer. David Bell dan Joanne Hollows menyebut gaya hidup telah berubah menjadi hal terpenting dalam budaya konsumen (*consumer culture*) kontemporer. Gaya hidup menjadi cara identitas dimediasi, diproduksi dan dihidupi. Dalam membentuk identitas, konsumsi telah melalui perubahan dari bersifat massal dalam produksi, pemasaran dan konsumsi.

Jean Baudrillard menggambarkan dunia konsumsi baru sebagai sebuah sistem obyek-obyek (komoditas) yang berkorelasi dengan sistem kebutuhan. Dalam analisis Baudrillard, konsumsi komoditas menandakan

kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, keberhasilan, gengsi, erotisme, modernitas dan sebagainya. Baudrillard juga menyatakan bahwa dalam masyarakat konsumen, produksi berkelindan dengan aturan konsumsi yang merupakan aturan dari manipulasi tanda-tanda. Bell dan Hollows menyitir bahwa konsumsi menjadi bersifat individu (*individualized*) ketika masyarakat berada dalam dunia tempat barang-barang konsumen tidak lagi memiliki nilai guna melainkan hanya memiliki nilai tanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Baudrillard, Jean, 1996 dalam Douglas Kellner, *Jean Baudrillard: From Marxism to Postmodernism and Beyond*, Stanford: Stanford University Press
- Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. 1994. *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in The Modern Social Order*. Cambridge: Polity Press
- Bell, David & Joanne Hollows, 2005. "Making Sense of Ordinary Lifestyles" dalam David Bell dan Joanne Hollows (eds), *Ordinary Lifestyles: Popular Media Consumption and Taste*, England: Open University Press
- Bhaba, H. K., 2007. *The Location of Culture*. London: Routledge
- Bulkin, Farchan, 1984. "Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian", *Prisma*, 13(2)
- Chua, B. H., 2000. *Consumption in Asia: Lifestyles and Identities*, London and New York: Routledge
- Dick, Howard W., 1996. "Refleksi Lanjutan terhadap Kelas Menengah" dalam Richard Tanter dan Kenneth Young. *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Eisenstadt, S. N., 2000. *Multiple Modernities*. USA: Transaction Publisher
- Embong, Abdul Rahman, 2001. "Middle Class Politics, Democracy and Civil Society in Malaysia", in Hsin-Huang Michael Hsiao (ed), *Exploration of The Middle Classes in Southeast Asia*. Taipei: Program for Southeast Asian Area Studies, Academia Sinica
- _____, (ed), 2001. South East Asian Middle Class. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia

- Farid, Hilmar, 2006. "Masalah Kelas dalam Ilmu Sosial Indonesia" dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae (eds), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*, Singapura: Equinox Publishing
- Gerth, Hans dan C. Wright Mills 1946, *From Max Weber: Essays in Sociology*, New York: Oxford University Press
- Gupta, D., 2000. *Mistaken Modernity: India Between Worlds*, New Delhi: Harper Collins
- Heryanto, Ariel, 1990. "Kelas Menengah Indonesia: Tinjauan Kepustakaan", *Prisma* 19(4)
- _____, 1996. "Memperjelas Sosok yang Samar", Pengantar Kritis dalam Tanter, Richard dan Kenneth Young. **Politik Kelas Menengah Indonesia**, Jakarta: LP3ES
- _____, 1999. "The Years of Living Luxuriously: Identity Politics of Indonesia's New Rich", in Michael Pinches (ed), *Culture and Privilege in Capitalist Asia*, London and New York: Routledge
- Irving Louis Horowitz (ed). 1967, *Power, Politics & People: The Collected Essays of C. Wright Mills*, New York: Oxford University Press, 657 hal
- Irving Louis Horowitz. 1983. *C. Wright Mills: An American Utopian*, New York: The Free Press, 341 hal
- King, Victor T. 2008. "The Middle Class in Southeast Asia: Diversities, Identities, Comparisons and The Vietnamese Case", *International Journal of Asia Pacific Studies*, Vol. 4, pp. 73-109
- Kuntowidjojo, 1985. "Muslim Kelas Menengah Indonesia dalam Mencari Identitas, 1910-1950", *Prisma*, No. 11

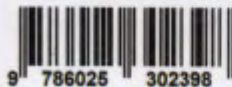
- Lange, Hellmuth dan Lars Meier (eds), 2009. *The New Middle Classes: Globalizing Lifestyles, Consumerism and Environmental Concern*, Germany: Springer
- _____, 2009. "Who are The New Middle Classes and Why are They Given so Much Public Attention". In Lange, Hellmuth dan Lars Meier (eds) *The New Middle Classes: Globalizing Lifestyles, Consumerism and Environmental Concern*, Germany: Springer
- Lay, Cornelis, 1997. "Kelas Menengah, Civil Society dan Demokrasi", *Jurnal Bina Darma*, No. 54
- Lev, Daniel S., 1996. "Kelompok Tengah" dan Perubahan di Indonesia: Sejumlah Catatan Awal" dalam Richard Tanter dan Kenneth Young. **Politik Kelas Menengah Indonesia**, Jakarta: LP3ES
- _____, 1996. "Sejumlah Catatan Mengenai Kelas Menengah dan Perubahan di Indonesia" dalam Richard Tanter dan Kenneth Young. **Politik Kelas Menengah Indonesia**, Jakarta: LP3ES
- Liddle, R. William, 1996. "Kelas Menengah dan Legitimasi Orde Baru" dalam Richard Tanter dan Kenneth Young. **Politik Kelas Menengah Indonesia**, Jakarta: LP3ES
- Mahasin, Aswab, 1990. "The Santri Middle Class", *Prisma: Indonesian Indicator*, 49
- _____, 1996. "Kelas Menengah Santri: Pandangan dari Dalam" dalam Richard Tanter dan Kenneth Young. **Politik Kelas Menengah Indonesia**, Jakarta: LP3ES
- Marx, Karl & Friedrich Engels, 1950. *Selected Work*, Vol 1, Moscow: Foreign Languages Publishing House
- Mills, C. Wright. 1951, *White Collar: The American Middle Classes*, New York: Oxford University Press

- Mills, C. Wright. 1956, *The Power Elite*, New York: Oxford University Press, 423 hal
- Mills, C. Wright. 1959, *The Sociological Imagination*, New York: Oxford University Press, 234 hal
- Mills C. Wright. 1948, *The New Men of Power: America's Labor Leaders*. Urbana, Illinois: University of Illinois Press
- Mills, C. Wright. 1958. *The Causes of World War Three*. London: Secker & Warburg
- Muhaimin, Yahya, 1984. "Politik, Pengusaha Nasional dan Kelas Menengah Indonesia", *Prisma*, 3
- Prisma*, 2012. "Kelas Menengah Indonesia: Apa yang Baru?" Vol. 31. No. 1
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Reusswig F., & Isensee A., 2009. "Rising Capitalism, Emerging Middle Classes and Environmental Perspective in China: A Weberian Approach". In Lange, Hellmuth dan Lars Meier (eds), 2009. *The New Middle Classes: Globalizing Lifestyles, Consumerism and Environmental Concern*, Germany: Springer
- Ritzer, G., 2004. *The McDonalization of Society*. Thousand Oaks and London: Pine Forge Press
- Robison, Richard, 1986. *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen and Unwin
- _____, 1995. Emergence of The Middle Class in Southeast Asia, *Working Paper* Asia Research Centre on Social, Political and Economic Change
- _____, 1996. "Kelas Menengah sebagai Kekuatan Politik di Indonesia: Beberapa Problem Analitis", dalam

- Richard Tanter dan Kenneth Young. **Politik Kelas Menengah Indonesia**, Jakarta: LP3ES
- Said, E., 1978. *Orientalism: Western Conception of The Orient*, London: Penguin Books
- Scimecca, Joseph A. 1977. *The Sociological Theory of C. Wright Mills*, Port Washington, New York: Kennikat Press, 148 hal
- Seda, Francisia SSE, 2012. "Kelas Menengah Indonesia: Gambaran Umum Konseptual", *Prisma*, Vol. 31. No. 1
- Sen, K. & Stivens, M. (eds), 1998. *Gender and Power in Affluent Asia*. London and New York: Routledge
- Tanter, Richard dan Kenneth Young, 1996. **Politik Kelas Menengah Indonesia**, Jakarta: LP3ES
- Varma, P., 1998. *The Great Indian Middle Class*, New Delhi: Penguin
- Veblen, Thorstein, 1934. *The Theory of The Leisure Class*, New York: Modern Library
- Wahid, Abdurrahman. "Kelas Menengah Islam di Indonesia" dalam Richard Tanter dan Kenneth Young. **Politik Kelas Menengah Indonesia**, Jakarta: LP3ES, 1996
- Winters, Jeffrey, 1988. "Indonesia: The Rise of Capital" : A Review Essay, *Indonesia*, No. 45 pp. 109-129, Southeast Asia Program Publication, Cornell University
- Wright, E.O. *Class, Crisis and The State*, London, New Left Books, 1978
- Young, Ken, 1999. "Consumption, Social Differentiation and Self-Definition of The New Rich in Industrializing Southeast Asia" in Michael Pinches (ed), *Culture and Privilege in Capitalist Asia*, London and New York: Routledge

Buku ini membahas tentang kelas menengah ditinjau dari problematika, teori dan kritik. Selain menyajikan gambaran kelas menengah di Amerika dan Eropa, buku ini juga membahas tentang keberadaan kelas menengah di Indonesia. Berbagai teori yang dikemukakan oleh pakar tentang kelas menengah dalam buku ini seperti C. Wright Mills, Richard Robison, Kenneth Young, Richard Tanter, Ariel Heryanto, dan lainnya diuraikan dalam buku ini. Buku ini berguna untuk dibaca bagi kalangan umum, mahasiswa dan dosen yang tertarik dengan masalah yang berkaitan dengan kelas menengah.

ISBN 978-602-53023-5-8



PENERBIT JDS